



## AJAKAN PRESIDEN JOKOWI GAUNGKAN TERUS CINTA BUATAN INDONESIA



ISSN 0854-6371  
9 770854 637158

**06** Refleksi  
Tanggapi Akselerasi Perubahan  
Dengan Pembangunan SDM

**16** Nasional  
Kolaborasi Pers dan MPR  
Jendela Bagi Masyarakat

**39** Selingan  
Impian Indonesia  
Miliki Arena Balap Dunia

**58** Sosialisasi  
Bamsoet Canangkan Salatiga  
Sebagai Kota Empat Pilar



*Selamat Menunaikan*  
**IBADAH PUASA RAMADAN 1442 H.**



*Selamat Hari Raya*  
**IDUL FITRI 1442 H.**



**EMPAT PILAR MPR**  
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

**INDONESIA**  
INI BARU  
DARI MPR RI UNTUK NKRI

**INDONESIA**  
MPR RUMAH KERANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT



**MPR**  
**RUMAH KEBANGSAAN**  
**PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA**  
**DAN KEDAULATAN RAKYAT**

**EMPAT PILAR MPR**  
PANCASILA, ULID NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

**INDONESIA**  
INI BARU  
DARI MPR RI UNTUK NKRI

**INDONESIA**  
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT





**MPR**  
**RUMAH KEBANGSAAN**  
**PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA**  
**DAN KEDAULATAN RAKYAT**



**EMPAT PILAR MPR**  
PANCASILA, ULUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

**INDONESIA**  
INI BARU  
DARI MPR RI UNTUK NKRI

**INDONESIA**  
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT



# Daftar Isi

EDISI NO.04/TH.XV/APRIL2021



## 08 BERITA UTAMA

### Gaungkan Terus Cinta Buatan Indonesia

Jumlah penduduk Indonesia sebesar 270 juta jiwa merupakan pasar potensial. Seharusnya penduduk Indonesia menjadi konsumen yang loyal untuk produk-produk buatan dalam negeri. Kita bukan hanya cinta produk lokal, tapi juga benci produk dari luar negeri.



## 16 Nasional

### Press Gathering Pimpinan MPR dengan Wartawan Parlemen



## 58 Sosialisasi

### Bamsuet Canangkan Kota Salatiga Sebagai Kota Empat Pilar



## 39 SELINGAN

### Sirkuit Sentul Indonesia



## 76 Profil

### H. M. Syukur

Pengantar Redaksi .....	04
Perspektif .....	06
Gema Pancasila .....	36
Aspirasi Masyarakat .....	47
Diskusi Majelis .....	48
Varia MPR .....	68
Wawancara .....	70
Figur .....	72
Ragam .....	74
Dari Rumah Kebangsaan .....	80
Rehal .....	82



**COVER**  
Edisi No.04/TH.XV/April 2021  
Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa





**Budi Muliawan**  
Redaktur Pelaksana

## Pengantar Redaksi

### Mencintai Produk Buatan Dalam Negeri

**P**RESIDEN Joko Widodo menyerukan kepada masyarakat untuk lebih mencintai produk buatan dalam negeri dan membenci produk dari luar (asing). Seruan itu sangat serius karena disampaikan presiden dalam dua kesempatan berturut-turut. Pertama, saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Perdagangan pada Kamis, 4 Maret 2021. Presiden meminta Kementerian Perdagangan untuk menyiapkan kebijakan dan strategi pengembangan pasar bagi produk dalam negeri. Salah satu strategi adalah bagaimana mendorong masyarakat agar lebih mencintai produk buatan dalam negeri sekaligus membenci produk-produk dari luar.

Kedua, presiden kembali melontarkan seruan serupa pada saat pembukaan Rapat Kerja Nasional XVII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia pada Jumat, 5 Maret 2021. Presiden menyebutkan, apabila banyak masyarakat Indonesia yang memilih produk buatan dalam negeri ketimbang produk dari luar (asing), maka hal ini akan membangkitkan industri nasional. Pada masa pandemi Covid-19, industri nasional sempat lesu.

Bukan kali ini saja pemimpin Indonesia menyerukan kepada masyarakat untuk memakai dan menggunakan produk buatan dalam negeri. Sejak pemerintahan Orde Lama hingga Orde Reformasi, pemerintah sudah menggaungkan cinta produk dalam negeri. Ini bisa dilihat dari kampanye dan slogan untuk mencintai produk dalam negeri. Pada masa pemerintahan Soeharto, ada slogan "Aku Cinta Buatan Indonesia". Lalu pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ada jargon "100% Cinta Indonesia", atau juga jargon iklan "Cintailah Produk-Produk Indonesia".

Seruan presiden-presiden Indonesia untuk mencintai produk buatan dalam negeri se-

benarnya cukup wajar. Pasalnya, negara-negara lain juga melakukan kampanye serupa secara besar-besaran untuk menumbuhkan kebanggaan masyarakat menggunakan produk dalam negerinya. Sebut saja, Tiongkok melakukan kampanye dengan jargon "Made in China 2025". Negara adidaya Amerika Serikat juga melakukan kampanye seperti "Made in All of America" ala Presiden Amerika Serikat Joe Biden.

Meskipun belakangan muncul kontroversi atas seruan Presiden Joko Widodo, kita tetap mengapresiasi keinginan pemerintah untuk mendorong masyarakat membeli produk-produk buatan dalam negeri. Agar tidak hanya sekadar lip service atau slogan, seperti ajakan-ajakan atau kampanye yang sudah-sudah, ada baiknya pemerintah memberi contoh dengan menjadi pembeli utama semua produk buatan dalam negeri. Pemerintah juga bisa memanfaatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai garda terdepan untuk membeli produk-produk buatan dalam negeri. Misalnya, dalam proyek-proyek pengadaan barang lebih mengutamakan produk buatan dalam negeri.

Bukan hanya pemerintah, semua pihak harus mendorong tumbuhnya "cinta buatan Indonesia". Pihak swasta, misalnya mal, hotel, atau rumah makan, menyajikan produk pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM dalam negeri. Begitu pula peran serta dari masyarakat. Warga masyarakat agar jangan malu menggunakan produk buatan dalam negeri. Sesungguhnya produk buatan dalam negeri tidak kalah mutunya dengan produk asing. Jangan sampai terjadi ketika orang Indonesia lebih bangga memakai produk dari asing ketimbang produk buatan dalam negeri sendiri. □



#### **PENASEHAT**

Pimpinan MPR-RI

#### **PENANGGUNG JAWAB**

Ma'ruf Cahyono

#### **PEMIMPIN REDAKSI**

Siti Fauziah

#### **DEWAN REDAKSI**

Yana Indrawan, Dyastasita,

Heri Herawan, Maifrizal

#### **REDAKTUR PELAKSANA**

Budi Muliawan

#### **KOORDINATOR REPORTASE**

Ario Setiawan

#### **REDAKTUR FOTO**

Oni Arief Benyamin,

Sucipto, Slamet Eko Suprayitno

#### **REPORTER**

Bayu Nugroho, Yenita Revi,

Ikhwan Bimo F, Amelia Rubinta

#### **FOTOGRAFER**

Ahmad Suryana, Frinda,

Restu, Suprianto, Faridz Rizky,

Wira, Subhan

#### **PENANGGUNG JAWAB/**

#### **KOORDINATOR DISTRIBUSI**

Cucu Riwayatni

#### **STAF DISTRIBUSI**

Ati Oktafia, Amiruddin,

Anggun Permana,

Armansyah

#### **SEKRETARIS REDAKSI**

Djarot Widiarto

#### **TIM AHLI**

Syahril Chili, Jonni Yasrul,

Ardi Winangun, Budi Sucahyo,

Derry Irawan, M. Budiono

#### **ALAMAT REDAKSI**

Bagian Pemberitaan dan Layanan

Informasi, Biro Humas,

Sekretariat Jenderal MPR-RI

Gedung Nusantara III, Lt. 5

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,

Senayan, Jakarta 10270.

Telp. (021) 57895237, 57895238

Fax.: (021) 57895237

Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id





ILUSTRASI: SUSTHANTO

## Tanggapi Akselerasi Perubahan dengan Pembangunan SDM

**A**KSELERASI perubahan begitu nyata sepanjang setahun lebih durasi pandemi global Covid-19. Semua perubahan itu menghadirkan konsekuensi logis yang harus disikapi dan segera direspons dengan kebijakan serta arah pembangunan yang tepat, agar generasi anak-cucu punya akses untuk beradaptasi dengan perubahan itu.

Tentang perubahan zaman, semua komunitas telah diingatkan melalui rangkaian pembahasan mengenai ragam konsekuensi dari Revolusi Industri 4.0 yang fokus dan mengandalkan digitalisasi dan otomasi. Hari-hari ini, Indonesia sudah dan sedang menapaki era itu. Dampaknya, atau sejumlah perubahan, pun sudah dilihat dan dirasakan langsung oleh semua orang. Peran manusia dalam proses produksi dan layanan jasa-jasa banyak berkurang. Pola belanja dan transaksi pun berubah. Memang, perubahan besar menjadi tak terhindarkan ketika dunia harus bertransformasi mengikuti perubahan zaman.

Pandemi global Covid-19 tidak menghentikan atau memperlambat perubahan itu. Sebaliknya, sudah menjadi fakta bahwa krisis kesehatan sekarang ini justru telah mengakselerasi perubahan. Kepatuhan menerapkan jaga jarak (*social distancing*) memaksa semua orang menanggapi percepatan roda perubahan itu. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, belanja hingga transaksi pun dari rumah. Presiden Joko Widodo bahkan menegaskan bahwa pandemi Covid-19 telah mengajarkan kepada semua komunitas untuk mendobrak cara-cara lama. Apa yang dulu dianggap tabu sekarang justru menjadi cara hidup baru. Digitalisasi yang dulu sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, menurut Presiden, kini bahkan sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan bersama.

Boleh jadi, atas nama efisiensi dan efektivitas, sejumlah perubahan yang dipraktikkan selama periode pandemi bukan tidak mungkin akan menjadi pola atau kebiasaan yang akan dipertahankan di kemudian hari. Misalnya, bekerja dari rumah demi efisiensi biaya kantor. Tentu saja dampaknya juga harus dikalkulasi sejak sekarang, utamanya terhadap masa depan sektor ketenagakerjaan, dan keahlian apa saja yang dibutuhkan pada semua sub-sektor ekonomi.

Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan tentang sejumlah konsekuensi akibat perubahan zaman itu. Memberi sambutan secara virtual dalam sidang terbuka senat dalam rangka Dies Natalies ke-45 Universitas Sebelas Maret (UNS), Jumat (12/3), Presiden mengingatkan, perubahan zaman menyebabkan permintaan dan kebutuhan tenaga kerja mengalami perubahan. Teori manajemen, organisasi, dan model bisnis juga banyak berubah. Akibatnya, banyak jenis pekerjaan lama tidak lagi dibutuhkan.



Untuk merespons perubahan itu, Presiden mendorong dunia pendidikan beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Revolusi industri 4.0 telah mengubah banyak aspek dari ilmu pengetahuan dan teknologi. "Tentu saja hal ini membutuhkan perubahan program studi, dibutuhkan perubahan kurikulum dan dibutuhkan perubahan karakter dosen," ujar Presiden.

Rangkaian penegasan Presiden itu secara tidak langsung ikut menyegarkan ingatan bersama tentang urgensi membangun dan



**H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.**  
Ketua MPR RI



memberdayakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, agar generasi anak-cucu mampu tak hanya beradaptasi, tetapi juga menjadi pelaku penting di setiap tahap perubahan zaman. Karena itulah negara harus mengalokasikan daya, ruang, dan waktu yang memadai bagi orang muda dan remaja untuk bertumbuhkembang menjadi generasi yang kompeten dan kompetitif. Agenda ini hendaknya selalu menjadi prioritas dan fokus negara.

Pesan ini penting dan juga relevan untuk selalu dikedepankan di ruang publik. Penting, karena generasi orang tua sekarang ini harus menghantarkan dan menyiapkan orang muda dan remaja menjadi generasi penerus yang berdaya saing sepanjang era Industri 4.0 dan era sesudahnya. Juga relevan karena Presiden Jokowi telah menetapkan pengembangan kualitas SDM sebagai prioritas pembangunan. Jangan sampai karena alasan pandemi pengembangan kualitas SDM terlupakan.

Tentang perubahan permintaan dunia kerja sebagaimana diingatkan Presiden Jokowi tadi, telah dikonfirmasi beberapa tahun oleh sejumlah institusi yang kredibel. Misalnya, McKinsey Global Institute telah melakukan penelitian tentang hilangnya peran manusia pada sejumlah pos pekerjaan, sebagai konsekuensi dari digitalisasi dan otomatisasi. World Economic Forum, dalam laporan bertajuk Future of Jobs Report 2018, mengungkapkan peran manusia dalam sejumlah pekerjaan tidak lagi dibutuhkan, karena akan muncul profesi dan karier baru selepas tahun 2022 mendatang. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristek Dikti) juga memperkirakan 75 juta hingga 375 juta pekerjaan akan hilang. Kajian lainnya menyebutkan, sekitar

50 juta peluang kerja di Indonesia akan hilang akibat otomatisasi dan digitalisasi di sektor ekonomi.

Dalam konteks menyiapkan anak didik dan remaja melakoni perubahan zaman itu, sudah barang tentu peran semua institusi pendidikan dari tingkat dasar hingga yang tertinggi menjadi sangat penting dan strategis. Karena itu, dorongan Presiden Jokowi agar semua institusi segera beradaptasi dengan semua perubahan itu sangat jelas relevansinya. Kini, mengacu pada inisiatif pemerintah memprioritaskan pengembangan kualitas SDM, semua institusi pendidikan punya alasan untuk menyiapkan proposal perubahan program studi dan perubahan kurikulum, sejalan dengan perubahan yang mengemuka dewasa ini. Transformasi digital akan berkelanjutan. Indonesia tidak seharusnya lamban melangkah. Peran dan kontribusi institusi pendidikan sangat diharapkan.

Sejatinya, masyarakat Indonesia siap dan ingin cepat bertransformasi. Salah satu indikatornya adalah jumlah pengguna internet. Hingga kuartal II-2020, total pengguna internet di Indonesia naik menjadi 196,7 juta jiwa. Lonjakannya signifikan, karena per 2017 masih berjumlah 143,26 juta orang. Karena itu, pemerintah pun diharapkan terus berupaya merampungkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang merata.

Hingga tahun 2020, sekitar 12.548 desa atau kelurahan belum terjangkau jaringan Internet 4G, meski sudah bisa menangkap sinyal 3G. Selain itu, 7.904 desa atau kelurahan bahkan belum terjangkau jaringan internet. Masalah ini selayaknya perlu dipercepat penyelesaiannya agar proses transformasi digital di dalam negeri bisa merata. □

Ajakan Presiden Joko Widodo

# Gaungkan Terus-menerus Cinta Buatan Indonesia



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Jumlah penduduk Indonesia sebesar 270 juta jiwa merupakan pasar potensial. Seharusnya penduduk Indonesia menjadi konsumen yang loyal untuk produk-produk buatan dalam negeri. Kita bukan hanya cinta produk lokal, tapi juga benci produk dari luar negeri.

**A**JAKAN untuk membenci produk asing itu datang dari Presiden Joko Widodo. Berawal ketika presiden memberi sambutan pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan 2021 di Istana Negara pada Kamis, 4 Maret 2021. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa mencintai produk Indonesia saja tidak cukup sehingga kampanye benci produk asing harus digaungkan. "Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia harus terus digaungkan. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri," katanya.

Di depan peserta Rakornas, Presiden meminta Kementerian Perdagangan membuat kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengembangkan pasar produk nasional. Misalnya, dengan program banga buatan Indonesia. Pusat perbelanjaan atau mal di Jakarta sampai ke daerah harus memberikan ruang bagi produk-produk Indonesia, khususnya UMKM. "Jangan sampai ruang depan, lokasi-lokasi strategis justru diisi oleh brand-brand dari luar negeri," ujarnya.

Presiden juga meminta brand-brand luar negeri itu harus digeser ke tempat yang tidak strategis. Lokasi yang strategis diisi untuk

brand-brand lokal. Karena itu branding produk lokal harus melekat di kepala masyarakat sehingga mereka lebih mencintai produk Indonesia dibanding produk luar negeri. "Penduduk kita jumlahnya lebih dari 270 juta jiwa. Jumlah 270 juta jiwa adalah jumlah yang besar. Pasar yang besar. Seharusnya penduduk Indonesia adalah konsumen yang paling loyal untuk produk-produk kita sendiri," paparnya.

Saat itulah Presiden meminta seluruh pemangku kepentingan untuk menggaungkan cinta produk Indonesia. Bukan hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta bersamaan dengan itu digaungkan benci produk asing. "Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia harus terus digaungkan. Produk-produk dalam negeri digaungkan. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri," ajaknya.

"Bukan hanya cinta tapi juga benci. Cinta barang kita, benci produk dari luar negeri. Sehingga betul-betul masyarakat kita menjadi konsumen yang loyal sekali lagi untuk produk-produk Indonesia," imbuhnya.

Seruan Presiden Joko Widodo yang menggaungkan benci terhadap produk-produk dari luar negeri berujung pada kontroversi.





Menyadari pernyataannya menuai kontroversi, presiden justru kembali menegaskan ajakannya membenci produk asing. Presiden mengatakan, tak ada persoalan dengan menggaungkan produk asing. Justru dia heran seruanya itu berujung kontroversi.

“Masa enggak boleh kita nggak suka? Kan boleh saja tidak suka pada produk asing. Gitu aja ramai. Saya ngomong benci produk asing, begitu saja ramai. Boleh kan kita tidak suka pada produk asing,” katanya saat membuka Rapat Kerja Nasional XVII Himnunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) tahun 2021 di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat 5 Maret 2021.

Terlepas dari kontroversi atas ajakan presiden, pada kenyataannya pasar Indonesia memang dibanjiri produk dari luar negeri. Indonesia tak berdaya menghadapi gempuran produk-produk dari luar (jika definisi produk-produk dari luar itu adalah barang impor yang masuk ke pasar Indone-

sia, baik legal maupun ilegal). Impor itu di antaranya termasuk bahan baku dan barang modal.

Tengok saja, sepanjang 2019, total impor Indonesia sebesar US\$ 171,3 miliar atau setara Rp 2.500 triliun. Jumlah impor ini meliputi impor komoditas yang bisa dimakan, seperti gandum-gandum, makanan olahan, buah-buahan, sayuran, daging binatang hidup, gula dan kembang gula, biji/buah berminyak, susu, telur, dan mentega. Tidak termasuk beras. Artinya, hingga kini Indonesia masih bergantung pada produk impor.

Lalu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020 nilai impor nonmigas Indonesia sebesar US\$ 141.568,8 juta. Pada Januari 2021, nilai impor migas dan nonmigas Indonesia sebesar US\$ 13,299,9 juta. Paling menonjol adalah impor produk dari Cina. BPS mencatat, impor asal Cina memiliki kontribusi 30,53% total impor Indonesia dari berbagai negara. Barang asal

Cina yang didatangkan, di antaranya barang konsumsi, bahan baku, dan barang modal.

BPS pun mencatat, produk asal Cina membanjiri realisasi impor Indonesia pada November 2020, sebesar US\$ 3,89 miliar. Selain Cina, kenaikan impor pun berasal dari Jepang sebesar US\$ 226 juta, Hong Kong US\$ 124,6 juta, dan Kanada US\$ 92,7 juta.

Belum lagi impor komoditas pertanian. Menurut data Kementerian Pertanian, hampir 100% bawang putih diimpor dari Cina pada tahun 2020. Pemerintah mengizinkan impor sebanyak 576.437 ton dengan kalkulasi kebutuhan sebanyak 560.390 ton. Sedangkan produksi dalam negeri hanya 48.821 ton.

Pun dengan komoditas lain, seperti gula. Data Trade Map menunjukkan Indonesia adalah juara bertahan impor gula selama 2016 – 2018 dengan nilai impor berturut-turut US\$ 1,7 – 2 juta. Pada tahun 2019, Indonesia turun ke peringkat kedua dengan

nilai impor US\$ 1,3 juta atau kalah dari Amerika Serikat yang mencapai US\$ 1,6 juta.

### Melindungi Produk Lokal

Dari kenyataan itu wajar saja bila setiap Presiden RI menggaungkan cinta produk Indonesia. Sejak pemerintahan Soekarno hingga pemerintahan Joko Widodo, cinta produk Indonesia terus digaungkan menghadapi serbuan produk asing. Namun, hasil dari kampanye cinta produk Indonesia memang masih jauh panggang dari api.

Meski demikian kalangan parlemen tetap mendukung seruan Presiden Joko Widodo untuk mencintai produk Indonesia dan membenci produk dari luar. Wakil Ketua MPR Dr. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA., memberikan dukungan terhadap seruan pemerintah untuk mencintai produk dalam negeri, dan membenci produk asing. Menurut Syarif Hasan, sapaan Sjarifuddin Hasan, produk buatan Indonesia sebenarnya tidak kalah dengan produk dari luar. "Bahkan ada produk buatan Indonesia yang lebih berkualitas dan diakui secara global," katanya kepada *Majelis*.

Syarief Hasan melihat bahwa seruan presiden itu sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada produk dalam negeri. Perlindungan dan keberpihakan itu harus diberikan kepada produk lokal, karena Indonesia dibanjiri berbagai produk dari luar. Sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia wajar menjadi pangsa pasar dan target dari produk-produk negara lain. "Kita harus menyikapi situasi seperti itu. Caranya, dengan memberikan keberpihakan pada produk-produk lokal," ujarnya.

"Jika produk yang kita miliki sejenis dengan produk dari luar, maka kita hendaknya memilih produk bangsa sendiri. Lain halnya jika memang produk dari luar itu tidak ada di Indonesia maka kita boleh menggunakan produk dari luar karena memang tidak ada pilihan," imbuhnya.

Anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Eva Nursanty, M.Sc., juga melihat pernyataan presiden tentang cinta produk Indonesia dan benci produk asing adalah



Sjarifuddin Hasan

sebagai bentuk melindungi produk lokal Indonesia. "Kita jangan berpikir negatif dulu terhadap seruan presiden. Sebab, makna yang paling konkret dari pernyataan presiden adalah mencintai produk dalam negeri. Apalagi saat ini kita menghadapi pandemi Covid-19, kita membutuhkan dukungan kuat bagi pertumbuhan produk lokal," katanya kepada *Majelis*.

Tak jauh berbeda, anggota MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, juga menyebutkan bahwa Indonesia menjadi pasar bagi produk-produk dari luar. Masuknya produk-produk dari luar ke Indonesia karena Indonesia terikat dengan perjanjian perdagangan bebas. Akibatnya, banjir produk dari luar tidak bisa terelakkan. "Memang perdagangan bebas sudah terbuka. Free trade zone, terbuka di semua negara," katanya kepada *Majelis*.

Herman mengungkapkan Indonesia terikat dengan kerjasama atau perjanjian komprehensif antarnegara dan kelompok

negara. Dia memberi contoh perjanjian dan kerjasama, seperti AFTA, ACFTA atau NAFTA, dan MEA. Dalam situasi seperti itu, masyarakat Indonesia harus menyadari menjadi target dari produk-produk negara asing. Karena itu, sebagai market yang besar, masyarakat Indonesia harus memilih dan mengonsumsi produk Indonesia. "Meskipun produk impor mengalir deras, harus bisa dipastikan kita tetap memilih produk dalam negeri," ujar pimpinan Komisi VI DPR RI yang membidangi masalah perdagangan ini.

Bagi Herman, public consumption bisa menjadi faktor utama dalam perekonomian nasional. Selain itu, peningkatan ekspor juga mendorong pertumbuhan ekonomi. "Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita memiliki market yang besar, yaitu ada 270 juta penduduk Indonesia. Kalau kita membeli produk dalam negeri maka produksi dan investasi akan meningkat pula. Kita tidak boleh terjebak dengan produk impor," sebutnya.



Herman Khaeron



## Kualitas Produk Buatan Indonesia

Pemerintah memang tak henti-hentinya mengampanyekan cinta produk buatan Indonesia. Namun, hasil kampanye itu belum tampak. Masih banyak orang yang lebih menyukai produk dari luar ketimbang produk buatan bangsa sendiri. Agar kampanye bisa berhasil, Syarif Hasan menyebutkan, kampanye cinta produk buatan bangsa sendiri harus mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat. “Semua pihak harus bersatu disertai dengan sosialisasi dan edukasi yang intens, terutama kepada kalangan generasi muda,” kata Menteri Koperasi dan UMKM pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Syarief Hasan menambahkan, untuk mencintai produk dalam negeri memang harus dimulai dari diri kita masing-masing. “Jadi kita harus memiliki kesadaran bahwa dengan membeli, mengonsumsi, dan menggunakan produk dalam negeri,” ujarnya.

Dengan membeli produk dalam negeri, lanjut Syarif Hasan, maka akan berdampak luas bagi perekonomian Indonesia, karena bisa membantu ekonomi rakyat dan membangun antarsesama anak bangsa. “Karena itu produk buatan Indonesia harus bisa ditingkatkan kualitasnya sehingga mampu bersaing dengan produk serupa dari luar, dan pada akhirnya produk kita menjadi pilihan bagi masyarakat,” katanya.

Herman Khaeron juga berpendapat sama. Bila orang Indonesia membeli produk dalam negeri, kata Herman, maka ekspor Indonesia akan meningkat. Sebaliknya, jika kita tidak mengonsumsi produk dalam negeri maka akan banyak produk dari luar masuk ke Indonesia dan produk dalam negeri tidak akan tumbuh. “Kita harapkan masyarakat cinta dengan produk Indonesia di pasaran,” ujarnya.

Menurut Herman, bila masyarakat mencintai produk dalam negeri maka akan mendorong pertumbuhan industri. Pada gilirannya investasi ikut naik dan nilai ekspor Indonesia semakin besar. “APBN ikut naik, juga pajak retribusi hingga belanja pe-

merintah,” katanya. Karena itu, harus diciptakan produk dalam negeri yang unggul. Jangan sampai produk dalam negeri kalah dari produk impor.

Sependapat dengan Herman Khaeron, Eva Nursanty juga mengatakan, kualitas produk buatan Indonesia harus ditingkatkan. Karena itu, industri di Indonesia perlu dibenahi untuk menghasilkan produk yang lebih efisien dan lebih berkualitas. “Kita harus membenahi sisi industri. Kita perlu strategi baru untuk bisa memperkuat produk lokal agar bisa memiliki daya tahan dan daya saing secara global,” ujarnya.

Bersamaan dengan peningkatan kualitas produk buatan Indonesia, lanjut Eva,

Eva juga menyebutkan beberapa langkah yang bisa meningkatkan kesadaran cinta produk buatan Indonesia. Pertama, pemerintah memulai dengan penggunaan produk dalam negeri dalam berbagai proyek. Misalnya, dalam kebijakan pengadaan barang melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) lebih memilih barang atau produk dalam negeri.

Kedua, pemerintah terus melakukan pembinaan kepada produsen atau industri agar membuat produk lokal yang berkualitas. Upaya ini dilakukan secara terus-menerus dan sistematis agar produk lokal Indonesia juga menjadi pemain global. “Saya yakin or-



Eva Nursanty

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

pemerintah juga perlu menanamkan kesadaran baru kepada masyarakat agar mencintai produk dalam negeri. “Ini perlu komitmen bersama dan semua harus mengambil peran masing-masing,” katanya.

Dia memberi contoh kampanye untuk mencintai produk dalam negeri harus dilakukan secara bersama-sama alias gotong royong. Kampanye cinta produk Indonesia harus melibatkan kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. “Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, KADIN, serta asosiasi bisnis dan industri terlibat di dalamnya dalam kampanye peningkatan kualitas dan cinta produk buatan Indonesia,” tandasnya.

ang Indonesia itu mudah sekali jatuh cinta kepada produk yang sudah mempunyai brand dan diterima secara internasional. Produk seperti ini sekaligus mengampanyekan bahwa produk buatan Indonesia memiliki kualitas dan terbaik. Ini akan menumbuhkan kebanggaan untuk menggunakan produk Indonesia,” tegasnya.

Langkah berikutnya, pemerintah harus memiliki regulasi dan mengawasi secara ketat terhadap produk dari luar yang masuk secara ilegal ke Indonesia. “Kita perlu juga melakukan pengawasan *marketplace* yang tidak mendukung produk lokal Indonesia atau tidak adil serta merugikan Indonesia,” pungkasnya. □

DER/EFP/BSC

## Aku Cinta Produk Indonesia

# Slogan Sudah Berlangsung dari Masa Ke Masa

Kampanye dan slogan untuk mengajak masyarakat membeli dan mencintai produksi dalam negeri sudah berlangsung sejak pemerintahan Soekarno. Namun, hasilnya masih jauh dari harapan.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

*Aku cinta....Anda cinta.....semua cinta.....buatan Indonesia .....hooooo*

MUNGKIN di antara pembaca masih ada yang ingat potongan lirik lagu Bimbo tentang mencintai produk buatan Indonesia. Lagu ini sering diputar di TVRI era 1980-an. Lagu ini menjadi *jingle* pembuka acara “Apresiasi Film Indonesia,” salah satu program unggulan di TV milik pemerintah itu. Lagu Bimbo bergenre keroncong ini untuk mengajak pemirsa TVRI agar mencintai produk-produk buatan sendiri, termasuk film Indonesia. Lagu itu diciptakan sebagai salah satu kampanye pemerintah Orde Baru agar masyarakat membeli dan mencintai produk buatan Indonesia.

Mungkin di antara pembaca juga tidak lupa iklan “Maspion”. “Cintailah produk-produk Indonesia!,” ucap Alim Markus didampingi penyanyi legendaris Titiok Puspa. Orang yang mengucapkan slogan itu adalah pemilik Maspion sendiri, Alim Markus. Maspion adalah salah satu merek ternama dari sebuah perusahaan yang memproduksi peralatan rumah tangga. Perusahaan ini berawal dari usaha kecil yang menjual lampu teplok dan perlengkapan rumah tangga pada tahun 1967. Seiring berjalannya waktu,

usaha ini berkembang dan berubah menjadi perusahaan besar bernama Maspion.

Dua contoh itu menunjukkan bahwa kampanye “cinta produk Indonesia” sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Bahkan, kampanye untuk mencintai produk-produk dalam negeri sudah dilakukan sejak pemerintahan Soekarno. Pada masa pemerintahan Soekarno, cinta produk dalam negeri dilakukan lewat konsep *Berdikari* atau berdiri di atas kaki sendiri. Bung Karno meminta rakyat Indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri dan tidak bergantung pada pertolongan dan bantuan asing. “*Berdikari*, (artinya) percaya kepada kekuatan sendiri, tidak mengemis-ngemis,” kata Bung Karno, seperti tertulis dalam buku “Kesaksian tentang Bung Karno, 1945 – 1967”, yang ditulis Mangil Matowidjojo (tahun 1999).

Bung Karno tidak ingin Indonesia bergantung kepada asing. Dalam pidato acara ramah-tamah dengan wartawan di Istana Bogor pada 10 November 1965, Soekarno menyebutkan: “Jangan kita menghabiskan deviezen (devisa) untuk membeli pupuk dari luar. Padahal pupuk tweede klas (kelas dua) bisa kita bikin sendiri. Pupuk eerste klas (kelas satu) sudah kita mulai bikin.”

la pun memberi contoh, Indonesia bisa

membuat jus buah sendiri tanpa harus mengimpor dari luar. “Masak Indonesia negeri mangga, kepingin minum manga juice beli dari Mesir! Tidak kena itu, saudara-saudara,” sindirnya.

Soekarno juga menyebutkan produksi barang-barang berbahan karet. Ia mengatakan, Indonesia adalah negara penghasil karet. “Lha kok barang-barang karet yang kecil-kecil itu kita harus beli dari luar negeri!”

Di sisi lain, setelah kemerdekaan, Indonesia sudah menjadi pasar produk dari luar negeri. Pada 1950-an, barang-barang impor itu masuk ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan perkantoran. Firman Lubis dalam bukunya “Jakarta 1950 – 1970” menulis pada 1950-an lemari es sudah dikenal di Jakarta. Mesin pendingin itu produksi General Electric dengan merek Frigidaire dari Amerika Serikat.

Begitu pula radio berbentuk kotak berukuran besar yang menggunakan tenaga listrik sudah diimpor dari Belanda, Jerman, dan Amerika Serikat. Jalan-jalan di Jakarta pada era 1950-an sudah hiril mudik kendaraan buatan Amerika Serikat dan Inggris. Paling banyak buatan Amerika seperti Ford, Chevrolet, Dodge, Chrysler, Studebaker, Oldsmobile, dan Buick. Mobil buatan Inggris



antara lain merek Austin, Morris, dan Land Rover. Ada pula buatan Italia dengan merek Fiat, serta Jerman dengan merek Volkswagen dan Opel. Mobil buatan Jepang dan produk lainnya mulai merajalela pada masa Orde Baru akhir 1960-an.

Pada masa pemerintahan Soeharto, kampanye cinta produk dalam negeri dilakukan lebih intens. Soeharto sudah melihat bahwa Indonesia akan dibanjiri produk-produk dari luar. Di depan peserta Musyawarah Nasional Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRRSSNI) di Tapos, Bogor, Jawa Barat pada 10 Desember 1995, Soeharto sudah “meramal” Indonesia akan dibanjiri produk dari luar karena adanya perdagangan bebas tahun 2000.

Soeharto mengatakan, ketika perdagangan bebas diberlakukan, produk dari luar akan membanjiri Indonesia. Jika masyarakat lebih memilih produk dari luar maka produk buatan bangsa sendiri akan ditinggalkan. Akibatnya, industri di Indonesia bisa gulung tikar. Pada gilirannya pengangguran pun akan membesar. “Akhirnya yang ada adalah kemelaratan. Ini bukan cita-cita kita,” kata Soeharto dalam berita di Suara Karya, seperti dimuat dalam buku “Presiden RI ke-2 Jenderal Besar HM. Soeharto dalam Berita” (2008).

Karena itu Soeharto mendorong masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk buatan sendiri. Ini merupakan sikap mental nasionalis untuk menghadapi perdagangan bebas. Ia juga berpesan agar rakyat menahan diri untuk membeli produk dari luar. “Kita ingin menjadi bangsa yang mandiri,” ujarnya.

Sebelumnya, untuk mendorong kesadaran rakyat agar cinta produk Indonesia, Soeharto sampai membentuk Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabinet Pembangunan IV (1983-1988). Posisi itu ditempati Ginandjar Kartasasmita.

Pada masa Orde Baru, kampanye cinta produk Indonesia pun menggema melalui lagu “Aku Cinta Buatan Indonesia” yang dinyanyikan grup musik Bimbo. Lagu ini diputar di RRI dan TVRI pada 1980-an. Seperti ditulis di atas, reff lagu itu sederhana, namun



menancap dalam benak orang-orang yang hidup di era 1980-an: “Aku cinta, Anda cinta, semua cinta, buatan Indonesia...”



Kampanye dan ajakan untuk mencintai produk dalam negeri juga dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY ajakan cinta produk dalam negeri ini melalui slogan “100% Cinta Indonesia”. Kampanye untuk mempromosikan produk Indonesia itu diluncurkan pada 22 April 2009 dalam pembukaan pameran kerajinan Inacraft di Jakarta Convention Center. Pemrakarsanya adalah Kemendag dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Saat itu, SBY mengatakan, kampanye “100% Cinta Indonesia” memiliki tujuan meningkatkan apresiasi dan kebanggaan menggunakan produk buatan Indonesia. Ia mendorong, semua perusahaan, produk, dan merek dalam negeri mencantumkan logo “100% Cinta Indonesia” pada kemasan, iklan, dan materi promosi. “Kalau kita mengatakan aku cinta produk Indonesia dan beli produk Indonesia, itu baru nilainya seratus,” kata SBY dalam sambutan pembukaan Inacraft.

Sementara di era Presiden Jokowi, kampanye ini tak kalah semarak. Misalnya, pada April 2017, saat meresmikan perluasan pabrik PT Sri Rejeki Isman Tbk di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Jokowi menginginkan masyarakat bangga dan cinta terhadap produk dalam negeri. Ia mengingatkan agar masyarakat menghentikan kebanggaan membeli barang impor.

Upaya untuk mencintai produk dalam negeri, Jokowi meneken Keppres Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (Tim Nasional P3DN) pada 2018. Tim ini diketuai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan.

Dikutip dari situs web *setkab.go.id*, 20 September 2018, tugas tim ini di antaranya, memantau penggunaan produksi dalam negeri sejak tahap perencanaan hingga badan usaha swasta, koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas tim P3DN dari lembaga negara hingga badan usaha swasta, dan melakukan promosi dan sosialisasi penggunaan produk dalam negeri. □

BSC (dari berbagai sumber)



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**Dr. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA.** Wakil Ketua MPR RI

## Produk Dalam Negeri Tak Kalah Dibanding Produk Asing

**P**RESIDEN Joko Widodo mengeluarkan seruan kepada masyarakat Indonesia untuk lebih mencintai produk dalam negeri dan membenci produk asing. Seruan itu disampaikan dua hari berturut-turut. Pertama, ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional Perdagangan pada Kamis, 4 Maret 2021. Dalam kesempatan itu Presiden meminta Kementerian Perdagangan menyiapkan kebijakan dan strategi untuk mengembangkan pasar bagi produk dalam negeri. Salah satu strategi adalah dengan mendorong masyarakat agar lebih mencintai produk-produk dalam negeri sekaligus membenci produk-produk asing.

Kedua, Presiden mengulang kembali seruannya saat memberikan sambutan pada Rapat Kerja Nasional XVII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia pada Jumat, 5 Maret 2021. Kata Presiden, jika lebih banyak masyarakat yang memilih produk dalam negeri ketimbang produk asing, maka kinerja industri yang sempat lesu

akibat pandemi Covid-19 — yang sudah berlangsung setahun lebih— bisa kembali terdongkrak dan bergerak kembali.

Namun, seruan Presiden justru menuai kontroversi di masyarakat. Pasalnya, seruan itu sangat kontras dengan sikap dan kebijakan pemerintah selama ini. Sebut saja, pemerintah telah menandatangani perjanjian dagang dalam rangka Free Trade Agreement, dan pemerintah masih melakukan berbagai impor, termasuk impor kebutuhan pokok seperti beras dan garam.

Untuk membahas seruan Presiden ini, Majelis mewawancarai Wakil Ketua MPR Dr. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA. Berikut petikan wawancara dengan Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat yang juga pernah menjadi Menteri Koperasi dan UMKM pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Petikannya:

**Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan berupa seruan untuk**

**mencintai produk-produk dalam negeri dan membenci produk asing. Apa tanggapan Bapak terhadap seruan presiden ini?**

Pertama, saya tentu mendukung seruan-seruan untuk lebih mencintai produk Indonesia ketimbang produk luar. Lagi pula produk Indonesia sebenarnya tidak kalah dengan produk dari luar. Produk Indonesia sama bagusnya dengan produk dari luar. Bahkan ada kalanya sebagian produk buatan dalam negeri malah lebih berkualitas dan diakui secara global.

Kedua, ketika kita mencintai produk sendiri dengan membeli dan mengonsumsi serta menggunakan produk bangsa sendiri maka kita berperan aktif dalam menggerakkan perekonomian nasional. Apalagi di masa pandemi Covid-19 ini ketika banyak dari rakyat kita yang kehilangan pekerjaan sehingga banting stir melakukan berbagai usaha untuk bertahan hidup. Maka dengan cinta pada produk bangsa sendiri dengan



cara membeli produk mereka maka kita saling membantu antarsesama. Itu sangat bagus. Jika perlu langkah itu dilanjutkan terus meski pandemi Covid-19 sudah usai.

**Bagaimana Bapak melihat Indonesia sekarang ini dibanjiri produk-produk dari luar negeri, mulai dari produk makanan hingga sandang (tekstil), elektronik, otomotif dan lainnya ?**

Menurut saya wajar dan lumrah jika Indonesia dibanjiri produk-produk dari luar. Sebab, Indonesia adalah negara dengan pangsa pasar terbesar keempat di dunia. Jumlah penduduk Indonesia sangat besar sehingga menjadi pasar dan dibanjiri produk-

luar negeri.

**Apakah membanjirnya produk dari luar sudah menjadi konsekuensi perdagangan terbuka (seperti AFTA). Karena itu seruan presiden mendapat tanggapan dan pertanyaan dari negara-negara lain?**

Tidak bisa dipungkiri, Indonesia memang berada dalam pasar bebas. Kita terikat dengan aturan dan regulasi perdagangan internasional, karena kita adalah warga dunia. Kalau kita sampai melakukan penolakan terhadap produk dari luar maka kita melanggar perjanjian dagang internasional. Pemerintah memang sudah seharusnya

**garam, gula, bahan obat-obatan, dan lain-lain). Apa komentar Bapak?**

Ya, ke depan, sekali lagi kita harus mampu memproduksi barang kebutuhan kita sendiri. Selayaknya pula pemerintah memberikan keberpihakan kepada produk bangsa sendiri. Yang terpenting, bila kita sudah mengampanyekan cinta produk lokal maka kita harus konsisten mendorong penggunaan produk dalam negeri.

**Kampanye cinta produk dalam negeri sebenarnya bukan kali ini saja, karena sudah pernah dilakukan pada waktu lalu, dan kampanye ini kurang berhasil. Bagaimana agar**



produk dari luar negeri. Tinggal bagaimana kita menyikapi situasi seperti itu.

Rakyat dan pemerintah seharusnya menyadari potensi besar itu. Coba bayangkan. Bila rakyat Indonesia yang jumlahnya sangat besar itu membeli dan memakai produk dalam negeri maka akan berdampak sangat besar. Tentu ini juga sangat bagus. Jadi, sekali lagi, intinya kembali kepada diri kita masing-masing. Memang, lebih baik kita menggunakan produk dalam negeri.

Jika produk yang kita miliki sejenis dengan produk dari luar maka kita hendaknya memilih produk bangsa sendiri. Lain halnya jika memang produk dari luar itu tidak ada di Indonesia maka kita boleh menggunakan produk dari luar, karena memang tidak ada pilihan. Namun, kita juga harus pintar. Jika produk dari luar itu tidak ada di Indonesia, kita bisa membuat di dalam negeri atau melakukan kerjasama dengan produsen dari

memberikan proteksi dan keberpihakan kepada produk-produk dalam negeri. Keberpihakan ini misalnya, dengan memfasilitasi atau mempermudah akses pembiayaan, fasilitas pemasaran, juga kebijakan lain yang mempermudah pelaku usaha dalam negeri.

**Apakah seruan Presiden itu disebabkan produk dalam negeri kalah bersaing dengan produk dari luar?**

Saya rasa seruan Presiden itu sebagai bentuk keberpihakan kepada produk dalam negeri. Sebenarnya produk dalam negeri tidak selalu kalah dari produk luar. Bahkan ada produk dalam negeri yang lebih bagus dari produk asing. Ini harus menjadi motivasi agar kita menghasilkan produk yang lebih bagus lagi dibanding produk asing.

**Seruan Presiden itu juga kontradiktif. Sebab Indonesia melakukan banyak impor, seperti impor pangan (beras,**

**kampanye seperti ini efektif dan bisa berhasil?**

Jika ingin berhasil, memang kampanye cinta produk dalam negeri harus mendapat dukungan dari seluruh elemen bangsa. Semua pihak harus bersatu disertai dengan sosialisasi dan edukasi yang intens, terutama kepada generasi muda bangsa.

**Menurut Bapak, bagaimana agar kita bisa mencintai produk lokal?**

Untuk mencintai produk dalam negeri memang harus dimulai dari diri kita masing-masing. Jadi, kita harus memiliki kesadaran bahwa dengan membeli, mengonsumsi, dan menggunakan produk dalam negeri maka akan berdampak luas bagi perekonomian kita, terutama membantu ekonomi rakyat. Kita bisa membantu antarsesama anak bangsa bila kita memakai produk dalam negeri. Karena itu, kita juga mampu bersaing dengan produk dari luar. □

**Press Gathering Anyer 2021**

Siti Fauziah  
**Kolaborasi Pers dan MPR Jendela**  
 bagi Masyarakat



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**B**IRO Humas dan Sistem Informasi, Setjen MPR, bekerjasama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen, selama tiga hari (26-28 Maret 2021), menyelenggarakan kegiatan Press Gathering dengan mengambil tempat di Hotel Mambruk, Anyer, Banten. Press Gathering ini merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya, dan ini adalah press gathering pertama untuk tahun 2021

Press Gathering ini diikuti oleh 90 wartawan parlemen mewakili berbagai media cetak, televisi, radio, dan online. “Karena masih dalam suasana pandemi maka sebelum keberangkatan semua terhadap para wartawan yang menjadi peserta press gathering dilakukan swab Antigen, dan hasilnya semua negatif,” ujar Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi, Siti Fauziah, SE., MM., dalam laporannya selaku panitia penyelenggara Press Gathering tersebut.

Menurut Siti Fauziah, kegiatan press gath-



ering ini menjadi penting, karena media merupakan salah satu pilar demokrasi, yang tentunya akan menjadi mitra strategis untuk terus menyampaikan pesan dari MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat.

“Kita berharap, melalui press gathering ini terciptanya kolaborasi yang baik antara MPR dan para wartawan di lingkungan MPR, DPR dan DPD, dalam mengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat. Dan, tentunya, melalui kolaborasi ini diharapkan





dapat menjadi jendela bagi masyarakat untuk mengetahui hal-hal baik yang terjadi di parlemen,” ujar Siti Fauziah.

Wakil Ketua MPR, Dr. Ahmad Basarah, S.H., M.H., membuka secara resmi press gathering dalam rangkaian acara di Ballroom Hotel Mambruk. Hadir dalam kesempatan itu Wakil Ketua MPR, Dr. Jazilul Fawaid, SQ., MA. ; Wakil Ketua MPR, Dr. Hidayat Nur Wahid, MA (hadir secara virtual); Ketua Fraksi Nasdem, Taufik Basari, SH., M.Hum.; Ketua Fraksi Demokrat, Benny K. Harman, SH., MH.; Sekretaris Fraksi PKB, Neng Eem Marhamah.

Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi, Setjen MPR, Siti Fauziah, SE., MM., dan Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Setjen MPR, Budi Muliawan, SH., MH., dan jajarannya hadir sebagai penyelenggara press gathering. Serta hadir sebagai undangan sebagai undangan adalah Drs. Muhammad Djazuli, M.Si., (Plt. Kepala Biro Parlemen, Setjen DPR RI), dan



Nana Sutisna, S.IP., (Kepala Biro Protokol Humas dan Media, Setjen DPD RI).

Dan, kegiatan press gathering ini diisi dengan kegiatan diskusi dengan tema: “Urgensi Dibentuknya Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN). Tampil sebagai narasumber adalah Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid,

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (virtual), Ketua Fraksi Nasdem Taufik Basari, dan Ketua Fraksi Demokrat Benny K. Harman. Diskusi ini dipandu oleh Friederich Batari, wartawan anggota Koordinatoriat Wartawan Parlemen. □

SCH/JAZ



**Wakil Ketua MPR Dr. Ahmad Basarah, SH., MH.**

## “Pers Penyambung Lidah Parlemen”

**W**AKIL Ketua MPR Ahmad Basarah menyatakan, acara press gathering termasuk primadona antara Biro Humas dan Sistem Informasi MPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan MPR/DPR/DPD RI. Menjadi kegiatan primadona, karena tanpa hubungan baik antara Biro Humas dan Sistem Informasi MPR dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen maka tak mungkin 297 juta rakyat Indonesia akan mengerti dan paham apa yang dikerjakan MPR, DPR, dan DPD.

“Jadi, kalau dulu pernah ada buku sangat populer berjudul: Bung Karno adalah Penyambung Lidah Rakyat, maka pers adalah Penyambung Lidah Parlemen Indonesia,” ujar Basarah dalam sambutannya ketika membuka acara Press Gathering Pimpinan MPR dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Ballroom Hotel Mambruk Anyer, Banten, Sabtu (27/3/2021).

Pada intinya, menurut Wakil Ketua MPR Koordinator Sosialisasi Empat Pilar MPR RI ini, MPR tidak mungkin dapat menyebarkan informasi-informasi yang konstruktif kepada masyarakat tanpa dibantu oleh teman-teman pers.

### Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Bagian lain, dalam sambutannya, Ahmad Basarah, SH., MH., juga menyinggung masalah berkembangnya isu tentang perpanjangan masa jabatan Presiden, dari dua periode menjadi tiga periode. “Seperti hujan di tengah hari, pertengahan Maret lalu muncul pernyataan yang menyebutkan bahwa MPR punya agenda untuk melakukan perubahan Pasal 7 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agenda untuk memperpanjang masa jabatan Presiden dari dua periode menjadi tiga periode,” ungkap Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Menanggapi isu itu, Ahmad Basarah menegaskan, tidak ada agenda MPR untuk mengubah Pasal 7 UUD NRI Tahun 1949 tentang masa jabatan Presiden. “Jangankan mengusulkan untuk diubah, dalam dokumen resmi MPR tidak ada satu pun kajian menyangkut perubahan Pasal 7 UUD NRI



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Tahun 1945 tentang masa jabatan Presiden,” jelas Ahmad Basarah.

Basarah menyampaikan rasa syukurnya karena Pak Hidayat Nur Wahid (PKS) dan Syarif Hasan (Demokrat) — yang keduanya Wakil Ketua MPR dari fraksi di luar pemerintahan — telah memberikan konfirmasi bahwa tidak ada agenda MPR untuk mengubah Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945, atau mengubah masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.

Bahkan, lanjut Basarah, Fraksi PDI Perjuangan atas arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan tegas dan tidak abu-abu menyatakan, masa jabatan Presiden cukup dua periode saja. “Jadi, tidak ada satu pun materi pembahasan, apalagi

bersifat rekomendasi, menyinggung tentang perubahan Pasal 7 UUD tentang masa jabatan Presiden,” katanya.

Ahmad Basarah menyebutkan, yang menjadi kesepakatan kita semua saat ini, yang dibutuhkan bangsa Indonesia bukanlah tentang masa jabatan presiden, melainkan bagaimana caranya agar setiap ganti presiden tidak ganti visi, ganti misi, dan ganti program. Juga, tidak setiap ganti gubernur, ganti bupati, ganti walikota, lalu ganti visi, ganti misi, dan ganti program juga,” ujarnya. Untuk itu, seluruh fraksi di MPR telah sepakat bahwa Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) dibutuhkan sebagai panduan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. □

SCH/JAZ





## Diskusi Press Gathering

# Gus Jazil: Soal Amandemen UUD Masih Menjadi Perdebatan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR Dr. Jazilul Fawaid, SQ, MA mengungkapkan bahwa sampai hari ini MPR belum memutuskan apakah payung hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) akan ditempatkan dalam UUD atau Ketetapan MPR, dan atau pun dalam bentuk undang-undang. Jika masuk dalam UUD atau Ketetapan MPR maka perlu dilakukan amandemen UUD. Saat ini, soal amandemen atau tidak melakukan amandemen UUD masih menjadi perdebatan.

“Sampai sejauh ini Badan Pengkajian MPR dan fraksi-fraksi di MPR masih membuka diri untuk amandemen UUD, khususnya terkait dengan PPHN,” kata Jazilul Fawaid dalam diskusi bertema “Uregensi Dibentukan Pokok-Pokok Haluan Negara” di Anyer, Banten, Sabtu (27/3/2021). Diskusi sebagai rangkaian acara Press Gathering Pimpinan MPR dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen juga menghadirkan pembicara Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Ketua

Fraksi Partai Nasdem MPR Taufik Basari, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman.

Gus Jazil, sapaan akrab Jazilul Fawaid, mengungkapkan bahwa reformasi 1998 menyisakan satu hal, yaitu memori tentang

GBHN. “Padahal pada kenyataannya GBHN dan PPHN tidak terlalu berbeda. Yang berbeda adalah MPR-nya. Dulu, MPR memiliki kewenangan menetapkan GBHN dan Presiden bertanggungjawab kepada MPR. Sekarang PPHN diperlukan karena pem-





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

bangunan ini maju mundur, karena itu harus ada kerangka pembangunannya,” katanya.

Sebenarnya, lanjut Gus Jazil, sudah ada pengganti GBHN, yaitu UU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Namun, rencana pembangunan dalam bentuk UU dirasa belum cukup, karena UU mudah direvisi. Karena itu, ada keinginan memasukkan PPHN dalam UUD.

“MPR periode lalu ‘gagal’ melakukan amandemen. PPHN tidak tembus sehingga

direkomendasikan kepada MPR periode sekarang. Tapi, secara pribadi, saya melihat tidak cukup tenaga untuk mendesak perlu dan pentingnya PPHN. Sebab wacana PPHN hanya berputar di sekitar fraksi-fraksi. Belum ada tenaga atau dorongan kuat dari masyarakat riil di bawah bahwa PPHN ini penting dan segera,” paparnya.

Di tingkat fraksi-fraksi dan kelompok di MPR, Gus Jazil menambahkan, terkait dengan PPHN ini justru terjadi perdebatan apakah perlu amandemen UUD atau cukup dengan

UU saja. Masih terjadi pro dan kontra. “Pengambilan keputusan terkait apakah perlu amandemen UUD atau cukup dengan UU masih menjadi perdebatan. Ditambah lagi kehendak rakyat dari bawah tidak muncul. Pasalnya, PPHN ini ada pada wilayah ide, bukan pada tataran praksis sehingga PPHN sulit dimunculkan menjadi kebutuhan yang mendesak, perlu dan segera,” imbuhnya.

Apalagi persoalan amandemen UUD dikhawatirkan membuka “kotak pandora” yang bisa memasukkan isu-isu lain di luar PPHN. Misalnya, muncul isu tentang masa jabatan presiden tiga periode, perubahan kewenangan DPD, dan lainnya. Karena itu, untuk menghentikan polemik di seputar amandemen UUD, Gus Jazil menyebutkan, perlu adanya kesepakatan fraksi-fraksi dan kelompok DPD di MPR.

“Kalau mau menghentikan spekulasi terkait amandemen UUD maka semua fraksi di MPR bersepakat saja bahwa tahun ini tidak ada amandemen UUD. Maka semua pembicaraan terkait amandemen UUD dan isu yang menyertainya, seperti masa jabatan presiden tiga periode dan lainnya, akan selesai dengan sendirinya,” ujarnya. □

BSC





## Diskusi Press Gathering

# HNW: Payung Hukum PPHN Masih Menjadi Perdebatan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**D**ISKURSUS mengenai urgensi Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) sudah berlangsung tiga periode kepemimpinan MPR, namun belum ada realisasinya. Perdebatannya masih seputar payung hukum PPHN, apakah dengan Ketetapan MPR yang berarti harus melalui amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 atau cukup dengan Undang-undang.

Berikut sekilas perjalanan rekomendasi tentang Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN). “MPR periode 2014-2019 hanya berkuat pada pengkajian tentang perlu tidaknya PPHN dan payung hukum yang digunakan. Sehingga MPR periode 2014 - 2019 kembali membuat ketetapan berisi rekomendasi tentang PPHN untuk ditindaklanjuti oleh MPR periode sekarang (2019-2024) atau MPR di bawah pimpinan Bambang Soesatyo,” papar Hidayat Nur Wahid yang berbicara secara virtual dalam diskusi Press Gathering Pimpinan MPR dengan Koordinator Wartawan Parlemen (KWP) di Ballroom Hotel Mambruk, Anyer, Banten, Sabtu sore (27/3/2021).

Dengan mengambil tema: ‘Urgensi Dibentuknya Pokok Pokok Haluan Negara’, diskusi yang 90 wartawan anggota Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) ini

menampilkan empat narasumber. Selain Hidayat Nur Wahid, narasumber lainnya adalah Wakil Ketua MPR Dr. Jazilul Fawaid, Ketua Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari, dan Ketua Fraksi Demokrat Benny K. Harman. Diskusi dipandu oleh Friederich Batari, wartawan anggota KWP.

HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid, termasuk salah seorang pimpinan yang terlibat dalam ketiga periode kepemimpinan MPR, menceritakan perjalanan rekomendasi MPR tentang PPHN. Di awal MPR periode 2009-2014 di bawah kepemimpinan Taufiq Kiemas (alm) yang kemudian satu tahun terakhir dilanjutkan oleh Sidarto Danusubroto. MPR periode inilah yang membuat ketetapan MPR berisi rekomendasi tentang PPHN. Rekomendasi ini diserahkan kepada MPR periode 2014-2019 di bawah kepemimpinan Dr (HC) Zulkifli Hasan untuk ditindaklanjuti.

Namun, kata Hidayat, MPR periode 2014-2019 hanya berkuat pada pengkajian tentang payung yang digunakan untuk PPHN. “Soalnya, MPR yang sekarang tidak seperti MPR sebelum amandemen UUD 1945 yang memang punya kewenangan membuat GBHN, yang dalam rekomendasi disebut PPHN. Sedangkan MPR sekarang bukan lagi lembaga tertinggi negara, tapi hanya lembaga

negara yang setingkat dengan lembaga negara lainnya, dan tidak lagi punya kewenangan membuat GBHN,” jelasnya.

Namun, sampai MPR periode ini (2014-2019) berakhir PPHN seperti yang direkomendasikan belum juga terealisasi. Sehingga MPR periode ini kembali membuat ketetapan berisi rekomendasi tentang PPHN untuk ditindaklanjuti oleh MPR periode sekarang (2019-2024)—MPR di bawah kepemimpinan Bambang Soesatyo. Dan, untuk menindaklanjuti rekomendasi itu, MPR periode 2019-2024 sejak awal masa baktinya langsung gencar melakukan serap aspirasi ke berbagai kalangan, dan secara masif melakukan kajian tentang urgensi dari PPHN ini.

Hasilnya, seperti dikemukakan oleh Ketua Fraksi Demokrat di MPR yang juga Pimpinan Badan Pengkajian MPR, Dr. Benny K. Harman, hampir semua fraksi di MPR sependapat bahwa PPHN penting sebagai panduan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Hanya saja, yang masih menjadi perdebatan adalah soal payung hukumnya. Pilihannya, apakah melalui Ketetapan MPR yang berarti harus ada amandemen UUD NRI Tahun 1945, atau payung hukumnya cukup dengan undang-undang.

Kedua pilihan ini, menurut Benny K. Harman, masing-masing punya kelemahan. Kalau Undang-undang kelemahannya bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi, apabila dianggap bertentangan dengan konstitusi. Begitu pula TAP MPR, kelemahannya ada pada kedudukan TAP MPR terhadap UUD dan UU. Menurut Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan TAP MPR berada di bawah UUD dan di atas UU. “Ini tidak dikenal dalam UUD NRI Tahun 1945, kecuali TAP MPR yang dikeluarkan pada tahun 1999 hingga 2002 yang masih eksis. Apalagi, bukan tidak mungkin, TAP MPR ini juga bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk judicial review,” katanya. □

SCH/JAZ

**HNW: UUD, Sebelum dan Sesudah Amandemen, Kondisinya Berbeda**

Wakil Ketua MPR RI Dr. Hidayat Nur Wahid, MA., mengungkap bahwa Undang Undang Dasar hasil amandemen sekali dalam empat tahap pada tahun 1999 hingga 2002 menutup ruang bagi mereka yang memiliki agenda lain yang disisipkan pada saat terjadinya amandemen UUD. "UUD setelah amandemen tidak sama dengan UUD sebelum amandemen," ujar HNW.

Kalau UUD sebelum amandemen memang terbuka peluang untuk menyisip agenda lain, selain agenda yang sudah dipersiapkan untuk diamandemen. Sedangkan UUD setelah amandemen yang kini disebut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), kemungkinan untuk bermain dengan agenda

amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945.

Ketua MPR RI periode 2004-2009 menyampaikan hal itu secara virtual disimak oleh 90 wartawan peserta diskusi press gathering Pimpinan MPR bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen, Sabtu sore (27/3/2021), di Hotel Mambruk, Anyer, Banten.

Lebih lanjut HNW menjelaskan tentang perbedaan antara UUD sebelum amandemen dan UUD setelah amandemen. Menurut HNW, ada dua kondisi yang sama sekali berbeda. Dulunya, pada UUD sebelum perubahan, di Pasal 37 ayat 1 dan ayat 2, tidak disebutkan secara rigid, secara rinci, atau secara tegas mengenai syarat-syarat untuk melakukan perubahan UUD.

HNW menunjuk contoh kasus di era reformasi. Kala itu, ada tuntutan untuk mengubah UUD terkait pembatasan masa

disebutkan bahwa setiap usulan perubahan harus diajukan secara tertulis, dengan menyebutkan pasal mana yang mau diubah, beserta alasan perubahan, dan bagaimana bunyi usulan baru. "Jadi, setiap usulan perubahan tidak bisa tiba-tiba muncul di tengah jalan," tegas HNW.

Politisi PKS ini menceritakan pengalamannya ketika menjadi Ketua MPR RI periode 2004-2009. Saat itu ada usulan untuk perubahan UUD terkait dengan penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Semula sudah didukung oleh seluruh anggota DPD ditambah dari anggota Partai Demokrat, dan anggota MPR lainnya. Sehingga jumlah pengusulnya melampaui persyaratan minimal ditentukan UUD, yakni sepertiga dari jumlah anggota MPR. Tapi, dalam perjalanannya, anggota MPR dari Partai Demokrat dan anggota MPR lainnya menarik diri. Karena sudah tidak memenuhi persyaratan lagi maka perubahan UUD terkait penguatan DPD tak bisa dilanjutkan.

Jadi, kalau nanti terjadi perubahan UUD terkait agenda menghadirkan kembali PPHN, menurut HNW, kecil kemungkinan bisa didompleng dengan agenda perubahan Pasal 7 UUD untuk memperpanjang masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode. Apalagi, Wakil Ketua MPR Dr. Ahmad Basarah menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati bahwa untuk masa jabatan presiden, PDI Perjuangan tegas dan tidak abu-abu.

Untuk masa jabatan presiden, PDI Perjuangan tegas menyatakan, cukup dua periode, dan tidak ada agenda pembahasan atau pemikiran untuk memperpanjang masa jabatan presiden hingga menjadi tiga kali atau tiga periode. "Kalau PDI Perjuangan berpendapat demikian, saya rasa masalahnya sudah selesai," ujar HNW.

Untuk itu, HNW mengingatkan, mereka yang mewacanakan pembahasan untuk amandemen UUD terkait PPHN hanya merupakan akal-akalan sebagai pintu masuk untuk bisa mendapat kesempatan atau peluang untuk terjadinya perubahan Pasal 7 UUD, itu pemikiran zaman sebelum UUD diamandemen. "Setelah UUD diamandemen, akal-akalan seperti tidak memungkinkan terjadi kembali. Tidak bisa lagi, karena UUD-nya sudah berubah," tegas HNW. □

SCH



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

lain sangat sulit. Karena persyaratan untuk melakukan amandemen dalam UUD setelah amandemen sangat rigid dan rinci.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS ini mengemukakan hal itu terkait dengan isu yang menyebutkan bahwa MPR periode sekarang ini memiliki agenda untuk mengubah Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 tentang masa jabatan Presiden dari dua periode menjadi tiga periode.

HNW menjelaskan, MPR memang sedang mewacanakan untuk merealisasikan rekomendasi terkait dengan menghadirkan kembali haluan negara, yang di dalam rekomendasi disebut Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN). Untuk menghadirkan PPHN ini, salah satu alternatifnya adalah melakukan

jabatan presiden. Karena, saat itu, tidak ada persyaratan secara rigid dan tegas untuk perubahan UUD sehingga menjadi pintu masuk bagi ide lain. Karena tak bisa dicegah maka terjadilah perubahan besar-besaran terhadap UUD. UUD yang semula terdiri dari 16 Bab menjadi 21 Bab, dari 37 Pasal menjadi 73 Pasal, dari 49 ayat menjadi 170 ayat. "Ini bisa terjadi karena di dalam UUD tidak aturan secara rigid dan tegas," katanya.

Beda dengan UUD NRI Tahun 1945 atau UUD setelah amandemen. Pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, ayat 1 dan ayat 2, mengatur sangat jelas tentang usulan untuk melakukan amandemen. Jumlah minimal pengusulnya, sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Dan, di pasal itu juga jelas



## Diskusi Rasisme di Amerika Serikat

# Pemerintah Harus Memberi Perlindungan Terhadap WNI di Luar Negeri

Dalam alinea keempat konstitusi sudah ditegaskan bahwa pemerintah harus melindungi seluruh bangsa dan negara Republik Indonesia. Karena itu, di manapun WNI berada harus mendapat perlindungan dari pemerintah secara maksimal.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR Dr. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA., meminta kepada pemerintah untuk memberi perhatian dan perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang di luar negeri secara maksimal. Perlindungan kepada WNI di luar negeri bukan hanya pada para TKI, tetapi juga perlindungan terhadap WNI yang mendapat perlakuan rasisme di luar negeri.

“Dalam alinea keempat konstitusi kita sudah ditegaskan bahwa pemerintah harus melindungi seluruh bangsa dan negara Republik Indonesia. Karena itu, di manapun WNI berada harus mendapat perlindungan dari pemerintah secara maksimal,” kata Sjarief Hasan dalam Diskusi Empat Pilar MPR yang mengangkat tema “Sentimen Rasisme di Amerika Serikat. Bagaimana Nasib Warga Negara Indonesia di Amerika Serikat” di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Lobi Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (29/3/2021). Diskusi ini juga menghadirkan narasumber anggota MPR dari

Fraksi Partai Golkar, Christina Aryani, SE, SH, MH.

Pekan lalu, dua WNI di Philadelphia, Amerika Serikat, menjadi korban aksi penyerangan oleh lima orang tak dikenal. Aksi ini dipicu motif rasisme anti-Asia di negara adidaya itu. Perlakuan rasis terhadap warga Asia di AS makin membesar. Ini diawali dengan stigma bahwa kelompok Asia yang membawa dan menyebarkan Covid-19. Terakhir, terjadi aksi penembakan di beberapa spa Asia di Atlanta yang menewaskan 8 orang.

Syarief Hasan mengungkapkan, sejak tahun 2011 sudah terjadi puluhan ribu aksi rasis terhadap orang Asia. Dalam kasus WNI, penanganan aksi rasis itu hanya mencapai 68 sampai 73%. Artinya, tidak semua kasus rasisme dapat ditangani dengan baik. Sebenarnya, sudah ada tindak lanjut secara bilateral maupun multilateral yang diatur dalam banyak UU, seperti UU No. 1 Tahun 1982 tentang Konvensi Wina, UU No. 37

Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Luar Negeri.

“Tetapi yang masih menjadi pertanyaan adalah bagaimana sebenarnya supaya pemerintah kita bisa melindungi WNI yang berada di luar negeri. Kita sering mengidentikkan perlindungan WNI dengan perlindungan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri. Sebenarnya bukan hanya TKI. Seharusnya perlakuan negara-negara tertentu kepada WNI juga harus mendapat perhatian,” papar politisi Partai Demokrat ini.

Untuk itu, Syarief Hasan mendorong para Duta Besar (Dubes) untuk memahami kondisi, sejarah, geografis, dan masyarakat di negara tempat bertugas. Sehingga Dubes bisa memahami dan tidak hanya memberi perhatian pada masalah ekonomi dan diplomatik, tetapi juga peduli pada perlindungan WNI. “Kita memberikan tugas tambahan kepada Dubes-Dubes untuk memberi jaminan keselamatan WNI di negara



bersangkutan,” tegasnya.

Selain itu, Syarif Hasan juga akan menyuarakan untuk menaikkan anggaran Kementerian Luar Negeri. “Persoalan ini juga menyangkut masalah anggaran. Anggaran kita sangat terbatas. Kelemahan di Kedubes-Kedubes kita adalah menyangkut anggaran. Kita selalu menyuarakan agar anggaran Kementerian Luar Negeri dinaikkan sehingga bisa memberikan perlindungan kepada WNI di luar negeri secara adil. Soal anggaran ini juga harus menjadi perhatian,” tuturnya.

Syarief Hasan mengakui, perlakuan rasisme memang sering terjadi di sebuah negara. “Tetapi, yang penting adalah bagaimana kita bisa melindungi warga

negara kita. Ini harus menjadi perhatian,” ucapnya.

Sementara itu, anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar, Christina Aryani, menyebutkan, aksi rasisme di AS telah menimbulkan ketakutan. Aksi rasisme itu tidak hanya dialami WNI, tetapi juga warga keturunan Asia lainnya. “Sentimen rasisme sebenarnya bukan hal baru terjadi di AS. Sejak tahun 1800 rasisme sudah ada,” ujarnya.

Christina memaparkan, rasisme terhadap warga Asia sudah ada sejak pembangunan rel kereta api yang mempekerjakan orang-orang dari Tiongkok. Sejak itu muncul ketidaksukaan terhadap orang Tiongkok. Bahkan, sempat terjadi 150 kali kerusuhan dan pembakaran

permukiman warga Tiongkok. “Ini tidak pernah hilang. Dan, sentimen itu muncul kembali saat Presiden Donald Trump menyebutkan, Covid-19 sebagai Chinese Viruses. Secara tidak langsung pernyataan ini kembali membangkitkan sentimen rasisme terhadap warga Asia, khususnya Tiongkok,” ujarnya.

Untuk memberi perlindungan terhadap WNI di luar negeri, Christina mengatakan, perlunya diplomasi perlindungan. “Dalam fit and proper test Dubes, diplomasi perlindungan terhadap WNI juga menjadi perhatian Komisi I. Kita menjadi pengawas apa yang dilakukan Kemenlu,” kata anggota Komisi I DPR ini. □

BSC

## Bulutangkis All England

# Jangan Ada Diskriminasi dalam Olahraga

Tim Bulutangkis Indonesia yang didiskualifikasi dari All England menunjukkan masih adanya diskriminasi dalam olahraga.

**T**IM Bulutangkis Indonesia yang berlaga di All England didiskualifikasi panitia penyelenggara. Anggota MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Bramantyo Suwondo, menilai, olahraga harus mengedepankan sportivitas dan terlepas dari kepentingan politik dan lainnya. Didiskualifikasinya Tim Bulutangkis Indonesia dari All England menunjukkan masih adanya diskriminasi dalam olahraga. Sebab, perlakuan yang diterima Tim Bulutangkis Indonesia berbeda dengan tim lain yang mengalami kasus serupa.

“Saya melihat ada kejanggalan dalam peristiwa itu,” ujarnya dalam Diskusi Empat Pilar MPR yang mengambil tema “Polemik All







FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

England dan Nasionalisme” di Media Center MPR/DPR/DPD Lobi Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (22/3/2021). Diskusi juga menghadirkan anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan H. Muchamad Nabil Haroen.

Bramantyo melihat, perlakuan yang diterima Tim Bulutangkis Indonesia berbeda dengan tim negara lain. Sebelum berangkat Tim Indonesia sudah melakukan tes PCR dengan hasil negatif. Ketika sampai di Inggris pun, Tim Indonesia kembali melakukan tes PCR dan hasilnya juga negatif. Bahkan anggota Tim Indonesia sudah divaksinasi Covid-19.

Namun, panitia penyelenggara mendiskualifikasi Tim Bulutangkis Indonesia setelah Kementerian Kesehatan Inggris menginformasikan salah seorang penumpang yang satu pesawat dengan Tim Indonesia

menuju Inggris terkonfirmasi Covid-19. “Tetapi anehnya, ada tim dari negara lain yang sempat diberitakan terpapar Covid-19, panitia penyelenggara mengakomodir tim negara itu untuk melakukan tes ulang dan akhirnya dinyatakan negative, sehingga bisa berlaga kembali di All England,” ujarnya.

“Jelas ada ketidakadilan dan diskriminasi. Panitia mengakomodir tim negara lain untuk melaksanakan PCR ulang dan dengan hasil negatif mereka diperbolehkan berlaga kembali. Seharusnya, Indonesia juga mendapat perlakuan yang sama,” imbuhnya.

Karena itu, Bramantyo menyatakan, peristiwa ini menjadi catatan dan perhatian Komisi X DPR. “Kita akan mengadakan rapat dengan Kemenpora. Salah satu isu yang kita tanyakan adalah soal All England. Bagaimana dan langkah apa yang harus dilakukan bila

menghadapi situasi seperti itu,” kata anggota Komisi X DPR ini.

“Kita juga mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemenpora dan pengurus olahraga lainnya seperti KOI dan KONI, untuk memastikan tidak ada diskriminasi dalam olahraga seperti kejadian yang dialami Tim Bulutangkis Indonesia di All England,” tuturnya.

Sementara itu, anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan H. Muchamad Nabil Haroen menyebutkan, Tim Bulutangkis Indonesia memiliki mental juara. “Kita terus menerus melakukan kritik kepada panitia penyelenggara, kita suarakan melalui berbagai kanal yang ada. Tapi, kita tidak melakukan hal-hal yang sifatnya destruktif. Ini merupakan salah satu karakter dari tim yang bermental juara,” katanya.

Menurut Gus Nabil, sapaan akrab Nabil Haroen, Tim Bulutangkis Indonesia dan masyarakat harus bisa move-on dari kejadian tersebut. Sekalipun demikian kritik dan upaya mendapat keadilan tetap harus dilanjutkan. “Kritik harus tetap dilanjutkan untuk mendapatkan keadilan sesungguhnya. Namun, kita juga harus move-on. Saya kira penting bagi kita untuk move on. Karena kalau kita berputar di sini saja tanpa move-on, saya kira akan menjadi sesuatu yang mubazir dan sia-sia,” katanya.

Gus Nabil juga mengapresiasi diplomasi yang dilakukan Kedubes Indonesia di Inggris. Tanpa diplomasi tidak mungkin Tim Bulutangkis Indonesia bisa kembali ke Tanah Air lebih cepat. “Tim Indonesia bisa kembali lebih cepat. Ini karena adanya diplomasi. Kalau tidak ada diplomasi yang baik, saya kira atlet-atlet kita masih terkurung di sana selama 10 hari. Upaya ini perlu kita apresiasi,” tambahnya.

Terkait nasionalisme, Gus Nabil menyebutkan, olahraga dan nasionalisme tidak dapat dipisahkan. Apa yang dialami Tim Bulutangkis Indonesia di All England telah membangkitkan rasa nasionalisme masyarakat di Tanah Air.

“Kita melihat ketika Tim Bulutangkis Indonesia dipaksa untuk mengalah atau dipaksa untuk kalah, datang dukungan dari semua pihak, mulai dari rakyat di bawah hingga pimpinan. Semua mendukung Tim Indonesia. Ini bukti bahwa olahraga bisa menjadi alat pemersatu bangsa. Bulutangkis adalah salah satu cabang olahraga yang bisa kita banggakan,” ucapnya. □

BSC





**H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.**  
Ketua MPR RI

## Membangun Infrastruktur 5G Demi Masa Depan Anak-Cucu

**K**ETIKA komunitas global mulai mengadopsi teknologi telekomunikasi seluler Generasi Lima atau 5G, fakta ini otomatis menghadirkan tantangan. Tidak hanya bagi negara, melainkan juga tantangan bagi generasi muda yang akan melanjutkan pembangunan nasional. Artinya, menyoal pembangunan infrastruktur 5G dan menyiapkan talenta digital jauh lebih produktif dan relevan; bukan meributkan isu presiden tiga periode.

Generasi milenial atau Generasi Y yang terbiasa dengan teknologi telekomunikasi Generasi Empat atau 4G kini sudah memasuki dunia kerja. Ketika jutaan warga pada belasan ribu desa atau kelurahan belum bisa menikmati teknologi 4G karena keterbatasan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Indonesia sudah harus beradaptasi dengan teknologi 5G. Era 5G, sebagaimana telah diilustrasi oleh para ahli, merupakan sebuah lompatan besar yang bisa saja terkesan cukup ekstrim, karena akan mengubah banyak aspek dalam kehidupan manusia.

Konsekuensi lompatan ke era 5G mengharuskan dimulainya akselerasi pembangunan infrastruktur TIK. Mempercepat pembangunan infrastruktur TIK menjadi keniscayaan agar semua anak-cucu yang diidentifikasi sebagai Generasi Y, Generasi Z, dan Generasi Alpha, memiliki akses untuk beradaptasi dengan era 5G. Tiga generasi itulah yang akan melanjutkan dan melakoni masa depan pembangunan nasional. Karena itu, menjadi kewajiban generasi orang tua masa kini untuk menghantarkan tiga generasi itu memasuki era 5G, dengan menyediakan infrastruktur TIK yang mumpuni.

Setelah mewujudkan konektivitas nasional melalui proyek Palapa Ring, pemerintah diharapkan makin

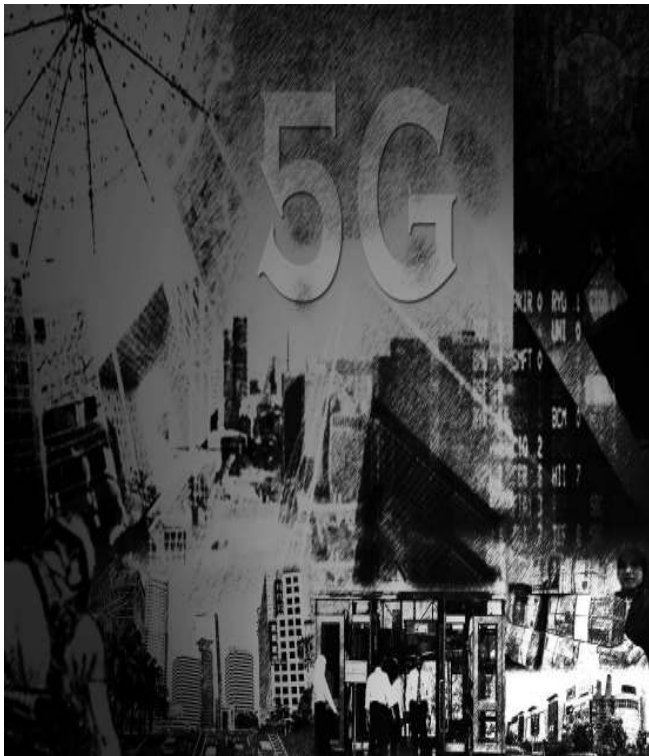
fokus membangun infrastruktur TIK untuk teknologi 5G. Dikutip dari berbagai sumber, disebutkan bahwa diperlukan ketersediaan spektrum 2,6 GHz demi efektivitas 5G, dengan bandwidth di kisaran 100 MHz. Dengan spektrum seperti itu, 5G akan memiliki kemampuan sangat mumpuni, dengan kecepatan lebih dari 1Gbps dan latensi (perlambatan/tunda) 1ms dan bisa terhubung ke ratusan ribu perangkat per kilometer persegi..

Karena kemampuannya seperti itu, teknologi 5G bisa mewujudkan tidak hanya pabrik cerdas, tetapi juga mewujudkan rumah pintar, alat medis pintar hingga transportasi cerdas. Untuk memeriksa kesehatan atau proses penyembuhan, dokter dan pasien tidak perlu harus tatap muka dalam satu ruang medis, karena pemeriksaan oleh dokter atau petugas medis bisa dilakukan dari tempat lain. Juga dengan dukungan teknologi 5G, mobil swaskemudi atau tanpa kendali oleh manusia bisa segera diwujudkan.

Teknologi 5G akan membangun dan mewujudkan kebudayaan baru. Banyak pekerjaan, dari yang rumit sampai yang paling sederhana, tidak lagi butuh otak dan peran tenaga manusia. Era 5G menjanjikan kehidupan yang lebih mudah, tetapi juga mengeliminasi begitu banyak pekerjaan yang sebelumnya butuh peran manusia. Sebagaimana diingatkan oleh Kepala Pusat Inovasi 5G di Universitas Surrey, Inggris, professor Rahim Tafazolli, ada harga yang harus dibayar manusia ketika sebuah pembaruan atau kemajuan terwujud.

Studi oleh GSMA Intelligence mengindikasikan Amerika Serikat (AS), Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan akan menjadi negara yang mendominasi jaringan seluler 5G super cepat pada tahun 2025. Perkembangan ini hendaknya mendorong Indonesia untuk semakin cepat membangun infrastruktur TIK





pendukung teknologi 5G.

Sebagai negara yang diproyeksikan menjadi salah satu dari lima raksasa ekonomi dunia dengan total Produk Domestik Bruto US\$ 7 triliun, transformasi digital di era 5G menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilakoni bangsa ini. Bukankah Indonesia ingin menjadi bangsa yang tangguh dengan mewujudkan misi Indonesia Maju di tahun 2045?

Di sela-sela proses menyiapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), MPR juga peduli pada proses dan progres transformasi digital di dalam negeri. Gonjang-ganjing isu jabatan presiden sampai tiga periode tak lebih dari skenario halu dari kelompok-kelompok yang lebih mementingkan syahwat kekuasaan.

Dengan peduli pada proses transformasi digital di semua sektor,

MPR ingin mengingatkan semua elemen masyarakat bahwa ada tantangan besar yang harus segera direspons demi masa depan anak-cucu; mulai dari Generasi Y (lahir dalam rentang waktu 1981 - 1994), Generasi Z (1995 - 2010) hingga Generasi Alpha (lahir setelah tahun 2010). Tantangan riil ini harus dijawab dengan pemikiran-pemikiran visioner dari generasi orang tua saat ini.

Siap atau tidak siap, Indonesia harus bisa menyiapkan infrastruktur digital bagi masa depan Generasi Z, Y, dan Generasi Alpha yang juga sering disebut iGeneration, generasi net atau generasi internet. Mereka orang muda yang kesehariannya bergelut dengan ponsel pintar, terbiasa browsing dengan komputer, dan mendengarkan musik melalui earphone. Semua kegiatan nyaris berkaitan dengan dunia maya.

Sejak kecil, tiga generasi itu sudah akrab dengan teknologi dan akrab dengan gadget canggih. Bahkan Generasi Alpha digambarkan sebagai sudah terbiasa dengan teknologi sejak masih dalam kandungan, dan begitu lahir langsung menjalani pola hidup digital. Maka, demi masa depan mereka, negara wajib memfasilitasi dengan mempercepat proses transformasi digital. MPR akan banyak menyentuh kepentingan iGeneration dan Generasi Alpha.

Sudah menjadi fakta bahwa percepatan transformasi digital tak terhindarkan karena faktor pandemi Covid-19. Masyarakat kian terbiasa dengan aktivitas daring, dari mulai belanja, proses belajar-mengajar hingga bekerja di rumah atau WFH (Work From Home). Pola hidup baru di tengah pandemi juga mendorong semua komunitas makin fokus dan peduli pada masa depan iGeneration dan Generasi Alpha. Jangan sampai mereka gagap karena ketidaksiapan negara mengadopsi teknologi 5G, menyiapkan talenta digital, dan merumuskan regulasi yang mumpuni.

Kini, digitalisasi telah menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. MPR mengapresiasi upaya pemerintah yang telah menginisiasi pelatihan-pelatihan melalui berbagai program, seperti Gerakan Literasi Digital Nasional (Siberkreasi), Beasiswa Talenta Digital (DTS), maupun penyelenggaraan Akademi Kepemimpinan Digital (DLA). Demikian juga upaya-upaya digitalisasi di sektor UMKM (UMKM Go Online) dan Gerakan Nasional 1.000 Startup. □

Terima Duta Besar Rusia

# Bamsoet Dorong Kerjasama Pengembangan Vaksin Covid-19

Rusia mengajak Indonesia menjadi salah satu negara pusat produksi berbagai jenis vaksin buatan Rusia. “Tawaran bagus tersebut harus disambut baik oleh pemerintah Indonesia,” ujar Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR RI Bambang Soesatyo menekankan perlunya pemerintah Indonesia segera menyetujui pengadaan vaksin Covid-19 buatan Rusia untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong. Sebuah program vaksinasi Covid-19 yang diberikan secara gratis dari pelaku usaha Indonesia kepada para pekerjanya.

Saat ini Rusia sudah memproduksi dan menggunakan tiga jenis vaksin, yakni Sputnik V, EpiVacCorona, dan CoviVac. Selain itu, Rusia juga sedang mengembangkan vaksin Sputnik Light yang bisa digunakan untuk anak-anak dengan penggunaan cukup satu kali suntikan.

Tapi, baru Sputnik V yang teregistrasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mendapatkan izin penggunaan darurat di Indonesia. Sementara EpiVacCorona, CoviVac, dan Sputnik Light belum teregistrasi. Untuk itu, Rusia melalui RDIF (Rusian Direct Investment Fund), yaitu BUMN-nya Rusia, telah menunjuk perusahaan swasta nasional untuk menjadi representatif mereka di Indonesia.

“Mengapa BPOM dan Kementerian

Kesehatan perlu memberikan perhatian? Seperti dijelaskan Duta Besar Rusia, Sputnik punya berbagai keunggulan. EpiVacCorona, misalnya, bisa digunakan untuk lansia di atas 60 tahun. Sementara CoviVac bisa disimpan di suhu 2-8 derajat celcius, dengan penggunaan sebanyak dua kali, yakni disuntikan di hari pertama dan di hari ke-14 setelah penyuntikan

pertama,” ujar Bamsoet usai menerima Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mr. Lyudmila Vorobieva, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Jakarta, Senin (22/3/21).

Turut hadir dalam pertemuan itu, antara lain Sekretaris Ketiga Kedutaan Besar Rusia Mr. Roman Romanov, Perwakilan Dagang Federasi Rusia di Indonesia Mr. Sergey Rossomakhov, dan perwakilan Dagang Se-







nior Ms. Maria Mitsura.

Mengutip penjelasan Duta Besar Rusia, Ketua DPR RI ke-20 ini menerangkan bahwa untuk Sputnik V telah teregistrasi di BPOM, menunggu izin edar. Keunggulannya, antara lain memiliki efikasi 91,6%, mudah didistribusikan karena hanya butuh disimpan di suhu 2-8 derajat celsius, dan harga relatif lebih murah, yakni kurang dari US\$ 10. Penyuntikannya dilakukan sebanyak dua kali, dengan jeda waktu 21 hari dari penyuntikan pertama.

Sebagai catatan, menurut Duta Besar Rusia, vaksin Sputnik dikembangkan oleh Pusat Epidemiologi dan Mikrobiologi Nasional Gamaleya –sebuah pusat penelitian yang dikelola negara— di Moskow. Gamaleya memproduksi vaksin dengan dukungan dari Dana Investasi Langsung Rusia. Hasil uji klinis fase 3 menunjukkan Sputnik V memiliki efikasi yang sangat optimal (antara 91,6 hingga 95%) terhadap infeksi Corona. Peneliti mengatakan, hasil ini sejalan dengan data kemanjuran yang dilaporkan pada tahap

awal uji coba yang telah dimulai di Moskow, September 2020.

Penggunaan vaksin ini, kata Duta Besar Rusia, sudah disetujui di Rusia, Belarusia, Serbia, Argentina, Bolivia, Aljazair, Venezuela, Paraguay, Turkmenistan, Hongaria, UEA, Iran, Guinea, Tunisia, Armenia dan wilayah Palestina.

Vaksin buatan Rusia ini, katanya, didasarkan pada DNA adenovirus jenis SARS-CoV-2. Terkait vaksin ini dilaporkan, menggunakan virus yang telah dilemahkan untuk mengirimkan sebagian kecil patogen dan menstimulasi respons imun dan tidak ada efek samping. Mayoritas efek samping ringan, seperti nyeri di tempat suntikan, gejala seperti flu dan kelelahan.

Selain menawarkan vaksin, Rusia juga mengajak Indonesia menjadi salah satu negara pusat produksi berbagai jenis vaksin buatan Rusia. Sehingga Indonesia tak hanya sekadar menjadi konsumen, melainkan juga turut menjadi produsen. “Tawaran bagus tersebut harus disambut baik oleh pemerintah

Indonesia. Selain untuk meningkatkan investasi, juga bisa dimanfaatkan untuk transfer teknologi dan pengetahuan seputar vaksin Covid-19,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menerangkan, semakin banyak jenis vaksin Covid-19 yang masuk ke Indonesia, semakin bagus bagi percepatan vaksinasi terhadap berbagai kalangan penduduk. Mengingat untuk tercapainya herd immunity, vaksinasi minimal harus dilakukan kepada 181.554.465 penduduk.

“Data Satgas Covid-19 mencatat, per 21 Maret 2021, vaksinasi ke-1 sudah dilakukan kepada 5.533.379 penduduk. Sementara vaksinasi ke-2 sudah dilakukan kepada 2.301.978. Kita menargetkan pada peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus mendatang, Indonesia sudah bebas Covid-19. Untuk mencapainya, selain menerapkan protokol kesehatan secara ketat, juga harus didukung dengan percepatan vaksinasi,” pungkas Bamsoet. □

Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah

# Agar Pancasila Diperkenalkan dalam Buku Pengajaran ASEAN

Wakil Ketua MPR merespon rencana Kemendikbud menggodok dan menyusun buku bahan pengajaran ASEAN untuk pendidikan menengah. Dia berharap agar Kemendikbud memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam buku tersebut.



**W**AKIL Ketua MPR Ahmad Basarah berharap agar Kemendikbud memasukkan nilai-nilai Pancasila dan sejarah lahirnya ideologi bangsa Indonesia ini dalam buku bahan pengajaran ASEAN untuk pendidikan menengah yang tengah mereka susun. Dia berharap, para siswa memahami bahwa ASEAN dibentuk dengan semangat persatuan dan keadilan sosial di mana kedua nilai itu termaktub dalam Pancasila.

“Dua tujuan yang termaktub dalam deklarasi berdirinya ASEAN kan sesuai dengan prinsip Pancasila. Tujuan pertama, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan budaya kawasan. Tujuan kedua, untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara negara-negara di Kawasan,” jelas Ahmad Basarah di Jakarta, Rabu (17/3/2021).

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Luar Negeri itu juga menyatakan bahwa Indone-

sia membawa semangat Pancasila ketika terlibat aktif dalam membentuk ASEAN. Prinsip musyawarah mufakat yang dibawa Indonesia sesuai dengan prinsip Unanimity yang termaktub dalam Chapter 7 Artikel 20 Piagam ASEAN.

“Negara-negara anggota ASEAN menggunakan prinsip unanimity saat menyelesaikan masalah di antara mereka, selain prinsip lain yang juga sesuai dengan prinsip Pancasila, misalnya menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN,” jelas Ahmad Basarah.

Pernyataan anggota DPR RI dari Komisi X yang antara lain membidangi pendidikan itu disampaikan untuk merespon rencana Kemendikbud yang saat ini menggodok dan menyusun buku bahan pengajaran ASEAN untuk pendidikan menengah. Dalam menyusun buku ajar ini, Kemendikbud bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI sebagai salah satu realisasi perjanjian kerja antara

kedua kementerian.

Ahmad Basarah mengusulkan, sebaiknya Kemendikbud menjalin koordinasi dengan Kemenlu agar bahan buku pengajaran ASEAN yang mereka susun ini juga diajarkan di sekolah-sekolah tingkat menengah di semua negara ASEAN. Dengan demikian, Indonesia mulai menduniakan ideologi Pancasila dan tidak lagi menjadi bangsa yang diintervensi oleh banyak ideologi transnasional yang tidak sejalan dengan Pancasila.

“Di masa depan, ketika negara-negara mengalami borderless states atau negara tanpa batas akibat kemajuan teknologi komunikasi, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah untuk mufakat, juga keadilan sosial yang dikandung Pancasila sangat dibutuhkan agar perdamaian dunia terus terwujud,” jelas Ahmad Basarah.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan, di antara negara-negara ASEAN, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak dan dengan wilayah terluas mencapai 1.904.569 km<sup>2</sup>. Dengan demikian, wajar jika Indonesia harus berada di garda terdepan dalam menyebarkan nilai-nilai kebaikan kepada negara-negara tetangganya yang lebih kecil agar stabilitas regional di kawasan ini terus terjaga.

“Ketika Bung Karno menjabat presiden lalu menggelar Konferensi Asia Afrika di Bandung, semangat yang diusung pendiri bangsa ini sebenarnya juga menduniakan nilai-nilai Pancasila. Jika para pendiri bangsa dulu melakukannya lewat diplomasi tingkat tinggi, generasi sekarang melakukan hal yang sama lewat buku dan diskusi-diskusi ilmiah di bangku sekolah,” jelas doktor ilmu hukum lulusan Universitas Diponegoro Semarang itu. □



## Kunjungan Pengurus KADIN Jawa Barat

# Membangkitkan Perekonomian Rakyat

Walaupun 2020 menjadi tahun terberat bagi perekonomian Jawa Barat, namun para pengusaha bersama masyarakat bisa saling bergotong royong menyelamatkan perekonomian. Karenanya, tahun 2021 ini harus dihadapi dengan penuh optimisme.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR RI Bambang Soesatyo mengajak KADIN Jawa Barat terus bergotong royong membangkitkan perekonomian rakyat, sebagai bagian dari implementasi bela negara dalam sektor perekonomian. KADIN Jawa Barat dengan para mitra KADIN di 27 kota/kabupaten se-Jawa Barat punya kekuatan sosial, ekonomi, bahkan politik untuk meningkatkan produktivitas perekonomian masyarakat Jawa Barat.

“Terlebih pemerintah provinsi Jawa Barat sudah memetakan tujuh potensi pengembangan ekonomi baru di Jawa Barat, yang dikenal dengan New Economic Jabar. Antara lain, meraup peluang investasi perusahaan yang pindah dari Tiongkok, swasembada pangan, swasembada teknologi, mendorong peluang bisnis di sektor kesehatan, digital ekonomi, penerapan ekonomi berkelanjutan, dan pariwisata lokal,” ujar Bamsoet usai



menerima pengurus KADIN Jawa Barat, di Jakarta, Rabu (17/3/21).

Para pengurus KADIN Jawa Barat yang hadir, antara lain: Ketua Umum Cucu Sutara, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Ferry Sandiyana, Wakil Ketua Umum Bidang Industri Hilir Yayat Andhie, Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informasi Investasi Mahpudi. Juga turut hadir Ketua KADIN Kabupaten Karawang Fadludin Damanhuri.

Ketua DPR RI ke-20 ini memaparkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Januari hingga Agustus 2020, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi penyumbang ekspor tertinggi se-Indonesia. Menyumbang sekitar 16,28% atau sekitar US\$ 16,79 miliar terhadap ekspor nasional.

“Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat mencatat total realisasi investasi penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sampai dengan Januari hingga Desember 2020 yang direalisasikan oleh para investor di 27 kabupaten/kota mencapai Rp 120,4 triliun,” papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menekankan, walaupun tahun 2020 menjadi tahun terberat bagi perekonomian Jawa Barat, namun para pengusaha bersama masyarakat bisa saling bergotong royong menyelamatkan perekonomian. Karenanya, tahun 2021 ini harus dihadapi dengan penuh optimisme.

“BPS Jawa Barat melaporkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat secara keseluruhan di tahun 2020 berkontraksi minus 2,44%. Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat memprediksi pada 2021 ini perekonomian di Jawa Barat bisa tumbuh hingga 5,5%. Prediksi tersebut bisa tercapai apabila seluruh kalangan, mulai dari pengusaha, masyarakat, dan pemerintah daerah, hingga pusat bergotong royong. Tidak berjalan sendiri-sendiri,” pungkask Bamsoet. □

Temu Tokoh Nasional

# Covid-19 Harus Diselesaikan Agar Perekonomian Cepat Pulih

Dunia pariwisata Indonesia terancam, penanganan pandemi yang cepat akan memulihkan semua sektor, terutama perekonomian dan pariwisata.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE., MM., MBA., mengungkapkan bahwa pandemi Covid-19 telah menghancurkan sebagian besar perekonomian di seluruh wilayah Indonesia, termasuk sektor pariwisata Bali. Imbasnya sangat meluas. Bukan hanya pelaku bisnis wisata besar saja yang terpukul, tapi juga dialami rakyat Bali yang menggantungkan hidupnya di sektor ini.

Jika kondisi itu dibiarkan berlarut-larut maka perekonomian Bali akan jatuh semakin dalam dan bisa membutuhkan waktu sangat lama untuk bangkit kembali. Satu-satunya jalan agar proses pemulihan perekonomian berjalan lancar maka penyebaran virus harus segera dihentikan. Untuk itu, Syarif Hasan berharap, agar pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk lebih intens lagi dalam membuat dan menjalankan berbagai program penanganan Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Pimpinan MPR dari Partai Demokrat ini saat menjawab kegelisahan rakyat dan pelaku usaha wisata

Bali terkait dampak pandemi dalam acara 'Temu Tokoh Nasional,' yang diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan DPC Partai Demokrat Gianyar, Bali, Sabtu (3/4/2021). Hadir dalam acara tersebut Ketua DPC PD Kab. Gianyar Bali, Tjok Gede Asmara Putra Sukawati, dan masyarakat setempat sebagai peserta.

"Sebagai Pimpinan MPR, saya juga memiliki kepedulian yang besar kepada kondisi destinasi wisata dunia kebanggaan bangsa ini. Saya sampaikan langsung kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI untuk bersama-sama mendorong agar Bali kembali menjadi mercusuar pariwisata Indonesia," ujarnya

Sampai saat ini, Syarif Hasan menilai, upaya-upaya pemerintah pusat dan daerah dalam menangani pandemi patut diapresiasi, seperti pemberian vaksin ke berbagai wilayah Indonesia dan penerapan protokol kesehatan. Masyarakat harus mendukung langkah pemerintah itu dengan berpartisipasi aktif. Selain itu, masyarakat juga mesti

segera menyebarkan kabar ke manapun, terutama kepada masyarakat dunia jika penyebaran virus menurun menuju ke arah yang lebih baik.

"Saya sendiri, ketika Bali mulai menunjukkan penurunan penyebaran virus, tidak ragu melakukan kunjungan kerja, tentu dengan menerapkan prokes secara ketat. Setelah itu, saat berkomunikasi dengan teman-teman saya di Jepang, saya sampaikan bahwa Bali sudah mulai aman karena berbagai usaha keras yang dilakukan pemerintah Indonesia. Ketika ini dilakukan, maka diharapkan kabar akan terus tersebar dan efeknya akan baik untuk pariwisata Bali," ujarnya.

Semangat tersebut, kata Syarif Hasan, bukan hanya berlaku untuk Bali tapi harus menjadi semangat nasional. "Saya bukan berasal dari Bali, tapi saya dukung kemajuan Bali dalam penanganan pandemi, sekaligus pemulihan ekonomi. Jika seluruh rakyat saling mendukung, saling menguatkan, dan saling menyebarkan kabar baik,





sesuai dengan nilai-nilai Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika), saya rasa pandemi akan cepat berlalu, sehingga bangsa ini bisa fokus dalam memulihkan perekonomian

sekaligus menjadi negara maju di masa depan," katanya.

Dari pandemi ini, ungkap Syarif Hasan, bangsa Indonesia bisa mengambil hikmah yang luar biasa, yakni rasa persaudaraan,

empati, toleransi menjadi semakin terjalin karena rasa senasib. Itu menjadi satu modal yang kuat untuk bersama-sama bertahan dan keluar dari pandemi. □

DER

### Diskusi Menangkal Radikalisme

# Pemahaman Kebangsaan Perlu Ditanamkan pada Generasi Muda

Paham radikalisme sangat merusak untuk itu pemahaman tentang kebangsaan mesti diperkuat. Untuk mencegahnya, hendaknya seluruh proses penyelenggaraan negara membuka ruang konsultasi dan partisipasi publik.

**W**AKIL Ketua MPR RI Arsul Sani mengungkapkan bahwa paham dan gerakan radikalisme bisa dicegah dan dihentikan jika seluruh proses penyelenggaraan negara membuka ruang konsultasi dan partisipasi publik. Hal itu sangat penting, sebab salah satu penyebab tumbuh suburnya radikalisme, selain kemiskinan, juga ketidakpuasan kepada kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak berpihak atau merugikan. Tersedianya ruang komunikasi untuk mereka akan mempersempit potensi masuknya paham radikal karena merasa dikecewakan.

Pernyataan tersebut disampaikan Pimpinan MPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini dalam acara Diskusi Empat Pilar MPR RI yang diselenggarakan Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen. Diskusi bertema 'Penanaman Nilai-



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Nilai Kebangsaan untuk Menangkal Radikalisme Bagi Generasi Muda," ini berlangsung di Media Center MPR/DPR/DPD, Lobi Gedung

Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/4/2021).

Hadir sebagai narasumber adalah anggota

MPR Fraksi Golkar/ Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR, Agun Gunandjar Sudarsa, serta para awak media massa nasional, baik elektronik, cetak, dan online sebagai peserta.

Sebagai informasi publik, Arsul Sani mengutarakan bahwa untuk menetralsisir paham-paham radikal, negara telah melakukan upaya deradikalisasi dan kontra radikalisasi. Salah satunya, DPR melalui Pansus telah menghasilkan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. UU tersebut meletakkan dasar pengaturan yang lebih kuat terkait dengan

tidak terjadi tumpang tindih, pengulangan dan pemborosan anggaran.

“Saya harap kerja-kerja deradikalisasi ke depannya akan lebih baik dengan memakai prinsip money follow program,” ucapnya. Jadi, kata Arsul, upaya deradikalisasi harus dilakukan secara benar, konsisten, dan mendapatkan dukungan masyarakat. Sebab, salah satu bahaya utama radikalisme adalah selalu menysar kepada generasi muda bangsa. Untuk membentengi, para pemuda mesti dibekali dengan pemahaman kebangsaan yang kuat.

Namun, Arsul Sani mengingatkan, metode pendidikan kebangsaan kepada generasi milenial harus tidak kaku, gunakan metode yang sesuai dengan jiwa muda, kekinian

akan mampu memengaruhi,” katanya.

Arsul berharap, segala upaya tersebut mendapatkan perhatian dan dilanjutkan oleh pemerintah. “Kita hanya membuka jalan, kita berharap dengan sinergitas yang kuat dan konsistensi seluruh elemen bangsa dalam memerangi radikalisme, mudah-mudahan bangsa ini mampu menghilangkan paham-paham dan aksi radikal di masa depan, dan negara ini akan fokus membangun demi rakyatnya,” pungkasnya.

Pembicara lain, Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan bahwa terkait paham radikalisme, generasi muda harus mendapatkan perlindungan dan itu tanggung jawab seluruh elemen bangsa. “Saya sangat setuju pemahaman kebangsaan mesti ditanamkan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

upaya penangkalan paham dan gerakan radikal. Implementasinya, pemerintah kemudian membuat program besar Kesiapsiagaan Nasional.

“Sekarang kita lihat petanya seperti apa sampai hari ini. Saya melihat kerja-kerja deradikalisasi sebagai perwujudan program besar kesiapsiagaan nasional masih kurang efektif, karena paradigmanya masih memakai paradigma yang lama, yakni money follow function sehingga kerja menjadi tidak terkoordinasi, terkesan tumpang tindih, dan pengulangan,” paparnya.

Semestinya, lanjut Arsul, program deradikalisasi bisa efektif jika menerapkan paradigma yang sebetulnya merupakan komitmen pemerintahan Presiden RI Joko Widodo sejak 2014, yakni money follow program. Dalam paradigma ini, lembaga yang menjalankan boleh lebih dari satu, tetapi di bawah koordinasi satu lembaga, sehingga

sehingga bisa diterima serta mudah dipahami. “Menurut saya, jangan menggunakan model indoktrinasi. Anak muda harus disentuh jiwa Indonesianya, kita ingatkan, kita tanamkan betapa hebatnya, besarnya, indahnya, negeri kita ini. Tanamkan kebanggaan di dada mereka. Yang saya rasakan itu menarik buat anak muda,” ujarnya.

Arsul Sani sendiri menggunakan metode yang unik dalam memberikan pemahaman kebangsaan melalui Sosialisasi Empat Pilar, diantaranya memberi kesempatan kepada anak-anak muda untuk mendapatkan program Kejar Paket A, B, dan C. Lalu, bekerjasama dengan LSM, Arsul membuat pelatihan kerja dan keterampilan, seperti pangkas rambut, agar mereka ke depannya bisa mandiri. “Jika mereka pintar karena mendapatkan akses pendidikan juga keterampilan, maka kehidupan mereka akan baik sehingga diharapkan paham radikal tak

kepada mereka. Anak muda bangsa memang harus disentuh hatinya. Berikan pengetahuan dasar kepada mereka siapa dirinya, di mana dirinya berada dan pentingnya mencintai tanah airnya. Kemudian, biarkan pikirannya bekerja bahwa ia adalah anak Indonesia yang berada di tanah, air, dan udara Indonesia yang harus dicintai. Sehingga lambat laun akan tertanam dalam dirinya sebagai warga negara Indonesia dan bangga akan hal itu,” katanya.

Ketika karakter kuat itu sudah terbentuk maka dalam proses tumbuh kembangnya anak-anak muda akan menyadari bahwa ia harus tunduk dan patuh kepada ideologi dan konstitusi negara. “Dengan begitu diharapkan, mereka anak-anak muda bangsa akan memiliki pertahanan yang tak mudah ditembus oleh pemahaman radikal apapun,” ujarnya. □

DER



Fadel Muhammad di ITB

## Untuk Haluan Negara, MPR Serap Hasil Riset ITB

ITB sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia diminta masukan oleh MPR terkait pokok-pokok haluan negara. Di kampus itu sudah banyak kajian, tinggal dipertajam untuk kebutuhan nasional.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**EDATANGAN Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad di Gedung Doddy A. Tisna Amidjaja, Rektorat Institut Teknologi Bandung (ITB), Kota Bandung, Jawa Barat, 22 Maret 2021, langsung disambut Rektor ITB Prof. Reini Wirahadikusumah, bersama Sekretaris Institut Prof. Widjaja Martokusumo, dan beberapa jajaran kampus lainnya.

Kedatangan Fadel Muhammad di ITB untuk memberi kabar bahwa MPR mempunyai agenda melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945 terkait untuk memasukkan pokok-pokok haluan negara ke dalam UUD. Fadel menjelaskan, MPR selama ini telah melakukan kunjungan ke berbagai perguruan tinggi untuk menyerap aspirasi, masukan, bahan-bahan atau dokumen untuk dijadikan bahan pembahasan pokok-pokok haluan negara.

"Kami sudah menyerap bahan atau masukan dari beberapa perguruan tinggi, seperti Universitas Gadjah Mada," ungkapnya. "Saya mendapat tugas menyerap bahan atau dokumen dari ITB, karena saya alumni ITB," tambah Fadel Muhammad dengan tersenyum.

Selanjutnya, Fadel menjelaskan, dia datang ke ITB atas nama MPR untuk menyerap secara resmi bahan atau do-

kumen untuk pengisian pokok-pokok haluan negara. "Kami berharap kampus ini dapat memberikan masukan, terutama yang berhubungan dengan bioteknologi dan teknologi masa depan," ujar mantan Gubernur Gorontalo itu. Dan, dia mengaku merasa senang, karena apa yang diinginkan itu, yakni bioteknologi terutama obat herbal yang berasal dari tumbuh-tumbuhan alam dan teknologi masa depan, merupakan bagian dari 7 Program Utama ITB.

Setelah melakukan pertemuan dengan rektor dan jajaran kampus lainnya, Fadel Muhammad mengatakan bahwa kampus yang memiliki simbol Ganesha itu dalam waktu dekat akan memberi dukungan dan masukan dalam bentuk makalah atau *paper*. "Hal-hal itulah yang akan menjadi dokumen di MPR," ujarnya. Masukan dari ITB, kata Fadel, akan menjadi bahan utama yang berhubungan dengan pokok-pokok haluan negara dalam bidang teknologi ke depan dan pengembangan industri.

Dalam pertemuan itu, rektor menyampaikan kepada Fadel Muhammad bahwa ITB akan mempersiapkan kampus baru. Kampus itu akan menjadi kampus masa depan. Lahan untuk tersedia di wilayah Jawa Barat. Mendengar keinginan ITB akan mempersiap-

kan kampus baru, sebagai alumni ITB, Fadel Muhammad mendukungnya. Dia akan membantu dengan menyampaikan rencana itu kepada Presiden dan menteri terkait. "Insya Allah akan kita sampaikan kepada Presiden dan menteri terkait," tuturnya.

Kepada wartawan, Rektor ITB Reini Wirahadikusumah menuturkan bahwa naskah akademik yang diminta MPR akan segera disampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Naskah yang dimaksud tidak dimulai dari nol, sebab ITB mempunyai banyak kajian. "Kajian atau riset sudah menjadi dasar ITB," ungkapnya. Naskah, kajian, dan riset itu selanjutnya akan dipertajam untuk kebutuhan nasional.

Setelah mendengar pokok-pokok haluan negara bersifat jangka panjang 25 tahun, untuk itu ITB akan mengembangkan teknologi jangka panjang. Kampus ITB mencoba mengidentifikasi agar kajian, naskah, dan riset yang ada sesuai kebutuhan sehingga menjadi optimal. ITB dalam pembangunan ingin memosisikan diri sebagai pihak yang mempertajam, mengingatkan, dan mendukung. "Dalam pembangunan jangan jalan sendiri-sendiri," ujar Rektor ITB, menegaskan. □

AWG

Muhtar Yusuf

# Mengajar **Sembari** Bertani Melon *di Banyumas*



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**M**ENJADI guru swasta, apalagi di daerah pinggiran, tantangannya cukup besar. Bukan hanya dari segi sarana dan prasarana, tetapi persoalan kesejahteraan juga kerap terlewatkan. Tetapi, semua itu tantangan itu tidak membuat semangat para guru menjadi kendor. Mereka tetap melaksanakan tugas serta kewajibannya dengan ikhlas, karena lebih mengharap ridho serta kemuliaan dari Allah SWT.

Para guru swasta yang bertugas di daerah pinggiran merasa lebih mulia dapat mencerdaskan generasi masa depan bangsa yang berada di daerah pinggiran. Meski mereka harus hidup dengan penuh kesederhanaan. Karena itu, kiranya tak berlebihan bila para guru mendapat label Pahlawan Tanpa Tanda Jasa.

Bertugas di daerah pinggiran banyak suka dukanya. Muhtar Yusuf (37), Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah di Karangtalun Kidul, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menceritakan suka dukanya menjadi guru swasta di daerah pinggiran.

Begini kisahnya. Jauh sebelum menjadi

kepala sekolah seperti sekarang, Muhtar adalah guru pengabdian di MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul tersebut. Saat menjadi guru pengabdian, Muhtar mengungkapkan bahwa hidupnya pas-pasan, bahkan cenderung kekurangan. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari dia harus mencari usaha sambilan, dan dia memilih bidang usaha tani.

Begitulah aktivitas sehari-hari sang guru Muhtar, mengajar dan juga bertani. Pulang mengajar, pada sore harinya, pria kelahiran Banyumas, 9 Januari 1984, ini menyempatkan diri mengunjungi usaha taninya, berupa budidaya melon. Usaha budidaya melonnya menggunakan sistem hidroponik.

"Alhamdulillah, Allah memberi kemudahan kepada saya dalam menjalankan usaha budidaya melon. Usaha ini sangat membantu ekonomi keluarga saya, khususnya tiga tahun terakhir. Dan, berkat usaha tani itu saya bisa lebih berkonsentrasi mengurus sekolah," cerita Muhtar kepada *Majelis* beberapa waktu lalu.

Meski menjadi petani lebih menguntungkan, namun Muhtar bertekad untuk terus mengabdikan dirinya sebagai pengajar. Ia ber-

usaha untuk tidak akan meninggalkan profesinya sebagai guru. Baginya, guru merupakan ladang amal yang pahalanya akan terus mengalir hingga liang lahat. Selain itu, kecintaannya terhadap dunia pendidikan sudah mendarah daging. Seperti kata pepatah: *Witing tresno jalaran soko kulino* (cinta terjalin karena kebiasaan).

Muhtar mulai terjun dalam dunia pendidikan, sejak 2004. Kala itu, anak kedua dari empat bersaudara pangan Rochmadi dan Alfiah ini ditawari menjadi guru, untuk menutupi kekurangan tenaga pengajar di MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul. Tanpa banyak fikir, Muhtar yang semula mengisi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah tersebut menerima tawaran itu. Dan, selanjutnya, dia ditugaskan menjadi guru kelas.

Sejak menjadi guru itulah Muhtar merasa tak sedikit menerima cobaan, mengganggu konsentrasinya dalam menjalankan tugas. Sebagai guru baru, Muhtar butuh penyesuaian dengan lingkungan tempat dia mengajar, tetapi cobaan langsung menghadang. Salah satu cobaan itu, ada seorang siswa yang dikenal nakal di sekolah tersebut





berkali-kali mencaci Muhtar dengan kalimat yang kasar.

Karena menyadari bahwa siswa itu memang badung maka Muhtar memilih untuk tetap bergeming alias tidak membalas cacian si siswa tersebut. Tapi, dia memilih melaporkan tindakan muridnya itu kepada kepala sekolah. Untungnya, setelah mendapat nasihat dari kepala sekolah, siswa badung itu akhirnya bisa mengerti. Dia tidak lagi mencaci maki gurunya, sehingga persoalan pun selesai.

Selain itu, suami Indriyati ini juga pernah bermasalah dengan siswa lain yang dikenal cukup terpendang, namun juga tak kalah nakalnya. Ceritanya, saat murid lain siap mengikuti pelajaran, ada siswa yang tetap asyik bermain. Muhtar mendorong siswa itu dengan maksud agar segera bergabung dengan siswa lain. Ternyata, anak itu malah terjatuh dan wajahnya membentur lantai, akibatnya satu giginya tanggal. Persoalan itu nyaris berbuntut panjang. Karena orangtua siswa hendak melaporkannya ke polisi. Untungnya persoalan itu dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Dari berbagai kasus yang dihadapinya itu, Muhtar dapat memetik pelajaran yang berguna. "Menjadi guru itu harus sabar atau *dawa ususe*. Tidak boleh gampang emosi, dan harus selalu ikhlas," katanya. Seorang guru, menurut Muhtar, harus memandang



anak didik seperti anak sendiri. Mereka harus disentuh dan diperlakukan dengan kasih sayang, laiknya orangtua kepada anaknya.

### Kehabisan Bensin

Selain masalah dengan muridnya, Muhtar juga pernah dicoba dengan kesulitan ekonomi. Saat itu, ia tidak memiliki uang sama sekali. Sampai-sampai untuk membeli bensin agar bisa mengajar pun tidak ada. Namun, kondisi itu tidak membuat Muhtar berkecil hati. Bagi Muhtar, mengajar bukan melulu mencari uang. Tetapi juga investasi buat masa depan, saat kembali keharibaan Allah SWT.

Berita Muhtar kesulitan keuangan itu ternyata sampai ke telinga kepala sekolah. "Kepala sekolah turun tangan, membantu saya sehingga bisa membeli bensin, dan saya bisa mengajar kembali," ceritanya.

Kesabaran Muhtar sebagai tenaga pendidikan kini sudah berbuah manis. Dia

termasuk salah seorang guru yang mendapat sertifikasi dari pemerintah. Praktis, dia kini bisa menafkahi dan mencukupi kebutuhan dua anak perempuan hasil pernikahan dengan Indriyati. Apalagi ditambah penghasilannya dari usaha tani, melon. "Penghasilan bertani melon lebih besar dari menanam padi di sawah," ujar Muhtar.

"Alhamdulillah anak-anak tidak pernah lagi merasa kekurangan, seperti yang pernah dialami bapaknya dulu. Mereka bisa belajar dan bermain, sama seperti teman-temannya," ungkap Muhtar.

Muhtar berharap, sekolah yang dipimpinnya bisa terus mengalami kemajuan. Kalau dulu ia ingin jumlah siswanya bertambah, kini yang dia harapkan adalah prestasi anak didiknya terus meningkat dari waktu ke waktu, sehingga bisa menjadi salah satu sekolah favorit di Purwojati, Banyumas. Semoga. □

MBO

**MPR  
RUMAH KEBANGSAAN  
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA  
DAN KEDAULATAN RAKYAT**







## Impian Indonesia Miliki Arena Balap Dunia

Ada bayangan untuk menginternasionalkan Indonesia bisa dicapai lewat pembangunan Sirkuit Sentul. Benar, selepas ada sirkuit, MotoGP digelar di sana. Di sirkuit hadir pembalap dunia, seperti Valentino Rossi, Max Biaggi, dan Michael Doohan.

Sayang, kemeriahan di Sentul karena dukungan penuh pemerintahan Soeharto. Setelah Soeharto tak berkuasa, di arena balap yang berada di tepi Tol Jagorawi itu senyap. Ada upaya untuk mengembalikan kejayaan Sirkuit Sentul.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**D**ITAHUN 1980-an, ketika disebut nama sentul, pikiran orang langsung tertuju pada pohon yang buahnya memiliki banyak khasiat. Khasiatnya, antara lain menurunkan demam, penangkal cacing gelang, obat kembung, sakit diare, dan penguat daya tubuh bagi ibu pasca melahirkan.

Ketika pada tahun 1990, Hutomo Mandala Putra melakukan peletakan batu pertama atau *groundbreaking* pembangunan sirkuit di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, nama sentul melesat. Sebuah nama yang melekat pada nama sirkuit yang dibangun di sana. Nama lengkapnya adalah Sirkuit Internasional Sentul (*Sentul International Circuit*).

Pembangunan sirkuit yang posisinya persis di samping jalan tol Jagorawi itu dirancang untuk menggantikan sirkuit yang sudah ada di Ancol, Jakarta Utara. Sirkuit di tepi Laut Jakarta itu dirasa sudah tidak memenuhi standar internasional, terlalu ekstrim. Fasilitas yang tak memadai di Ancol itu sehingga pembinaan para pembalap dalam negeri kurang maksimal, kurang terasah bakatnya, sehingga menjadi salah satu faktor penyebab pembalap hasil binaan di sana kalah bersaing dengan pembalap dari negara lain.

Namun, fasilitas yang kurang memadai di sirkuit Ancol itu bukan alasan utama sehingga

sirkuit Sentul dibangun. Ambisi agar Indonesia menjadi negara kedua setelah Jepang menjadi pemicu utama pembangunan sirkuit di Sentul. Jepang sebagai negara penghasil barang otomotif dunia, pada masa itu, adalah satu-satunya negara di Asia yang memiliki sirkuit yang berstandar paling tinggi.

Cita-cita besar Tommy Soeharto itu terinspirasi dari sirkuit Negara Sakura itu. Sebagai seorang pembalap atau penggemar olahraga otomotif, dan putera kesayangan Presiden Soeharto tentunya tak sulit untuk mewujudkan keinginannya itu. Dalam *indosport.com*, 12 Juni 2020, diceritakan bahwa Sirkuit Sentul dibangun atas usul Tommy Soeharto yang saat itu Ketua Umum



Tommy Soeharto

PB Ikatan Motor Indonesia (IMI). Ia didukung oleh Tinton Soeparto dan Tunky Ariwibowo.

Masih menurut *web* itu, Tommy mengatakan, alokasi dana pembangunan sirkuit dari organisasinya sendiri. Mengingat, saat itu mereka kesulitan mencari sponsor. "(Dana) dari kita sendiri (IMI), BP Ancol, juga dari Gaikindo. Tenaga desain lay out-nya dari FIA dan FISA yang disesuaikan dengan lahan yang ada," ungkap Tommy Soeharto. Karena Sirkuit Sentul dirancang untuk Formula-1 maka Tommy Soeharto merekrut desainer dari FIA dan FISA (federasi F1).

Maka, dipilihkan daerah Sentul menjadi lokasi pembangunan sirkuit, karena di sana saat itu tersedia lahan untuk itu. Selain itu, lokasinya tak jauh dari Jakarta. Dengan adanya tol Jagorawi, pastinya akses ke sana akan lebih singkat. Sentul berada di wilayah Bogor yang udaranya lebih segar dan sejuk dibanding dengan Jakarta dan kabupaten/kota sekitarnya.

Masalah iklim juga menjadi pertimbangan dalam pembangunan sirkuit di Sentul. Bogor yang berada di daerah tropis, di mana matahari setiap hari bersinar terang, bahkan terik. Bisa jadi menjadi tantangan bagi sirkuit internasional di Indonesia, di mana pembalap-pembalap dunia terbiasa dengan iklim atau suhu yang dingin, di bawah sejuk.

Rupanya masalah suhu tidak menjadi masalah. Buktinya pembangunan sirkuit di Sentul terus berlangsung. Agar memenuhi





standar internasional maka proyek pembangunan melibatkan *The Federation Internationale de l'Automobile* (FIA). John Corsmit yang saat itu menjabat sebagai FIA *Safety Agency* menjadi pengawas proyek.

Dari sumber yang ada disebut sirkuit didesain sebagai *fast category circuit* agar mobil mobil Formula-1 dapat melaju kencang tanpa hambatan. Fasilitas yang dimiliki saat itu sudah lebih dari cukup untuk menggelar balapan Formula-1.

Dalam *kompas.com*, 7/09/2015, dipaparkan, karakter Sirkuit Sentul adalah *trek* yang halus dan luas, tapi relatif sederhana. Total panjang trek 4,12 km dengan menyuguhkan 11 tikungan. *Trek* dibuat non-bergelombang guna mendapatkan kecepatan tertinggi saat

*Sentul Akan Rampung Sepekan Sebelum Peresmian*, diceritakan seluruh pekerjaan pembangunan Sirkuit Sentul diharapkan rampung sepekan sebelum peresmian yang menurut rencana dilakukan Presiden Soeharto pada 22 Agustus. Perkembangan terakhir dari pembangunan sirkuit di atas tanah seluas 72,2 hektar yang terletak di Sentul ditinjau Mensesneg Moerdiono. Dalam pertemuan dengan Moerdiono yang untuk kedua kalinya meninjau sirkuit itu, Dirut PT. Sarana Sirkuitindo Utama, pengelola, Tinton Soepranto, mengikutsertakan seluruh pejabat dari instansi terkait yang berperan dalam pembangunan sirkuit megah itu. Hadir dalam pertemuan, Pemerintah Jawa Barat, Perhutani, Badan

sekitar jalan masuk ke sirkuit. “Terutama jalan masuk dan keluar mobil, jangan sampai terjadi kemacetan yang dapat meresahkan masyarakat,” katanya.

Hal-hal “kecil” seperti kesiapan ambulans, termasuk dokter yang bertugas, penutupan jalan dan akibatnya terhadap warga setempat tak luput dari perhatian Moerdiono. “Hal-hal yang tampaknya kecil, perlu mendapat perhatian karena kalau tidak bisa menimbulkan kesulitan besar,” katanya.

Soeparto Suyatmo, Sekjen IMI Pusat yang bersama Dolly Indra Nasution duduk dalam badan olahraga bermotor dunia FIA mewakili Indonesia, mengatakan, sampai saat ini seluruh pekerjaan telah rampung sekitar 80%. “Layak tidaknya sirkuit ini untuk



**Moerdiono dan Presiden Soeharto**



**Tinton Soepranto**

balapan. Sirkuit ini memiliki 900 meter *trek* lurus utama yang memungkinkan kecepatan mencapai angka 300 kpj, sebelum melambat bertemu dengan tikungan pertama (*Turn 1*) ke kanan.

Satu-satunya sudut tercepat di Sentul ada di *Turn 2*. Pembalap mobil bisa melibas tikungan ini pada kecepatan 220 kpj, sedangkan motor mencapai 190 kpj. Para pembalap bisa memanfaatkan tikungan kedua untuk mendapatkan kecepatan, dengan sudut lebar yang memungkinkan menyalip dari berbagai jalur balap.

Setelah melalui proses pembangunan, akhirnya pada 22 Agustus 1993, sirkuit Sentul diresmikan oleh Presiden Soeharto. Dalam *soeharto.co* yang berjudul *Sirkuit*

Pertanahan Nasional, PU, Jasa Marga, PAM, PT Telkom, PLN, dan Tommy Soeharto selaku Komisararis Utama PT. Sirkuitindo.

Dalam pertemuan, Moerdiono banyak menyinggung segi teknis persiapan, pengamanan, kelancaran lalu lintas sekitar sirkuit pada hari pembukaan dan peranan sirkuit bertaraf internasional itu dalam usaha lebih memperkenalkan Indonesia di dunia internasional. “Usaha yang telah dilakukan langsung atau tidak langsung akan membuat Indonesia lebih dikenal di luar negeri, dan akan berpengaruh positif terhadap pembangunan”, katanya. Ia mengharapkan, upacara peresmian dan pertandingan yang akan mengundang banyak penonton jangan sampai mengganggu kelancaran lalu lintas

kejuaraan dunia akan ditentukan wakil-wakil FIA yang akan melakukan pengecekan terakhir selama tiga hari, sejak 28 Juli nanti,” katanya.

Selesai tanya jawab, Moediono bersama rombongan menggunakan dua bus berkeliling mengitari sirkuit sepanjang 1.600 meter itu. (*T/OKI 0/21:28/OK04/22/07/93 22:28*), *Antara* (22/07/1993).

Selepas diresmikan, ambisi Tommy Soeharto untuk menjadikan Sirkuit Sentul sebagai sirkuit internasional kedua di Asia setelah Jepang, dan sebagai ajang balapan Formula-1 menjadi tercapai. Data yang ada di sirkuit itu adalah: panjang lintasan 4,02 km, lebar 15 meter, trek lurus terpanjang 900 meter, 11 tikungan, 50 garasi pit, dan 2



Michael Doohan

tribun tertutup. Selepas pembukaan Sirkuit Sentul berbagai balapan internasional berhasil digelar di Sentul. Selepas pembukaan ada *Indonesia Grand Prix Formula Brabham Racing* atau *Formula Holden*. Balapan itu disebut sebagai demonstrasi.

Nama Sirkuit Sentul pada tahun 1996 dan 1997 atau tiga tahun setelah dibuka secara resmi sudah mendunia. Pada tahun-tahun itu, Sirkuit Sentul menjadi bagian dari rangkaian balap MotoGP meski pada saat itu masih disebut GP500. Hadir dalam rangkaian MotoGP pembalap seperti Michael Doohan, Max Biaggi, Valentino Rossi, dan Tadayuki Okada. Pada MotoGP tahun 1996, Michael Doohan (pemenang di Kelas Utama 500cc); Tetsuya Harada (pemenang di Kelas 250 cc); dan, Masaki Tokudome (juara di Kelas 125 cc). Pada saat itu, Valentino Rossi sudah ikut, namun posisinya berada pada urutan 11. Ini merupakan langkah maju, sebab Rossi saat mengawali debutnya pada posisi 18.

MotoGP pada tahun 1997, Tadayuki Okada, juara di Kelas 500 cc; Max Biaggi, juara di kelas 250 cc; dan Valentino Rossi, juara di Kelas 125 cc. Di Sentul inilah Rossi mencatatkan diri sebagai kali pertama juara dunia.

Krisis moneter yang membuat jatuhnya Presiden Soeharto sangat memengaruhi keberadaan Sirkuit Sentul. Hingar bingar di sana seolah-olah tak terjadi setelah kekuasaan Soeharto berakhir. Redupnya Sirkuit Sentul tak hanya karena tak ada lagi dukungan yang kuat padanya, namun juga

karena hadirnya Sirkuit Sepang Malaysia. Sirkuit Sepang yang hadir di tahun 1999 dengan desain dan model yang lebih canggih dan benar-benar memenuhi standar internasional, serta di sana sudah digelar rangkaian MotoGP, Formula-1, A1, dan balapan internasional lainnya, membuat Sirkuit Sentul semakin *nyungsep*.

Pada tahun 1993, Sirkuit Sentul sebenarnya masuk dalam sirkuit yang berlisensi *grade 1*. *Grade* ini merupakan *grade* tertinggi sehingga memenuhi syarat untuk digelar balapan Formula-1. Namun, karena lama tidak digelar berbagai macam balapan internasional, serta adanya perubahan standar sirkuit internasional, membuat Sirkuit Sentul turun *grade*, menjadi *Grade 4*.

Upaya mendongkrak Sentul sebagai sirkuit internasional pun terus dilakukan. Di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada tahun 2006, digelar A1 Grand Prix atau A1GP dan yang lebih populer disebut A1. Ini merupakan ajang balap mobil internasional. A1GP beda dengan Formula-1. Bila Formula-1 tim dibiayai atau disponsori oleh swasta, maka A1 dibiayai oleh negara. Dari digelarnya A1 di Sirkuit Sentul membuat *grade* sirkuit yang awalnya berada *Grade 4* naik menjadi *Grade 2*. Kalau sudah berada di *Grade 2* maka sirkuit ini bisa menggelar balapan Formula, namun sebatas ujicoba. □

AWG/dari berbagai sumber



FOTO-FOTO: ISTIMEWA





# Gara-Gara Sirkuit Suzuka dan Sepang

Sirkuit Sentul dibangun karena terinspirasi dari Sirkuit Suzuka. Indonesia ingin menjadi negara kedua di Asia yang memiliki sirkuit internasional setelah Jepang. Hadirnya Sirkuit Sepang di Malaysia membuat keberadaan Sirkuit Sentul semakin tenggelam. Sirkuit Sepang yang lebih modern dan Malaysia berani bayar fee yang tidak murah membuat MotoGP dan Formula-1 rutin digelar di sana. Penggemar balap mobil dan motor di Indonesia pun berduyun-duyun ke Sepang.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**J**EPANG merupakan negeri yang hebat di dunia. Setelah kalah Perang Dunia II pada tahun 1945, di mana negerinya hancur lebur diluluhlantakkan bom atom yang dijatuhkan Pasukan Sekutu di Hiroshima dan Nagasaki, namun negeri itu pada tahun 1962 sudah membuka Sirkuit Internasional Suzuka (*Suzuka International Racing Course*).

Sirkuit yang berlokasi di Prefektur Mie, Suzuka, itu dirancang oleh John Hugenholtz. Sebagai sirkuit internasional pertama di Asia,

Suzuka mampu menampung jumlah penonton hingga 155.000 orang. Sirkuit yang memiliki 18 tikungan dan panjang 5,807 km untuk Grand Prix ini bukan milik pemerintah Jepang, namun milik perusahaan otomotif Honda Motor Co., Ltd.

Dalam *banjarmasin.tribunnews.com*, 24 Oktober 2016, *Ini Kisah Mengharukan di Balik Pembangunan Sirkuit Suzuka*, diceritakan General Manager Driving Safety Promotion Center Honda Motor Co., Ltd;



Sirkuit Motegi

Yoichi Harada, sebelum pembangunan Sirkuit Suzuka, di Jepang angka kecelakaan dan kematian tinggi. Kecelakaan dan kematian itu menjadi isu besar di negeri matahari terbit itu. Masalah ini membuat pendiri Honda, Sichiyo Honda, menginginkan ada tempat tes khusus, pelatihan olahraga balap, dan keselamatan berkendara di Jepang.

Pada masa itu, di tahun 1950-an, Honda merupakan industri otomotif unggulan di Jepang. Namun, meski sebagai perusahaan besar, dari segi keuangan mereka masih kecil. Alasan inilah yang membuat bank tidak mau memberi pinjaman ketika hendak membangun sirkuit. Agar bank mau memberi pinjaman, co-founder Takeo Fujisawa menjadikan rumahnya sebagai jaminan kepada bank.

Sebagai sirkuit pertama di Asia yang dipercaya oleh badan otomotif dunia untuk menyelenggarakan balap motor dan mobil, Suzuka sejak tahun 1962 sudah menggelar berbagai macam kejuaraan otomotif, seperti *Suzuka 8 Hours*, *World Touring Car Championship*, *NASCAR*, *Super GT*, *Super Formula*, *MJF Superbike*, *D1 Grand Prix*, dan *Super Taikyu*. Sejak tahun 1987, Suzuka tidak pernah absen menjadi tuan rumah balapan Formula-1.

Sirkuit Suzuka tidak sekadar menjadi ajang olahraga balapan motor dan mobil. Di sirkuit ini dan sekitarnya ada wahana rekreasi dan jalan-jalan bagi para wisatawan. Jadi, meski tidak ada kegiatan di jalur balap, wisatawan bisa berkunjung ke sana untuk menikmati wahana yang lain. Di Suzuka ada taman bermain *Amusement Park Motopia*. Ada pula *Water Park*, *Hot Spring*, *Backyard Tour*, *Racing Theater*, dan *Traffic Education Center*. Bila mau menginap di sana juga ada hotel serta restoran.

Seiring perjalanan waktu, rupanya sirkuit

ini menjadi sirkuit maut. Sebutan ini di- sematkan padanya, sebab kerap terjadi kecelakaan yang membuat pembalap meninggalkan dunia. Tercatat, ada 17 pembalap meninggal saat kecelakaan di sana.

Pada tahun 2003, saat berlangsung sesi latihan bebas MotoGP, pembalap motor dari Jepang, Daijiro Kato, mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia. Kejadian itu bermula saat dirinya mengalami *highside* ketika ingin keluar sektor 340R. Dengan kecepatan 200 km/jam, Kato menabrak dinding pembatas sirkuit. Saat mengalami kecelakaan, si pembalap ini masih bisa ditolong, namun dua pekan kemudian dia menghembuskan nafas terakhir.

Pembalap dunia pun penasaran untuk mencoba Sirkuit Suzuka.

### Sirkuit Sepang

Harus diakui dalam soal pembangunan sirkuit sebenarnya Indonesia lebih dahulu dibanding Malaysia. Negeri jiran tersebut biasanya membangun sesuatu setelah di Indonesia ada. Demikian pula soal sirkuit. Setelah Indonesia memiliki Sirkuit Sentul dan menjadi perhatian dunia pada tahun 1996 dan 1997, Malaysia tak mau ketinggalan.

Di tahun 1997, di lahan seluas 260 hektar, 45 km dari Kuala Lumpur atau tepatnya di Sepang, Selangor; Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad

sehingga kegiatan balapan menjadi lebih menarik, sebab pembalap bisa menyalip dan bermanuver.

Agar suasana Sirkuit Sepang menjadi lebih hidup sepanjang waktu maka di kompleks sirkuit ada fasilitas hotel, pusat perbelanjaan, lapangan golf, dan sarana olahraga lainnya.

Setelah berproses, pada tahun 1999, tepatnya tanggal 7 Maret, Mahathir Mohammad meresmikan sirkuit yang memiliki atap tribune berbentuk bunga hibiscus itu. Sirkuit Sepang merupakan salah satu proyek raksasa Mahathir Mohammad. Selain Sirkuit Sepang, proyek raksasa lainnya adalah Menara Petronas dan Pusat Pemerintahan Putrajaya.

Nah, begitu Sirkuit Sepang sudah membentang, di sana setiap tahun rutin digelar berbagai lomba balap, baik motor maupun mobil. Keberadaan Sirkuit Sepang lebih diterima di dunia internasional dibanding dengan Sirkuit Sentul, sebab Sirkuit Sepang baru dan pastinya memiliki standar yang lebih maju. Selain itu, Malaysia berani bayar *fee* yang tidak murah agar tercatat menjadi bagian seri berbagai macam balapan.

Bila di Sentul belum pernah digelar balapan Formula-1, di Sepang sejak sirkuit itu dibuka hingga tahun 2017, setiap tahunnya kegiatan itu rutin digelar. Formula-1 yang ada di Sepang itulah yang bisa menghadirkan pembalap kesohor, seperti Michael Schumacher, Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, dan lainnya.

Tak hanya Formula-1 menggelinding di sana. A1 dan MotoGP pun *ajeg* berlangsung di Sepang. Bagi pembalap MotoGP Valentino Rossi, Sepang merupakan sirkuit yang tak bisa dilupakan dalam hidupnya. Di sana, ia enam sampai tujuh kali menjadi juara.

Jarak yang dekat dan bebas visa inilah yang membuat penggemar balap mobil dan motor di Indonesia selalu berduyun-duyun ke Sepang bila di sana ada rangkaian serie. Kehadiran para penggemar balap ke Malaysia dari berbagai negara, pastinya membawa keuntungan bagi Malaysia. Jutaan ringgit dibelanjakan selama ada acara internasional di Sepang. □

AWG/dari berbagai sumber



Sirkuit Sepang

Kejadian yang menimpa Kato itulah yang membuat Suzuka tidak lagi dijadikan ajang balapan MotoGP. Selanjutnya, MotoGP digelar di Sirkuit Motegi.

Apa yang dialami Kato juga menimpa Jules Bianchi. Pada tahun 2014, pembalap Formula-1 asal Perancis dari Tim Marussia itu mengalami kecelakaan hingga akhirnya meninggal dunia. Dari beberapa kecelakaan yang terjadi di Suzuka, kisah Kato dan Bianchi yang menyita perhatian dunia.

Meski Sirkuit Suzuka dianggap memiliki tikungan maut dan membuat kerap terjadi kecelakaan sampai ditutup untuk kejuaraan MotoGP, namun di sana masih dijadikan berbagai jenis balapan yang lainnya.

meletakkan batu pertama pembangunan sirkuit, yang selanjutnya disebut dengan Sirkuit Internasional Sepang (*Sepang International Circuit*).

Desain sirkuit ini dirancang oleh *desainer* asal Jerman, Hermann Tilke. Tilke merupakan *desainer* yang berpengalaman. Sudah banyak sirkuit di dunia digarapnya, seperti di Shanghai, Sakhir, Istanbul, Valencia, Marina Bay, Yas Marina, Yeongam, Buddh, Cota, dan Baku. Beda dengan sirkuit yang sudah dibangun di kota-kota itu, di Sepang Tilke membangun sirkuit dengan panjang lintasan 5,543 km, 15 tikungan, dan 2 trek lurus panjang. Jalur trek yang dirancang *desainer* dari negeri Panzer itu lebar





# Balap MotoGP Pendongkrak Wisata Lombok

Untuk mempromosikan potensi wisata yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pemerintah hendak menggelar MotoGP di sana. Sirkuit Mandalika dibangun untuk menjadi arena balap motor dunia.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**S**AAT ini pemerintah terus mendorong potensi alam dan budaya yang tersebar di seluruh Indonesia untuk dikembangkan menjadi tujuan wisata berkelas dunia. Keindahan alam (*nature*) dan budaya (*culture*) dianggap kurang sempurna untuk mengembangkan potensi yang ada menjadi tujuan wisata, perlu unsur *man made* (buatan manusia) untuk melengkapi. Menurut Direktur *Indonesia Tourism Development Corporation* (ITDC), Abdulbar M. Mansoer, dalam *motorplus-online.com*, 8 April 2019, mengatakan di pariwisata ada tiga istilah. Sebuah destinasi harus ada *nature* (alam), *culture* (budaya), dan *man made* (buatan manusia). Untuk mendongkrak potensi wisata yang ada Lombok, Nusa Tenggara Barat, harus ditambah dengan infrastruktur *man made* yang bersifat kelas dunia. Mandalika, Lombok, merupakan satu di antara pengembangan potensi wisata premium dengan sebutan *10 Bali Baru*.

"Dari situlah masuk ke MotoGP. Itulah awal-

awalnya kami masuk ke MotoGP," ujar Abdulbar dalam *motorplus-online.com*. Jadi, pendekatan kami lebih kepada *tourism*. Karena MotoGP ini adalah ajang balap paling terkenal di dunia dengan 400 juta pemirsa, 30 juta *followers*, jadi kita arahkan ke sana.

Paparan di atas menjadikan kita tahu

mengapa MotoGP diselenggarakan di Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Bukan di Sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Pada Oktober 2021, Sirkuit Mandalika akan menjadi penyelenggara MotoGP. Sejah mana kesiapan sirkuit yang berada di tepi







Zulkieflimansyah

laut itu? “Sudah 60% (progres pembangunan sirkuit). Bahkan kita yakin, Juni selesai semua”, ujar Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah, 25 Maret 2021 (*suarantb.com*, 26 Maret 2021). Mantan anggota DPR dari Fraksi PKS itu optimistis pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika tuntas pada Juni 2021. Dia yakin Sirkuit Mandalika sangat layak untuk arena balap MotoGP. “ITDC yakin, sangat layak. Tinggal dilihat kesiapan kita apakah mampu mengelola penonton demikian besar di tengah pandemi ini”, tuturnya.

Sirkuit Mandalika pada tahun ini direncanakan tidak hanya menjadi ajang balap MotoGP, namun juga *World Superbike Championship* (WSBK). “Pada November digelar WSBK”, ujarnya. “*Superbike* penyelenggaranya sama, Dorna juga. Artinya, Dorna sudah melihat bahwa kita sangat mungkin menyelenggarakan event itu”, tandasnya seperti dikutip dari *suarantb.com*.

Sirkuit Mandalika merupakan sirkuit jalan raya pertama di dunia untuk ajang MotoGP. Panjang lintasan di sirkuit ini 4,31 kilometer dengan jumlah tikungan sebanyak 17. Sirkuit ini mampu menampung penonton sebanyak 150.000 orang. Di dalam arena sirkuit ada dua bukit, nah di dua gundukan tanah yang menjulang itu juga dipersiapkan untuk para penonton. Dua bukit itu mampu menampung penonton sebanyak 30.000 orang.

Dalam *kompas.com*, 29/11/2019, disebutkan pembangunan Sirkuit Mandalika menyerap 7.500 pekerja, 300 orang berasal

dari putra daerah sebagai staf teknis. Anggaran tahap awal konstruksi bangunan sirkuit mencapai Rp 500 miliar. Ongkos penyelenggaraan satu kali perhelatan MotoGP sebesar Rp 9 juta Euro yang akan dibayarkan menjelang balapan.

Rampungnya Sirkuit Mandalika dan digelarnya MotoGP di sana pastinya ditunggu-tunggu oleh para penggemar olahraga otomotif di tanah air. Made Pariwijaya, *Head Operational The Mandalika*, mengatakan, estimasi penonton yang menyaksikan MotoGP di Sirkuit Mandalika mencapai 160 ribu orang. “Dengan catatan bahwa pandemi Covid-19 berakhir”, ujarnya dalam *bisnis.tempo.co*, 18 Desember 2020. Bila pandemi masih berlangsung diperkirakan jumlah penonton di angka 114 ribu orang.

Dari jumlah penonton sebanyak itu, pihak terkait yang berada di sana telah menyediakan penginapan atau hotel sebanyak 14.000 kamar. Bila kekurangan kamar karena lonjakan penonton, diantisipasi dengan menyediakan lokasi *camping ground*, desa wisata untuk penyediaan *home stay* dan berkoordinasi dengan PT Pelni untuk menyediakan penginapan terapung menggunakan kapal yang di sulap menjadi penginapan.

Selama pelaksanaan MotoGP, peredaran uang diperkirakan mencapai Rp260 miliar. Jumlah tersebut di luar sponsor serta hak siar. Angka itu diperoleh dari estimasi bila satu orang menghabiskan US\$ 100 dollar maka jumlah uang yang beredar mencapai Rp260 miliar. □

AWG/dari berbagai sumber



FOTO-FOTO: ISTIMEWA





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

## Mohammad Yamin Lahay

Dirut PT. Harvest Gorontalo Indonesia

### Produk Daerah Butuh Dukungan Pemerintah

**S**EBENARNYA banyak sekali daerah yang berpotensi besar memiliki produk-produk asli daerahnya yang tak kalah dengan negara lain. Seperti di Gorontalo, kami memproduksi herbal asli bikinan anak-anak daerah, dan diakui secara global seperti di Amerika Serikat, Cina, dan negara-negara Asia lainnya.

Yang menjadi kendala, sepertinya ada dalam diri masing-masing, tidak percaya diri, selalu menganggap negara luar lebih hebat. Untuk itulah saya mendorong daerah-daerah di Indonesia untuk memaksimalkan potensi daerahnya, percaya dirilah tentunya diimbangi dengan ketekunan, keseriusan, dan tidak main-main

Saya rasa, pemerintah daerah perlu mendukung penuh dengan memberikan akses perizinan, penelitian atau ekspor. Ketika, produk yang dihasilkan anak-anak daerah itu berhasil mencapai prestasi dengan penjualan yang bagus, dampaknya pasti pulang juga ke daerah, dan daerah tersebut juga akan ikut menjadi terkenal.

Makanya, saya berharap, pemerintah mesti memberikan perhatian lebih kepada upaya-upaya menggali produk-produk daerah. Dengan begitu, lambat laun negara Indonesia akan bergantung dan cinta kepada produk dalam negerinya sendiri, sehingga kita mampu bersaing dengan negara maju. □

DER

## Ust. Arifin Ali

Ketua Taman Pengajian Al Furqon Dungi

### Bangga Dikunjungi Pejabat Negara

**S**EBAGAI rakyat kebanyakan, saya sangat mengapresiasi perhatian pejabat negara mengunjungi kami di pelosok daerah, seperti dilakukan oleh Pimpinan MPR, Fadel Muhammad, yang menyambangi kami, Taman Pengajian kecil.

Kedatangan pejabat negara sangat berarti sehingga mereka dapat memahami keadaan rakyat di pelosok desa atau kampung, dan rakyat menjadi merasa sangat diperhatikan. Dan, yang terpenting pejabat negara secara langsung bisa mendengar keluh kesah, keinginan, pengharapan rakyat secara langsung.

Saya berharap, kegiatan pejabat ke daerah-daerah, menyambangi rakyat mesti menjadi program tetap dan terus dipertahankan serta ditingkatkan. Selanjutnya apa yang menjadi keinginan, harapan rakyat, jangan hanya ditampung saja tapi harus ditindaklanjuti hingga menjadi kenyataan. □

DER



## Agar Sekolah Kami Tidak Roboh

Satu tahun lebih dunia dikungkung pandemi Covid-19. Dampak pandemi menyentuh seluruh sendi kehidupan manusia. Masa depan generasi muda saat ini terancam, sudah lama anak-anak tidak mengikuti proses belajar mengajar secara normal, di sekolah. Mereka tidak hanya kehilangan fase pertumbuhan kecerdasan, namun juga terancam putus sekolah dan terlibat kegiatan kriminal. Ada keinginan untuk segera membuka kembali sekolah agar anak-anak bisa tumbuh dalam lingkungan yang semestinya. Ketika pandemi masih terjadi dan sekolah hendak dibuka, lalu bagaimana mengatasi kekhawatiran itu? Berikut suara wakil rakyat yang membidangi masalah itu:

**Syaiful Huda** Anggota MPR Fraksi PKB

### Kita Dukung Sekolah Dibuka Kembali

**S**ESUNGGUHNYA pembukaan sekolah tatap muka ini sudah dibuka sejak awal Januari 2021 melalui SKB 4 Menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama. Lalu sudah berapa banyak sekolah yang memanfaatkan SKB 4 Menteri itu? Tidak banyak. Saya malah mengapresiasi pemerintah daerah yang hati-hati untuk mengambil kebijakan terkait dengan pembelajaran tatap muka. Kewenangan pembukaan sekolah ada di pemerintah daerah dan orang tua siswa.

Apakah ada keserentakan secara nasional dalam pembelajaran tatap muka ini? Jawabannya tidak ada, sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah dan orang tua siswa. Ketika orang tua siswa tidak setuju anaknya sekolah maka sekolah wajib menyelenggarakan dengan metode pembelajaran jarak jauh.

Dalam SKB 4 Menteri, aturan yang ada memastikan bahwa semua dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, seperti kapasitas kelas terisi 50%. Ketersediaan protokol kesehatan, seperti tempat cuci tangan, sabun, masker, dan lainnya sepenuhnya menjadi beban sekolah.

Bila sekolah dibuka kembali pada Juli 2021 maka ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Prinsip itu adalah: *pertama*, hukum tertingginya keamanan dan keselamatan siswa harus diutamakan. Hal ini tidak boleh ditawar-tawar. Semua harus tunduk pada konteks ini.



*Kedua*, apakah kita setuju Juli dibuka pembelajaran tatap muka? Kami di Komisi X DPR sudah membahas masalah ini dan menarik kesimpulan atas nama ketua komisi, kita ada pada posisi mendukung siswa kembali ke sekolah. Pertimbangannya, selama tidak sekolah atau menempuh pembelajaran jarak jauh kita harus jujur mengakui, anak-anak sudah kehilangan proses pembelajaran. Beberapa survei menyebut sudah terjadi *lost learning*. *Lost learning* sudah terjadi satu tahun setengah. Berdasarkan survei, pembelajaran jarak jauh efektivitasnya tidak lebih dari 30%. Saat di rumah, tidak semua orang tua bisa berposisi menggantikan peran guru. Orang tua yang bisa menggantikan guru hanya sekitar 30%. Sedang 70%, orangtua tidak bisa meng-

gantikan peran guru di rumah.

Sisi belajar di rumah tak hanya efektifitasnya hanya 30%, namun ada juga dampak yang lain, yakni di masa pandemi membuat orangtua mereka mengalami kesulitan ekonomi sehingga membuat anak-anak ikut bekerja guna membantu orang tua dengan bekerja serabutan. Bila anak-anak tidak secepatnya kembali ke sekolah, saya membayangkan persentase anak putus sekolah akan meningkat. Mereka tidak mau lagi ke sekolah, sebab sudah merasakan enaknya bekerja, meski serabutan, sudah menikmati dapat duit karena membantu orang tuanya bekerja. Ini menjadi catatan penting kenapa kami mendukung supaya pembelajaran tatap muka dibuka kembali. Juli, menurut saya, merupakan momentum bagi



anak-anak atau siswa untuk mendapatkan suasana belajar di sekolahnya lagi.

Saat ini ada problem psikologis bahwa anak-anak sudah tidak merasa lagi jadi siswa, tidak lagi merasa jadi pelajar, dan ini banyak terjadi di berbagai daerah. Saya menyebutnya ada situasi sosial di mana anak-anak tidak mendapat pantauan dari guru. Sedang orang tua sekarang lagi sibuk mencari mata pencaharian baru karena di-PHK, yang berdagang sudah tidak bisa berdagang lagi. Akibat anak-anak tidak berada di sekolah juga menimbulkan dampak negatif lainnya, seperti berkontribusi terjadinya tawuran, terlibat aksi kriminal. Ini

bisa terjadi karena mereka sudah merasa bukan pelajar lagi dikarenakan lama tidak bersekolah.

Untuk itu, sekali lagi semangatnya adalah mengembalikan psikologi anak bahwa dia pelajar dan mengembalikan suasana sekolah di dalam hati anak-anak. Perlu dilakukan bila membuka kembali sekolah: *pertama*, vaksinasi 5 juta guru wajib dituntaskan oleh pemerintah. Bila ini tidak dituntaskan, jangan ada pembukaan. *Kedua*, protokol kesehatan wajib diadakan di sekolah. *Ketiga*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan di daerah perlu bekerja sama secara maksimal dengan sekolah. Me-

mastikan bahwa Juli sekolah siap. Sebelum sekolah dibuka kembali, paling tidak sudah tiga kali melakukan simulasi. Jangan sampai tidak ada simulasi. Ukuran kesiapan di mata saya adalah kesediaan sekolah melakukan simulasi. Jangan sampai hari-H di Juli tahun ajaran baru dibuka sementara siswa langsung masuk sekolah dan tidak ada simulasi, itu memiliki resikonya yang besar.

Tak kalah penting adalah peran orang tua yang memastikan anaknya, sejak berangkat dari rumah ke sekolah dan pulang dari sekolah, anak mereka dalam suasana tetap mematuhi protokol kesehatan. □

AWG

**Kurniasih Mufidayati** Anggota MPR Fraksi PKS

## Perlu Dikaji Secara Mendalam

**K**ITA merencanakan bagaimana bila pembelajaran tatap muka dilaksanakan, sementara saat ini sedang membahas mitigasi pandemi Covid-19. Setahun pandemi, sedang dibahas mitigasi yang masih banyak tantangan dan perlu diperbaiki. Satu tahun sudah kita evaluasi dan sejumlah catatan dalam mitigasi pandemi Covid-19 dari semua pihak perlu keterpaduan regulasi dan mencari solusi yang semua bisa terintegrasi antarsektor, yang di dalamnya ada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan yang lainnya. Antarsektor jangan dikonfrontir, namun harus disinergikan dan diselaraskan menjadi satu titik temu.

Bila ingin melakukan pendidikan tatap muka, saya rasa banyak hal yang harus dipertimbangkan dan dikaji, khususnya vaksinasi. Vaksinasi kepada para guru kan belum selesai. Tahap pertama saja belum selesai, belum lagi soal kemanjuran vaksinnya. Komisi X DPR dalam masalah pendidikan di masa pandemi tetap mengutamakan kesehatan. Kesehatan harus menjadi pondasi utama dalam mengambil kebijakan di semua sektor, salah satunya dalam sektor pendidikan.

Kita sangat menyadari bahwa anak-anak saat ini kehilangan satu tahap fase perkembangan pendidikan yang di masa normal



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

mereka berinteraksi sosial dengan teman-temannya di sekolah dan melakukan pembelajaran langsung dengan guru. Dampak pandemi ini sangat besar pengaruhnya pada mereka.

Bila pembelajaran jarak jauh metode *dar-ing* bisa di-up grade atau ditingkatkan, maka hal itu bisa membuat lebih baik. Mudah-mudahan anak-anak Indonesia tidak tertinggal dari sisi kualitas pendidikan. Hal ini menjadi evaluasi secara keseluruhan dalam mitigasi pandemi Covid-19.

Namun, apakah sudah memungkinkan dilakukan pembelajaran tatap muka? Saya rasa ini perlu dikaji lebih dalam lagi, karena

meski para guru sudah vaksin dan memiliki kekebalan, lalu bagaimana dengan siswanya. Jumlah siswa lebih banyak daripada jumlah gurunya. Jumlah siswa kan tidak bisa dimonitor karena mereka datang dari berbagai macam kluster keluarga. Mereka tinggal di tempat yang berbeda, sehingga hal ini harus benar-benar dikaji secara mendalam, detail. Kita berharap, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bisa berkoordinasi secara intensif dengan Menteri Kesehatan, agar kebijakannya benar-benar terintegrasi antara sudut pandang kesehatan dan sudut pandang pendidikan. □

AWG

## Sosialisasi di Kabupaten Cianjur

# Para Santri adalah Pancasilais dan **Loyal** Kepada Empat Pilar



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR Dr. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA., melakukan serangkaian sosialisasi Empat Pilar MPR di Kabupaten Cianjur pada 18 – 20 Maret 2021. Pada Jumat pagi, 19 Maret 2021, Syarif Hasan menyampaikan sosialisasi Empat Pilar MPR kepada santri di Pondok Pesantren Assuyuthiyah, Kec. Cilaku, Kab Cianjur.

Pada siang harinya, sosialisasi dilanjutkan ke Pondok Pesantren Yaa Bunayyah Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Pada Sabtu, 20 Maret 2021, Syarif Hasan menyampaikan sosialisasi Empat Pilar MPR kepada para siswa Yayasan Al Ikhlas Bina Insan Mandiri (YABIN) dan para orangtua siswa di Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur.

Dalam sosialisasi kepada santri di Pondok Pesantren Assuyuthiyah, Syarif Hasan menyebutkan, para santri sudah memahami Empat Pilar MPR. Ini dibuktikan saat para santri bisa menyebutkan dengan tepat masing-masing pilar dari Empat Pilar MPR, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Apa itu Empat Pilar MPR?” tanya Syarif Hasan, sapaan Sjarifuddin Hasan. Para santri pun menjawab serentak masing-masing pilar dari Empat Pilar MPR. “Ini menunjukkan para santri sudah memahami Empat Pilar MPR,” ujar Syarif Hasan.

Syarief Hasan kemudian menjelaskan tentang lembaga MPR RI. Sebelum reformasi atau sebelum amendemen UUD 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Tetapi, setelah perubahan UUD 1945 yang dilakukan 1999 - 2002, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi. MPR menjadi lembaga tinggi negara yang sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya, seperti DPR, DPD, Lembaga Kepresidenan, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Hasil amendemen UUD 1945, MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan lembaga tinggi negara. Kewenangan dan tugas MPR di antaranya melantik presiden dan wakil presiden terpilih, dan tugas menyosialisasikan Empat Pilar MPR,” jelasnya.

“Dulu namanya adalah Empat Pilar Kebangsaan, tapi sekarang namanya Empat Pilar MPR, yaitu Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Semua anggota MPR menyosialisasikan Empat Pilar MPR,” sambungnya.

Kepada para santri, Syarif Hasan mengingatkan bahwa masa depan bangsa berada di pundak generasi muda saat ini. Karena itu, dia minta para santri untuk memanfaatkan waktu dengan menimba





ilmu. "Saya sangat mengharapkan para santri untuk memanfaatkan waktu dengan menuntut ilmu," harapnya.

Selain itu, Syarief Hasan juga meminta para santri menggunakan hak pilihnya pada pemilu mendatang. "Sebagai warga negara, pergunakan hak pilih untuk kepentingan bangsa. Pilihlah pemimpin sesuai hati nurani," pintanya.

Dalam sosialisasi Empat Pilar MPR ini hadir Pimpinan Pondok Pesantren Assuyuthiyah K.H. Ferry Nur El Firdaus dan Staf Ahli Wakil Ketua MPR Jafar Hafsah. Selanjutnya, dalam sosialisasi itu, Jafar Hafsah menjelaskan lebih lanjut tentang Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

#### **Pesantren Tempat Mencetak SDM Berintegritas**

Pada siang harinya, Syarief Hasan menyampaikan sosialisasi Empat Pilar MPR

di Pondok Pesantren Yaa Bunayyah. Dalam sosialisasi ini Syarief Hasan mengatakan bahwa pondok pesantren adalah tempat candra-dimuka pemimpin-pemimpin bangsa yang berkualitas di negeri ini. Pesantren memberi warna bagaimana mencetak sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan integritas.

"Karena itu, saya menggarisbawahi bahwa anggapan dan pandangan pondok pesantren sebagai cikal bakal intoleransi dan radikalisme adalah anggapan dan pandangan yang keliru," katanya. Sosialisasi yang digelar secara lesehan ini dihadiri Pimpinan Pondok Pesantren Yaa Bunayyah K.H. Asnawi Muhammadiyah dan staf ahli wakil ketua MPR Jafar Hafsah.

Syarief Hasan juga mengungkapkan, lebih senang mengunjungi pondok pesantren. "Karena itulah saya mempunyai program mengunjungi pondok pesantren-pondok

pesantren. Saya memberikan prioritas untuk kunjungan ke pondok pesantren," ujarnya.

"Sejak awal saya mengatakan bahwa pondok pesantren adalah tempat candra-dimuka pemimpin-pemimpin bangsa yang berkualitas di negeri ini. Karena itu, kalau ada yang berpandangan bahwa pesantren adalah basisnya intoleransi dan radikalisme adalah salah dan keliru," imbuhnya.

Justru sebaliknya, lanjut Syarief Hasan, kalau ingin melihat orang yang memiliki integritas dan loyalitas kepada bangsa dan negara serta agamanya, maka datanglah ke pondok pesantren. "Pesantren memberi warna bagaimana mencetak sumberdaya manusia yang benar-benar memiliki kompetensi dan integritas. Inilah yang saya ingin garisbawahi," tandasnya.

Selama beberapa kali mengunjungi pondok pesantren, Syarief Hasan mendapat bukti bahwa para santri memiliki pemahaman



tentang Empat Pilar MPR. “Dalam setiap sosialisasi saya memberikan pertanyaan tentang Empat Pilar dan soal ketatanegaraan, dan para santri bisa menjawab dengan benar. Itu menunjukkan bahwa para santri adalah Pancasilais. Mereka loyal kepada UUD NRI Tahun 1945, setia pada Pancasila dan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi luar biasa,” paparnya.

Untuk menangkal dan mencegah paham radikalisme di pondok pesantren, Syarief Hasan menyatakan, pentingnya pendidikan. “Perlu pendidikan, termasuk sosialisasi Empat Pilar MPR ini ditanamkan pada para santri sebagai tindakan pencegahan untuk

menjawab dengan benar pertanyaan yang diberikan. “Itulah salah satu bukti bahwa para santri adalah Pancasilais, loyalis, integritasnya luar biasa,” ucapnya.

### Metode Interaktif

Pada hari Sabtu (20/3/2021), Syarief Hasan kembali melanjutkan kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR. Kali ini Syarief Hasan menyampaikan sosialisasi kepada para siswa Yayasan Al Ikhlas Bina Insan Mandiri (YABIN) dan para orangtua siswa. Sjarifuddin Hasan menjelaskan tentang fungsi dan kewenangan lembaga negara MPR dan DPR.

antusias mengacungkan tangan untuk menjawab pertanyaan itu. Seorang siswi kelas 9 tampil dan menyebutkan sila-sila Pancasila dengan benar dan sempurna. Syarief Hasan memberikan reward kepada siswa itu.

Syarief Hasan memuji kemampuan dan pengetahuan para siswa. “Inilah sering saya katakan bahwa pesantren menjadi gudang para calon pemimpin bangsa,” tuturnya.

Bukan hanya soal Pancasila, Syarief Hasan juga bertanya tentang fungsi DPR. Siswa pun berupaya menjawab pertanyaan itu. Bahkan Syarief Hasan mem-



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

menangkal paham-paham radikalisme yang mencoba masuk ke pesantren. Karena itu, di pesantren tidak hanya diajarkan pendidikan agama tetapi juga pendidikan umum seperti kewarganegaraan atau lainnya yang berbasis pada kecintaan terhadap bangsa dan negara,” katanya.

Dia menambahkan bahwa sosialisasi Empat Pilar MPR di pesantren adalah untuk melihat sejauhmana pemahaman para santri tentang Empat Pilar MPR. “Dan, ternyata mereka paham semua. Ini terbukti dari beberapa pertanyaan yang kita ajukan kepada para santri bisa dijawab semua,” katanya.

Dalam sosialisasi Empat Pilar MPR ini, Syarief Hasan mengajukan beberapa pertanyaan kepada para santri. Misalnya pertanyaan tentang kewenangan MPR, DPR, tentang berapa kali Indonesia melakukan amandemen UUD, dan lainnya. Syarief Hasan memberi hadiah jika santri bisa

Mengawali sosialisasi, Syarief Hasan mengatakan bahwa meski saat ini masih dalam pandemi Covid-19, tetapi sebagai pimpinan MPR tetap melakukan kewajiban menyosialisasikan Empat Pilar MPR. “Meski di tengah pandemi Covid-19, kita tetap melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara,” ujarnya. Hadir dalam sosialisasi ini Pembina YABIN H. Hasanuddin dan staf khusus wakil ketua MPR Jafar Hafisah.

Ketika menyampaikan sosialisasi Empat Pilar MPR, Syarief Hasan menggunakan metode interaktif dengan para siswa dan guru. Syarief Hasan menjelaskan seputar sosialisasi ini sambil melemparkan pertanyaan kepada para siswa, orangtua maupun para guru dan pengurus YABIN. Metode interaktif ini menarik antusias para siswa dan guru.

“Siapa yang bisa menyebutkan sila-sila Pancasila?” tanya Syarief Hasan. Siswa

berikan keleluasaan kepada siswa untuk memanfaatkan gadget dengan mencari di Google. Namun, jawaban yang diberikan siswa masih belum tepat.

“DPR memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi atau membuat UU, fungsi budgeting atau anggaran, dan fungsi pengawasan,” jelasnya.

Syarief Hasan juga bertanya tentang kewenangan MPR. Dia menyebutkan kewenangan MPR, antara lain melantik presiden dan wakil presiden terpilih, melakukan perubahan UUD. “Hanya MPR yang bisa melakukan perubahan UUD,” sebutnya.

Bagi Syarief Hasan, sosialisasi Empat Pilar MPR adalah untuk melihat sejauhmana pemahaman para siswa tentang Empat Pilar MPR. “Para siswa bisa menjawab pertanyaan. Ini artinya mereka paham Empat Pilar MPR,” ucapnya. □

BSC



## Sosialisasi di Ciputat

# Negara Membutuhkan Penguatan Semangat Keagamaan



FOTO-FOTO: HUMASMPR RI

**W**AKIL Ketua MPR Dr. Jazilul Fawaid mengingatkan bahwa negara ini membutuhkan penguatan semangat keagamaan. Sebab, negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penguatan keagamaan menjadi tugas dari Nahdlatul Ulama (NU).

“Pembangunan spiritual itu menjadi tugas dari jamiah Nahdlatul Ulama. Jadi jamiah

Nahdlatul Ulama tugas utamanya adalah membangun semangat keagamaan,” kata Gus Jazil, sapaan Jazilul Fawaid, dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Tangerang Selatan, di Auditorium Wisma Syahida Inn, Ciputat, Sabtu (13/3/2021). Sosialisasi Empat Pilar MPR ini bersamaan dengan penguatan pengurus

dan Rapat Pleno I PCNU Kota Tangerang Selatan.

Gus Jazil mengakui, selain NU memang masih banyak lembaga-lembaga agama lainnya. Namun semangat lembaga-lembaga keagamaan itu tetap sama, yaitu membangun spiritualitas atau semangat keagamaan. Spiritualitas dan semangat keagamaan ini menopang semua nilai yang ada dalam Pancasila.

“Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab juga berlandaskan keagamaan. Persatuan Indonesia berdasarkan keagamaan. Keadilan sosial juga berlandaskan jiwa keagamaan,” ujarnya.

Karena itu, Gus Jazil menegaskan bahwa agama mempersatukan kekuatan negara. Agama harus menjadi semangat penguat dan pemersatu bukan pemecah belah. “Jangan sampai agama menjadi pemecah belah. Agama mempersatukan kekuatan negara,” tuturnya.

Semangat keagamaan, lanjut Gus Jazil, juga melandasi dan menjiwai semua proses pembangunan. “Semangat keagamaan itu menjadi penopang dari pembangunan di setiap daerah, termasuk pembangunan di Kota Tangerang Selatan,” katanya.

Menurut Gus Jazil, pembangunan tanpa jiwa agama maka akan kosong. Karena itu, kekuatan agama harus menjiwai semua proses pembangunan. “Kalau pembangunan meninggalkan spiritualitas agama maka pembangunan itu menjadi dangkal. Jadi, pembangunan hanya menyusun material saja. Padahal tujuan pembangunan adalah melahirkan kesejahteraan dan keadilan,” tandasnya.

Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada PCNU Kota Tangerang Selatan ini dihadiri Rois Syuriah K.H. Zainuddin Abdullah, Ketua PCNU Tangsel K.H. Abdullah Mas’ud, Kepala Kemenag Tangsel H. Abdul Rojak, Asda I Pemkot Tangsel Rahmat Salam, serta jajaran dan badan otonom PCNU Tangsel. □

BSC



JQH NU Kota Serang

# JQH Menjadi Penopang Empat Pilar



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR Dr. Jazilul Fawaid, SQ., MA., menyebutkan, Jam'iyatul Qurra Wal Hufadz (JQH) Nahdlatul Ulama (NU) adalah penopang Empat Pilar (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika). Sebab, JQH menjaga keyakinan agama Islam dan menjaga kebangsaan Indonesia.

"JQH adalah badan otonom NU yang merupakan perkumpulan Qori dan penghafal Alqur'an. Qori dan penghafal Alqur'an adalah warga negara yang baik. Para Qori dan penghafal Alqur'an akan menjadi penguat kebangsaan Indonesia dan menjadi penopang Empat Pilar," kata Jazilul Fawaid dalam pelantikan pengurus cabang JQH NU Kota Serang dan Sosialisasi Empat Pilar MPR di Serang, Banten, Sabtu (27/3/2021).

Gus Jazil, sapaan akrab Jazilul Fawaid, menguraikan, selama ini ada anggapan bahwa para penghafal Alqur'an terkadang mempunyai pikiran yang radikal. Karena memahami Alqur'an adalah memahami teks tanpa membaca konteksnya. "Karena itu, saya berharap dan saya yakin betul JQH NU justru menjadi penopang untuk membumikan Pancasila dalam versi penghafal Alqur'an," katanya.

Gus Jazil melanjutkan, anggota JQH NU bisa menangkal radikalisme. Mereka memahami teks dan konteks Alqur'an sehingga

terhindar dari pemikiran radikal. "Karena mereka yang memahami teks (Alqur'an), mempelajari teks dan menghayati teks. Jadi JQH perlu dilibatkan dalam menangkal radikalisme. Keterlibatan teman-teman JQH penting untuk sebuah negara," ujarnya.

Gus Jazil menambahkan, JQH jangan hanya dilibatkan dalam urusan perayaan hari besar Islam dan MTQ saja. "Jangan hanya itu. Kalau JQH tidak dilibatkan maka pikiran radikalisme, mempertentangkan Pancasila dengan Alqur'an, mempertentangkan Alqur'an dengan Bhinneka Tunggal Ika

akan semakin menguat," imbuhnya.

Pancasila, sambung Gus Jazil, tidak perlu dipertentangkan dengan Alqur'an. Karena Alqur'an diturunkan untuk menjaga kalimat tauhid. Alqur'an adalah rahmatan lil alamin. Alqur'an juga menjadi panduan umat Islam. "Jadi spirit kita adalah menjaga dua hal, yaitu: *pertama*, menjaga keyakinan agama kita. *Kedua*, menjaga kebangsaan kita. Spirit itulah yang membuat bangsa ini merdeka dan besar. Sedangkan JQH memiliki spirit yang tulus dan ikhlas menjaga Alqur'an," ucapnya.

"Bangsa Indonesia memiliki Empat Pilar karena kemerdekaan. Tanpa kemerdekaan, tidak ada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kuncinya adalah kemerdekaan, Istiqlal. Siapa yang memerdekakan Indonesia? Saham terbesar adalah para ulama, meskipun tidak tercatat sebagai pahlawan nasional. Kita harus menjaga pilar-pilar yang disebut Empat Pilar," pungkasnya.

Pelantikan pengurus cabang JQH NU Kota Serang dan Sosialisasi Empat Pilar MPR ini dihadiri, antara lain Drs. KH. Saifullah Ma'shum, SQ., MSi., (Ketua Umum PP JQH NU), KH. Fathullah Al Wasi' (Ketua PC JQH NU Kota Serang), KH. Muchtar (Ketua JQH NU Provinsi Banten), H. Fatihudin, SE., (anggota DPRD Kota Serang). □

BSC





Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad di Palembang

# Sosialisasikan Empat Pilar ke Berbagai Kalangan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DALAM rangkaian kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad, Ahad (28 Maret 2021), mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Rubath Al Muhibbien, Sako Kenten, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kedatangannya disambut langsung oleh Pimpinan Ponpes Al Habib Umar Abdul Azis Bin Abdurrahman Bin Shahab bersama ratusan santri pondok tersebut.

Di hadapan ratusan santri yang berkumpul di Aula Ponpes Rubath Al Muhibbien, Fadel Muhammad menjelaskan, sosialisasi Empat Pilar MPR merupakan salah satu tugas MPR yang diatur dalam UU Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Sosialisasi Empat Pilar MPR, yaitu Pancasila sebagai dasar dan ideology negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, dilakukan berbagai metode dan menasar ke semua kalangan, termasuk kepada para santri. "Sosialisasi juga membahas masalah ketatanegaraan", paparnya.

Kepada para santri, peserta sosialisasi, Fadel Muhammad menjelaskan bahwa pimpinan

MPR saat ini terdiri dari 10 orang, terdiri dari: Sembilan dari partai politik, dan satu dari Kelompok DPD. "Nah, saya yang menjadi pimpinan MPR dari Kelompok DPD", tambahnya.

Lebih lanjut, mantan Gubernur Gorontalo itu berharap, sebagai generasi muda yang menempuh pendidikan di ponpes, para santri hendaknya tidak minder dalam bersaing dan menghadapi tantangan kehidupan yang ada. "Kalian harus berani dan tangguh menghadapi tantangan yang ada," ujarnya.

Lalu, Fadel Muhammad menceritakan pengalaman dirinya yang juga pernah nyantri. Selepas nyantri ia naik kapal laut menuju ke Surabaya dengan menempuh perjalanan selama 3 hari. "Naik kapal laut saat itu menghadapi ombak yang tinggi", ungkapnya.

Dari Surabaya dia melanjutkan perjalanan menuju Kota Bandung dengan naik kereta



api kelas ekonomi. Singkat cerita, di Bandung dia diterima kuliah di ITB. Dan, “Pada tahun 1975, saya menjadi mahasiswa teladan di ITB,” ucap mantan politisi Partai Golkar itu.

Untuk menjadi sukses, menurut Fadel Muhammad, kita harus bekerja keras. “Sebagai santri kalian harus belajar tekun,” harapnya. Kesuksesan, kata Fadel, tak akan bisa dicapai apabila hanya duduk-duduk atau bermalas-malasan. “Tak ada orang sukses tanpa perjuangan,” katanya lebih lanjutnya, “Sukses adalah perjalanan panjang. Ia harus diraih meski dengan jalan berliku dan menanjak.”

Sukses akan tercapai bila kita sekolah. “Tak ada orang yang berhasil tanpa sekolah. Sekolah merupakan modal awal,” katanya. Untuk itulah, Fadel Muhammad mendorong agar para santri terus tekun belajar hingga mencapai cita-cita tertinggi. “Kalian nanti

satunya metodenya mendirikan lembaga pendidikan. Hal-hal seperti inilah yang, menurut Fadel, perlu diteladani. Dan, dalam kesempatan kunjungan ke Palembang, dia berziarah ke makam para ulama.

### Kampung Arab

Di Jalan Ali Gatmir, 10 Ilir, Kota Palembang, 29 Maret 2021, berdiri tenda berwarna coklat muda. Tenda yang berdiri tepi jalan itu digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR yang dihadiri Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad. Ratusan warga yang terdiri dari laki-laki, perempuan, tua dan muda, penduduk perkampungan yang mayoritas keturunan Arab itu, menyambut kedatangannya Fadel Muhammad dengan barisan drum band.

Kampung 10 Ilir memang dikenal sebagai Kampung Arab, karena mayoritas penduduk-

terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Talaud hingga pulau Rote. Di wilayah Indonesia, tinggal penduduk beragam suku, bahasa, agama, dan budaya. “Meski kita berbeda-beda namun kita bersatu, seperti dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika”, ujarnya.

Keragaman yang kita miliki inilah, kata Fadel Muhammad, perlu dijaga. Agar Indonesia tidak pecah. Dia berharap, lepasnya Provinsi Timor Timur yang selanjutnya menjadi negara Timor Leste tidak terulang lagi. “Sampai sekarang kita masih diganggu dengan gerakan separatisme yang terjadi di Papua”, tuturnya. Adanya gerakan separatisme itu, karena ada kelompok yang ingin bermain karena Papua adalah daerah yang kaya akan potensi alam.

Fadel Muhammad menegaskan, agar kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

bisa kuliah di Universitas Sriwijaya atau perguruan tinggi lainnya”, ujarnya.

Sebagai generasi muda yang menempuh pendidikan berbasis agama Islam, Fadel Muhammad mendorong agar para santri menjadikan sholat sebagai pegangan dalam kehidupan. “Setiap melakukan aktivitas, bacalah sholat”, harapnya. Dengan membaca sholat, Fadel Muhammad yakin cita-cita dan harapan yang diinginkan akan tercapai.

Dalam kesempatan itu, Fadel Muhammad menyatakan, terkesan dengan kehidupan beragama di Palembang. Pada masa Kesultanan Palembang para Sultan, seperti Sultan Mahmud Badaruddin II, mengundang para habib untuk menyebarkan Islam di wilayah Sumatera Selatan. Para habib pun akhirnya menyebarkan Islam dengan salah

nya keturunan Arab. Dengan menerapkan prokes yang ketat, ratusan warga bangsa Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad bisa hadir di Kampung Arab, ditepian Sungai Musi. “Syukur, sekarang saya berada di depan bapak-bapak, ibu-ibu, sekalian”, ungkap Fadel Muhammad.

Selanjutnya Fadel Muhammad menjelaskan, kehadirannya di Kampung 10 Ilir ini untuk melaksanakan salah satu tugas MPR, yakni melakukan Sosialisasi Empat Pilar. Ia menuturkan, bila kita ingin membangun rumah yang kokoh maka diperlukan dasar dan pilar bangunan yang kuat. “Demikian pula bila kita ingin membangun negara maka diperlukan dasar dan pilar negara yang kuat”, paparnya.

Mantan Gubernur Gorontalo ini, selanjutnya menjelaskan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki luas wilayah yang

supaya bangsa ini tetap utuh. Jadi kita mendahulukan persatuan dan kesatuan untuk kepentingan bangsa. Fadel Muhammad lalu menceritakan sejarah keberadaan orang-orang Arab di Indonesia. Dulu, cerita Fadel Muhammad, ada Partai Persatuan Arab. Keberadaan partai itu sangat kuat. Partai ini disebut oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan sangat nasionalis. Mereka menyatakan, akan bubar bila Indonesia sudah merdeka. “Sementara partai yang dimobilisasi oleh orang-orang Arab di Malaysia dan Singapura masih berdiri”, tuturnya.

Partai Persatuan Arab membubarkan diri setelah Indonesia merdeka sebab, menurut Fadel Muhammad, karena orang-orang Arab menyatakan bahwa bumi, tanah, dan air, sudah menjadi milik bangsa Indonesia. “Or-





ang Arab di Indonesia memilih melebur diri menjadi Indonesia”, ujarnya. Tak hanya itu, menurut Fadel Muhammad, para keturunan orang Arab pun setia menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. “Betapa hebatnya orang Arab yang setia pada Indonesia,” puji Fadel Muhammad.

Sebagai bangsa yang besar dan beragam, bangsa Indonesia memiliki potensi untuk pecah seperti Uni Soviet dan Jugoslavia. Untuk itu, dia menegaskan, pentingnya semua untuk menjaga agar potensi-potensi disintegrasi bangsa tidak terjadi. “Itulah pentingnya kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa”, paparnya.

### Generasi Muda Sumatera Selatan

Dalam rangkaian kunjungannya di Kota Palembang, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad juga menyampaikan sosialisasi Empat Pilar kepada para generasi muda dan mahasiswa di Kota Empek-empek itu. Ratusan generasi muda datang dari berbagai organisasi mahasiswa, yaitu: Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pelajar Islam Indonesia (PII), mahasiswa dari Universitas Sriwijaya, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, serta dari perwakilan lainnya. Mereka, pada 30 Maret 2021, itu memenuhi salah satu aula Kantor Perwakilan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Selatan, Kota Palembang.

Kegiatan sosialisasi Empat Pilar ini diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan GMNI Cabang Ogan Ilir ini, selain dihadiri oleh Fadel Muhammad juga dihadiri oleh anggota DPD dari Sumatera Selatan,

Jialyka Maharani.

Fadel Muhammad dalam kesempatan itu mengatakan, sangat gembira bertatap muka dengan kalangan pelajar, mahasiswa, dan generasi muda. “Saya gembira, sebab mengingatkan saya yang juga pernah menjadi mahasiswa dan melewati fase yang penuh dinamika,” ujarnya. Masa muda, menurut Fadel Muhammad, merupakan masa keemasan yang merupakan fase yang menentukan masa depan. “Pastinya, kalian mengharap masa depan lebih baik,” ujarnya. Untuk itu, menurut Fadel, penting di masa muda untuk menata langkah guna menyambut masa depan.

Menuju masa depan yang sukses dan berhasil harus diawali dengan bekerja keras, cerdas, dan sungguh-sungguh. Menurut Fadel Muhammad, ada tiga kiat bila seseorang ingin sukses, yaitu: *pertama*, harus mempunyai kemampuan. Bila tak mempunyai kemampuan maka keberhasilan itu tak akan mengunjungi kita. “Sebagai aktivis kalian mempunyai modal kemampuan untuk terjun di masyarakat,” ujarnya.

*Kedua*, adanya kesempatan. Kesempatan, menurut Fadel Muhammad, harus kita raih meskipun ada pula yang datang dengan sendirinya. Baik diraih atau datang sendiri, kedua kesempatan itu jangan sampai dilewatkan. “Kadang-kadang kesempatan atau *opportunity* itu datang secara tiba-tiba. Meski demikian jangan sampai dilewatkan, kesempatan harus kita gunakan,” tambahnya.

*Ketiga*, strategi. Dalam hidup, menurut Fadel Muhammad, kita harus menggunakan strategi. Sukses atau tidaknya hidup

tergantung pada strategi yang digunakan dalam mengarungi hidup. “Strategi yang kita miliki akan bertambah bila kita menjadi aktivis,” ujarnya.

Fadel Muhammad kemudian mengingatkan generasi muda Sumatera Selatan agar mulai berkecimpung dalam dunia kewirausahaan. Jiwa kewirausahaan ada pada setiap orang. “Wirausaha adalah semangat dan ilmunya bisa dipelajari,” tuturnya. Kewirausahaan merupakan mental dan nilai-nilai ini harus ditanamkan pada generasi muda.

Orang yang berpendidikan adalah orang yang di pikirannya melihat peluang apa yang ada di masyarakat. “Inilah dasar kewirausahaan,” tuturnya. Dengan pikiran yang demikian maka seseorang bisa menciptakan usaha hingga mampu menyerap tenaga kerja.

Lebih lanjut, Fadel Muhammad menyampaikan, di masyarakat ada tiga kelompok, yakni: *pertama*, *economic power*. Kelompok ini adalah kelompok para pengusaha. *Kedua*, *political power*. Kelompok ini adalah kelompok para politisi, kepala daerah. Dan, *ketiga*, *social power*. Masuk dalam kelompok ini seperti aktivisi dan dosen.

Ketiga kelompok itu, menurut Fadel Muhammad, berinteraksi sangat tajam. Ketiganya saling membutuhkan dan melengkapi. Seorang pengusaha bisa menjadi politisi dan seorang politisi bisa menjadi pengusaha. Begitu pula seorang aktivis pun bisa menjadi politisi, bisa pula menjadi pengusaha. “Generasi muda harus menentukan masa depannya dengan memilih dari mana memulainya,” ujarnya. □

AWG

Salatiga, Jawa Tengah

# Bamsoet Canangkan Kota Salatiga Sebagai Kota Empat Pilar



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR RI Bambang Soesatyo mencanangkan Kota Salatiga, Jawa Tengah, sebagai Kota Empat Pilar. Kota Salatiga yang memiliki jumlah penduduk mencapai 192.322 jiwa, terdiri dari 95.025 laki-laki dan 97.297 perempuan, terdapat lebih dari 39 etnis, enam agama dan berbagai aliran kepercayaan, kehidupan sosialnya sangat kental menerapkan nilai-nilai Empat Pilar MPR RI, yakni Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

"Kota Salatiga merupakan salah satu kota yang sangat berkesan dalam hidup saya. Ayah saya lahir, besar, dan dimakamkan di Salatiga. Sejak kecil, saya turut mengalami suasana harmonis dalam kehidupan masyarakat Salatiga. Maka, tidak berlebihan jika banyak yang menilai Kota Salatiga merupakan miniatur Indonesia, tempat bermuaranya warga pendatang dari berbagai daerah dengan latar belakang sosial dan

budaya yang sangat beragam. Namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan sehingga menjadikannya sebagai 'city of harmony'," ujar Bamsoet dalam pencanangan Kota Salatiga sebagai Kota Empat Pilar, di Pendopo Walikota Salatiga, Jawa Tengah, Rabu (31/3/21).

Turut hadir dalam acara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Walikota Salatiga Yuliyanto, Wakil Walikota Salatiga Muhammad Haris, Anggota MPR RI Robert Kardinal, Sekretaris Brain Society Center Dhiffa Wiyani, dan Ketua Perkumpulan Badan Usaha







Masyarakat Adat Nusantara (PERBUMA) Dadung Harisetyo. Serta hadir pula jajaran Kementerian Pertanian, antara lain Dirjen Perkebunan Kasdi Subagyono dan Dirjen Tanaman Pangan Suwandi.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, dalam laporan SETARA Institute tentang Indeks Kota Toleran (IKT) Tahun 2020, Kota Salatiga berada di peringkat pertama. Meraih nilai tertinggi pada 5 dari 8 indikator penilaian. Di mana indikator penilaian meliputi rencana pembangunan, kebijakan diskriminatif, peristiwa intoleransi, dinamika masyarakat sipil, pernyataan publik pemerintah kota, tindakan nyata pemerintah kota, heterogenitas agama, dan inklusi sosial keagamaan.

"Ini menggambarkan etos kerja masyarakat Kota Salatiga yang tidak pernah puas dan terlena pada satu titik pencapaian. Tetapi,

terus berupaya melakukan berbagai pembenahan dan perbaikan," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, pencapaian tersebut merupakan peningkatan dari capaian yang diraih pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, Kota Salatiga menduduki peringkat keempat Kota Paling Toleran. Selanjutnya pada 2017 berada di peringkat ketiga, dan 2018 di peringkat kedua.

"Suasana guyub antarkalangan masyarakat tercermin dalam keberadaan Alun-Alun Pancasila, yang terletak di depan pendopo kantor Walikota Salatiga. Siapapun yang berkunjung kesana, akan merasakan perasaan nyaman, karena eratnya interaksi masyarakat tanpa memandang suku, agama, kepercayaan, ras, maupun golongan," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini

menerangkan, capaian Kota Salatiga sebagai kota paling toleran bukanlah hal yang mudah untuk diraih. Karena membangun kebersamaan dalam keberagaman, mudah diwacanakan tetapi banyak tantangan dalam implementasinya. Bangunan kebersamaan yang tidak dilandasi akar kuat akan mudah terkoyak oleh berbagai rongrongan. Baik yang bersifat paham ideologi maupun tindakan yang dapat memecah belah persatuan.

"Kota Salatiga telah membuktikan bahwa perbedaan suku, agama, ras, golongan, maupun kepercayaan, bukanlah halangan untuk membangun persatuan. Kuncinya ada pada penanaman nilai dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Dari Salatiga, kita berharap virus toleransi bisa semakin menyebar ke berbagai pelosok Nusantara," pungkas Bamsoet. □



Kabupaten Gianyar, Bali

# HNW: Tokoh Bali Terlibat Aktif Pembahasan Lahirnya Pancasila



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**D**IHADAPAN masyarakat Kabupaten Gianyar Bali, Wakil Ketua MPR RI Dr. H.M Hidayat Nur Wahid, MA., menegaskan, proses berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilakukan melalui dialog yang melibatkan berbagai perwakilan kelompok masyarakat. Tak kecuali masyarakat Bali yang saat itu diwakili oleh sosok seorang sarjana hukum pertama bernama I Gusti Ketut Pudja.

Dalam perjalanannya, I Gusti Ketut Pudja yang juga anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) terlibat aktif dalam pembahasan lahirnya Pancasila, 18 Agustus 1945. Ia termasuk kelompok Indonesia Timur yang keberatan terhadap tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Sehingga mengusulkan perlu adanya perubahan.

Salah satu alasan yang digunakan oleh I Gusti Ketut Pudja meminta perubahan dalam Piagam Jakarta adalah kenyataan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan untuk satu golongan saja. Tapi untuk semua unsur yang meliputi suku, bangsa, agama, ras yang ada sebelum Indonesia merdeka.

"Indonesia bukan negara agama, tetapi bukan pula negara anti agama. Sila pertama menjamin keragaman beragama, termasuk kebebasan menjalankan agama bagi setiap pemeluknya. Keputusan ini diambil para pendiri bangsa Indonesia, dan harus dipertahankan sampai kapanpun," kata HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid.

Pernyataan itu disampaikan secara daring oleh HNW saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR di hadapan anggota dan pengurus Yayasan Dharma Sinergi Pertiwi Gianyar Bali, Sabtu (20/3/2021). Acara berlangsung di Aula Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, itu dihadiri oleh Sekretaris Fraksi PKS MPR H. Johan Rosihan, S.T, dan Komandan DENPAL IX/3 Singaraja, Letkol CPL Marhan.

Pancasila, lanjut HNW, merupakan satu dari empat warisan para pendiri bangsa yang membuat Indonesia akan terus bersatu dan tidak gampang bercerai berai. Selain Pancasila, juga ada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan

Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

"Warisan para pendiri bangsa itu harus terus dijaga dan dilestarikan. Jangan sampai kita meniru Yugoslavia, hancur dan terpecah belah setelah pendirinya meninggal. Padahal potensi perpecahan Indonesia jauh lebih besar dibanding Yugoslavia," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PKS MPR RI, H. Johan Rosihan, S.T., mengingatkan bahwa Pancasila memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan bangsa Indonesia. Ini terjadi karena nilai-nilai dalam Pancasila digali dari bumi Indonesia sendiri. Karena itu, tidak ada satupun sila yang ada dalam Pancasila yang bertentangan dengan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat.

"Karena digali dari bumi Indonesia, tidak ada satupun masyarakat Indonesia yang tidak nyaman terhadap Pancasila. Semua masyarakat menerima Pancasila, seperti mereka menerima nilai-nilai yang berkembang di sekitarnya," ujar Johan Rosihan. □

MBO



Kupang, Nusa Tenggara Timur

# Arti Penting Ende Bagi Proses Lahirnya Pancasila

WAKIL Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A., mengajak masyarakat Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk terus mempelajari dan menggali nilai-nilai Empat Pilar MPR RI. Menurut HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid, banyak cara bisa digunakan untuk memperdalam pengetahuan seputar Empat Pilar. Baik mengikuti acara sosialisasi yang dilakukan MPR, maupun aktif mencari literatur serta sejarah menyangkut perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Intinya, kata Hidayat, pengetahuan

bawah pohon sukun yang menghadap ke laut, Soekarno menggali dan menemukan nilai-nilai tentang Pancasila,” ujar Hidayat.

Dalam pengasingannya di Ende, Soekarno banyak berinteraksi, berhubungan dan bertukar pikiran dengan berbagai kelompok suku bangsa, termasuk tokoh berbagai latar belakang agama. Semua itu membantunya dalam menemukan dasar dan ideologi Pancasila.

Pernyataan itu dikemukakan HNW secara daring saat menyampaikan Sosialisasi Empat

Sebelumnya, Anggota MPR RI FPKS H. Johan Rosihan ST., sebagai pembicara pertama, antara lain mengatakan, Indonesia adalah negara yang besar dan beragam. Sebagai negara yang beragam, Indonesia memiliki potensi perpecahan yang besar pula. Tetapi, hingga kini persatuan dan kesatuan Indonesia masih bertahan, salah satunya berkat keberadaan Empat Pilar MPR RI.

Para pendiri bangsa, lanjut Johan Rosihan, telah memberi contoh bagaimana menye-



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

tentang Empat Pilar MPR itu penting dimiliki oleh setiap warga negara. Dengan pemahaman yang baik terhadap Empat Pilar MPR maka akan menghadirkan kecintaan kepada bangsa dan negara. Seperti kata pepatah: 'tak kenal maka tak sayang.' Agar kecintaan masyarakat terhadap bangsa dan negaranya tumbuh maka setiap warga negara perlu mengetahui dan memahami sejarah perjalanan bangsanya, tak terkecuali Empat Pilar MPR RI.

“Ada satu tempat di NTT ini yang berhubungan langsung dengan upaya Soekarno menggali dan mencari nilai-nilai tentang Pancasila. Saat ini tempat tersebut diabadikan sebagai Taman Renungan Bung Karno dan terletak di Ende NTT. Di tempat itulah, di

Pilar yang diselenggarakan oleh MPR RI bekerjasama dengan Yayasan Citra Cendana Kupang. Acara tersebut berlangsung di Hotel NEO Eltari Kupang, Ahad malam (21/3/2021). Ikut hadir pada acara tersebut, anggota MPR RI Fraksi PKS H. Johan Rosihan, ST., dan Ketua Yayasan Citra Cendana Kupang Prof. Assoc. Reiner Ishaq Lerrick, M.Sc, Ph.D.

Pada kesempatan itu, HNW berharap, bagi anggota masyarakat yang sudah mengikuti sosialisasi Empat Pilar agar bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekaligus menjadi contoh bagi masyarakat yang belum mengikuti sosialisasi. Sosialisasi itu bisa dimulai dari keluarga, lalu meluas ke lingkungannya.

lesaikan perbedaan melalui musyawarah mufakat. Soekarno, Moh. Yamin, dan Soepomo adalah tiga orang yang ikut memberikan pemikiran soal Pancasila. Tetapi ketiganya tidak pernah memaksakan pemikirannya harus diterima. Bahkan, ketiganya tunduk dan patuh terhadap hasil keputusan bersama.

Bahkan, menurut Johan Rosihan, dalam perumusan teks Pancasila, musyawarah mufakat itu tetap dilaksanakan hingga saat-saat terakhir. “Buktinya, tuntutan perwakilan masyarakat Indonesia Timur yang keberatan terhadap tujuh kata dalam Piagam Jakarta bisa dipenuhi tanpa kekerasan ataupun saling menyakiti,” katanya. □

MBO

Jakarta Pusat

# NKRI Lahir dari Kesepakatan Persatuan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

RATUSAN warga Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Jakarta Pusat, 12 Maret 2021, mengikuti Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang lebih populer disebut sosialisasi Empat Pilar MPR. Hadir dalam kegiatan yang digelar di kawasan Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta, itu Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid.

Di hadapan peserta sosialisasi yang mayoritas menggunakan sarung, Jazilul Fawaid mengatakan, sosialisasi merupakan tugas MPR yang mesti dilakukan sesuai dengan amanat UU MD3. Empat Pilar MPR, jelas pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, itu sebagai rukun bernegara. "Bila salah satu rukun itu diingkari maka negara ini bisa bubar," ujar Jazilul Fawaid. Untuk itu, warga negara wajib menjalankan rukun bernegara agar bangsa ini tetap kokoh dan kuat sepanjang masa.

Mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Jakarta Selatan itu menegaskan, agar umat Islam khususnya,

tidak alergi dengan dasar dan pilar bernegara. Pancasila, menurut pria yang akrab disapa Gus Jazil, merupakan ijtihad dari para ulama. Hal demikianlah yang membuat Pancasila tidak bertentangan dengan agama Islam. "Tidak ada nilai-nilai Pancasila yang bertentangan dengan nilai-nilai agama," tutur Gus Jazil.

Dalam kesempatan itu, Gus Jazil menerangkan peran ulama dan santri dalam perjuangan bangsa Indonesia sangat vital dan penting. "Negara ini lahir dari perjuangan para ulama," tuturnya. Sebelum ada TNI, dulu ada laskar-laskar, seperti Laskar Sabillillah yang diaktifkan oleh para santri, ulama, dan umat Islam. "Inilah







berkah dari perjuangan ulama, santri, dan umat Islam”, paparnya.

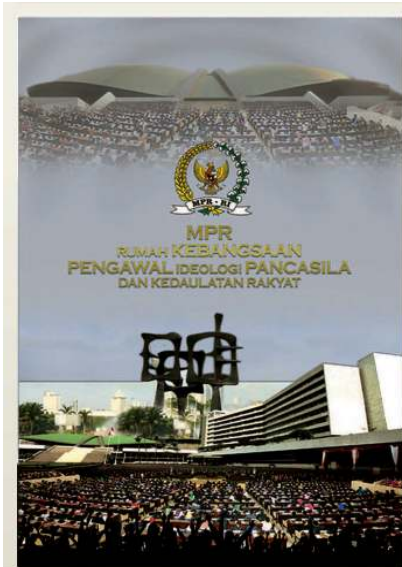
Meski demikian, kata Koordinator Nasional Nusantara Mengaji itu, bangsa ini lahir dari kesepakatan bersama. “NKRI lahir dari kesepakatan persatuan”, ucapnya. Salah satunya kesepakatan dari para alim ulama. “Sebagai negara kesepakatan yang didirikan oleh ulama maka kita perlu menjaga bangsa Indonesia. Kesepakatan ini sudah final, NKRI harga mati,” tegasnya.

Peran besar ulama dan santri inilah yang membuat Jazilul Fawaid mendorong agar para santri tidak keder atau minder dalam mengisi pembangunan. “Kan sudah ada presiden dan wakil presiden yang latar belakangnya ulama dan santri,” ungkap-

nya. Peran ulama dan santri dalam ikut proses pembangunan sangat penting dan diharapkan. Merekalah yang akan mendorong nilai-nilai dan semangat ke-agamaan dalam pembangunan. Dia mengibaratkan pembangunan tanpa nilai-nilai agama seperti Fir’aun yang membangun piramid-piramid besar.

Sebagai kader NU, Gus Jazil terus mendorong organisasi yang didirikan oleh KH. Hasyim Asyari ini untuk terus mengawal moral dan persatuan bangsa. Ia mengingatkan pesan-pesan para pendahulu di organisasi Kaum Nahdliyin itu tentang pentingnya menjaga nilai-nilai moral di tengah masyarakat dan generasi muda. □

AWG



### Implementasi Sila-sila Pancasila

-  - Berhenti saling menyakiti, mulailah saling menghargai
- Berhenti saling merendahkan, mulailah menghormati perbedaan
- Berhenti takabur, mulailah bersyukur
-  - Stop marah-marah, mulailah bersikap ramah
- Berhenti memaki, mulailah memakai hati
- Berhenti curiga, mulailah menyapa
-  - Berhenti berseteru, mulailah bersatu
- Berhenti memaksakan, mulailah berkorban
- Berhenti mencari perbedaan, mulailah bergandeng tangan
-  - Berhenti silang pendapat, mulailah mencari mufakat
- Berhenti besar kepala, mulailah berlapang dada
- Berhentilah bersilat lidah, mulailah bermusyawarah
-  - Berhenti malas, mulailah bekerja keras
- Stop diskriminasi, mulailah toleransi
- Berhenti menang sendiri, mulailah berbagi



## Persaudaraan Muslimah Kabupaten Mamuju

# R.A. Kartini, K.H. Ahmad Dahlan, dan K.H. Hasyim Asy'ari Memiliki Satu Guru



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**A**PRIL adalah bulan yang istimewa bagi bangsa Indonesia, khususnya kaum perempuan. Karena pada bulan April diperingati hari lahir R. A. Kartini. Dia adalah pahlawan bagi para kaum perempuan, sekaligus sosok yang menginspirasi kaum hawa untuk berjuang dan meraih mimpi, seperti yang bisa dilakukan kaum pria.

Dalam kaitannya dengan Persaudaraan Muslimah (Salimah), keberhasilan R.A. Kartini terjadi setelah Dia nyantri kepada Kiai Sholeh Darat dari Semarang. Kyai Sholeh Darat adalah guru dari KH. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan KH. Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama.

"Artinya R.A. Kartini dengan K. H. Ahmad Dahlan dan K.H. Hasyim Asy'ari berasal dari satu guru yang sama. Dan, setelah mendapat pencerahan dari Kyai Soleh Darat, Kartini berhasil menciptakan buku 'Habis Gelap Terbitlah Terang' yang tetap melegenda hingga saat ini," kata Wakil Ketua MPR RI, Dr. Hidayat Nur Wahid, M.A.

Pernyataan itu disampaikan Hidayat Nur Wahid (HNW) saat menjadi narasumber secara daring pada acara Temu Tokoh Nasional yang diselenggarakan oleh MPR RI bekerjasama dengan Persaudaraan Muslimah

Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Sabtu (10/4/2021). Hadir sebagai narasumber dalam acara yang berlangsung di Wisma Mala'bi, Jl. Pababari Mamuju, Sulawesi Barat, itu adalah anggota MPR Fraksi PKS H. Akhmad Syaikh.

Menurut HNW, pasca R.A. Kartini, tepatnya pada saat Persiapan Kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia juga mengenal sosok perempuan muslimah yang ikut berperan menata Indonesia. Dia adalah Mr. Maria Ulfah, sarjana hukum perempuan pertama yang juga anggota ormas keagamaan Mathlaul Anwar dan anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

"Dia berjasa memasukkan pemikiran tentang hak asasi manusia dalam UUD 1945," jelas HNW. Awalnya, lanjut HNW, usulan itu sempat ditolak oleh Bung Karno dan menjadi polemik, hingga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan anggota BPUPKI. "Tapi, akhirnya disetujui, karena didukung oleh sebagian besar anggota BPUPKI," kata HNW.

Kisah Kartini dan Maria Ulfah memperlihatkan bahwa kaum muslimah juga mampu berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka bisa berdarma bakti, asal mau belajar dan memiliki

tekad menghadirkan Indonesia lebih baik. "Dengan semangat seperti inilah MPR hadir untuk melestarikan sikap dan kecintaan serta semangat perjuangan para pendiri bangsa," katanya.

Sebelumnya, anggota MPR RI Fraksi PKS Akhmad Syaikh menyampaikan simpati dan duka mendalam atas terjadinya bencana alam di Sulawesi Barat beberapa waktu lalu. Menyikapi musibah tersebut, Syaikh meminta masyarakat tidak saling menyalahkan, apalagi mencari kambing hitam. Yang terpenting saling introspeksi, menyadari kesalahan masing-masing untuk diperbaiki di masa depan.

Pada kesempatan itu, Syaikh menegaskan, bagi Partai Keadilan Sejahtera, Empat Pilar MPR merupakan konsensus yang tidak boleh dipertentangkan atau perdebatkan. Yang perlu dilakukan saat ini adalah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

"Tantangan kita saat ini adalah terus menyosialisasikan Empat Pilar MPR agar bisa menjadi pegangan hidup bangsa Indonesia, mulai dari desa hingga ke kota. Dari rakat kecil sampai para pemimpin," katanya. □

MBO



## Sosialisasi Empat Pilar di Mamuju

# Kita Mewarisi Ideologi Yang Menyatukan

**B**ENCANA gempa bumi yang mengguncang Sulawesi Barat beberapa waktu lalu menuai simpati seluruh masyarakat. Berbagai kalangan ikut menyampaikan duka dan keprihatinan terhadap bencana tersebut. Tak sedikit pula turut menyalurkan bantuan untuk meringankan penderitaan yang dialami para korban.

“Jalan terbaik setelah terkena musibah adalah bersabar. Bersabar bukan berarti pasrah semata. Tapi, menerima kejadian itu, tidak saling menyalahkan, kemudian mengatasinya secara bersama-sama. Semoga

dan menabrak aturan atau kesepakatan bersama. “Itu pulalah yang dilakukan Fraksi PKS DPR RI ketika pemerintah bersama koalisinya membahas RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP),” katanya.

HNW menegaskan, Pancasila yang disepakati sejak 18 Agustus 1945 sudah final, tidak boleh diganti. “Karena itu, ketika ada pihak-pihak yang hendak mengubah semua itu, kita ingatkan agar mereka tidak melanggar kesepakatan lahirnya Pancasila yang dulu pernah diambil oleh para pendiri bangsa,” ungkap HNW.

negara sendiri-sendiri. “Padahal suku bangsa dan agama di sana tidak sebanyak Indonesia,” kata HNW.

Menurut Hidayat, inilah pentingnya Sosialisasi Empat Pilar MPR RI agar bangsa Indonesia semakin mengenal dirinya sendiri. Mengenal Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk Negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

Sebelumnya, anggota MPR dari Fraksi PKS H. Ahmad Syaikh dalam sambutannya



pemerintah memenuhi janji-janjinya untuk membantu meringankan beban para korban,” begitu Wakil Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid menyampaikan harapannya.

HNW, begitu Hidayat Nur Wahid biasa disapa, menyampaikan pernyataannya itu secara daring selaku pembicara pada Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Wisma Mala'bi, Jl. Pababari Mamuju, Sulawesi Barat, Ahad (11/4/2021). Hadir dalam acara itu, anggota MPR RI Fraksi PKS, H. Ahmad Syaikh.

Dalam acara yang diselenggarakan oleh MPR RI bekerjasama dengan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Sulawesi Barat itu, HNW mengingatkan, dalam hidup berbangsa dan bernegara, setiap warga negara harus saling ingat mengingatkan. Terutama, ketika ada orang lain yang melakukan kesalahan,

Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS ini mengingatkan, bangsa Indonesia mewarisi sikap-sikap mulia dari nenek moyang. Seperti, rasa kekeluargaan, gotong-royong dan tolong menolong. Selain itu, bangsa Indonesia juga diwarisi ideologi yang membuat seluruh warganya saling bersatu dan tak mudah terpecah-belah. Padahal potensi perpecahan yang dimiliki Indonesia sangat besar.

Masih tercatat dalam ingatan ketika reformasi bergulir, para pengamat bilang Indonesia bakal terpecah belah, nyatanya kekhawatiran tersebut tidak menjadi kenyataan. Sedangkan di belahan dunia lain, antara lain di Yugoslavia menjadi terpecah belah setelah pendirinya, Josip Bros Tito, mangkat. Itu sebagai akibat suku-suku bangsa yang ada di negara itu saling memisahkan diri, satu dan lainnya mendirikan

menegaskan, Partai Keadilan Sejahtera memang menolak pembahasan RUU HIP sebagai upaya mempertahankan Pancasila yang telah menjadi kesepakatan final. Beruntung, upaya Fraksi PKS di parlemen itu mendapat dukungan dari masyarakat, termasuk ormas-ormas keagamaan, baik Islam maupun lainnya. Akibatnya, RUU HIP pun dicabut dan tidak diteruskan.

Lebih lanjut Syaikh menyatakan, UUD NRI tahun 1945 boleh saja diubah, jika memenuhi persyaratan. Tetapi ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 harus ditegakkan, tidak boleh ada pelanggaran. Karena itu, ketika ada usulan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, kami menolaknya. Karena ketentuan dalam UUD seorang presiden menjabat hanya dua periode,” katanya. □

MBO

Diskusi PPHN

# Terkait PPHN, Belum Ada Usulan Amandemen Terbatas



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR Dr. Jazilul Fawaid, M.Ag., mengungkapkan bahwa dalam sejarah perjalanan negara Indonesia sampai saat ini telah mengalami beberapa perubahan konstitusi. Di era Orde Lama yang dipimpin Bung Karno ada Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, lalu di era Orde Baru yang dipimpin Soeharto dipakai kembali UUD 1945 dengan jargon kembali ke UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Kemudian, masuk era reformasi, konstitusi mengalami perubahan menjadi UUD NRI Tahun 1945. Di era inilah terjadi perubahan yang sangat istimewa, sebab pasca amandemen, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, yang salah satu kewenangannya memberikan mandat kepada Presiden. Walaupun begitu, MPR masih memiliki sesuatu yang luar biasa, yakni memiliki kewenangan tertinggi yang tidak dimiliki lembaga lain, yaitu mengubah dan menetapkan UUD.

Dalam perjalanan era reformasi, muncul wacana besar di tengah masyarakat tentang perlunya Pokok-Pokok Haluan

Negara (PPHN) melalui amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945. MPR periode 2014-2019 kemudian merespon wacana itu dengan melakukan berbagai kajian bersama elemen-elemen masyarakat, seperti tokoh masyarakat, akademisi, dan lainnya yang menghasilkan rekomendasi untuk dilanjutkan oleh MPR periode 2019-2024.

Hal tersebut disampaikan Pimpinan MPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akrab disapa Gus Jazil, saat menjadi narasumber dalam acara Diskusi Empat Pilar MPR RI bertema 'Urgensi Pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara' diselenggarakan oleh Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI bekerjasama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen. Diskusi ini







diselenggarakan di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Lobi Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/3/2021). Hadir sebagai narasumber Pakar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Juanda, M.H., serta awak media massa nasional, baik cetak, elektronik dan online sebagai peserta.

“Saya rasa, munculnya gagasan perubahan yang berdasar atas kehendak rakyat adalah ciri negara yang menjalankan demokrasi dengan baik, dan jika arahnya demi kebaikan negara serta seluruh rakyat Indonesia harus untuk dilaksanakan. Lagi pula, konstitusi itu dibuat rakyat sebagai pemegang penuh kedaulatan negara yang perwakilannya ada di MPR dan DPR, sehingga apapun maunya rakyat mesti diakomodir, dan tentunya dengan berpedoman pada ketentuan yang ada,” jelasnya.

Jika perubahan konstitusi ingin dilakukan,

menurut Gus Jazil, ada beberapa ketentuan harus terpenuhi, antara lain, usul harus diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Selanjutnya, setiap usul perubahan diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas pasal-pasal mana saja yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya, setelah itu dibawa ke Sidang MPR yang harus dihadiri sedikitnya 2/3 anggota MPR.

Melalui forum ini, Gus Jazil menyampaikan kepada masyarakat bahwa sampai hari ini belum ada usulan tersebut. Yang ada adalah MPR bersepakat untuk melakukan amandemen terbatas terkait PPHN. Soal mengapa belum ada usulan, karena masih ada dua pandangan yang berbeda, yakni: *pertama*, apakah haluan negara masuk konstitusi, dan kedua, haluan negara hanya masuk di UU saja.

“Menurut saya pribadi, PPHN ini menjadi penting jika fraksi-fraksi dan kelompok DPD di MPR sepakat untuk menempatkan haluan

negara dalam konstitusi sehingga rencana pembangunan nasional menjadi terarah dan berkesinambungan,” papar Gus Jazil.

Intinya, lanjut Gus Jazil, PPHN tetap menjadi materi yang terus dikaji serius di MPR dan diupayakan agar berhasil menjadi usulan bersama, agar bisa diajukan dalam amandemen terbatas UUD. “Tentu kajian tersebut melibatkan masyarakat juga, makanya MPR gencar melakukan serap aspirasi ke berbagai daerah. Saya berharap, selain berpartisipasi, rakyat juga berdoa agar semuanya lancar demi bangsa dan negara,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prof. Juanda mengungkapkan bahwa haluan negara masuk dalam konstitusi atau hanya dalam UU saja memang sudah menjadi perbincangan di tengah masyarakat.

Ada dua hal menarik yang mesti dicermati, lanjutnya, yaitu: *pertama*, jika haluan masuk dalam UU maka keuntungannya adalah antara lain, tidak perlu mengubah UUD, lalu mudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kerugiannya adalah rentan politisasi.

Kedua, jika haluan negara masuk dalam konstitusi maka keuntungannya adalah haluan itu menjadi pedoman seluruh lembaga negara, termasuk presiden dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta melaksanakan pembangunan secara nasional.

“Menurut saya, karena ini adalah haluan negara bukan haluan pemerintah, maka harus masuk ke konstitusi karena jangkauannya yang luas. Ini harus terus dikaji secara mendalam oleh MPR agar keinginan masyarakat terkait haluan negara bisa terwujud,” tandasnya. □





## Vaksinasi Covid-19 Digelar di Lingkungan Setjen MPR RI



**S**EKRETARIAT Jenderal MPR RI menggelar vaksinasi Covid-19. Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR Senayan, Jakarta, ini dilaksanakan secara bertahap. Vaksinasi tahap pertama berlangsung selama dua hari, yakni: 10 Maret 2021 dan 12 Maret 2021.

Vaksinasi tahap kedua juga dilaksanakan dua tahap, yakni pada 25 Maret 2021 dan 26 Maret 2021. Vaksinasi ini dilakukan untuk seluruh pegawai di lingkungan kerja Setjen MPR RI sebagai upaya pencegahan infeksi virus Corona yang masih terus mewabah dan untuk memberi rasa aman serta nyaman di

lingkungan MPR.

Proses vaksinasi yang dilakukan tim kesehatan Setjen MPR RI dibagi beberapa fase. Fase pertama pendaftaran, lalu fase screening kesehatan, kemudian fase penyuntikan vaksin, terakhir fase observasi selama 30 menit di lokasi.

Walaupun pada awalnya ada sebagian peserta yang tegang bahkan ada yang secara terang-terangan mengaku takut jarum suntik, namun secara keseluruhan pelaksanaan vaksinasi berjalan lancar dan direspon baik seluruh peserta. □

DER



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



## IWAPI Mengunjungi Gedung MPR RI



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KATAN Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) melakukan kunjungan ke gedung MPR RI pada 1 April 2021. Kunjungan organisasi pengusaha wanita Indonesia yang dipimpin Ketua Umum IWAPI, Nita Yudhi, ini bertemu dengan Pimpinan MPR Fadel Muhammad, dan berfoto bersama.

Dalam kunjungan ke gedung MPR, rombongan IWAPI menyempatkan diri menyambangi sejumlah lokasi di seputar MPR, termasuk berfoto bersama di tangga Gedung Bulat atau Gedung Hijau yang menjadi ikon gedung parlemen kebanggaan rakyat Indonesia. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan IWAPI untuk memperdalam

karakter bangsa.

Seluruh anggota DPP IWAPI yang ikut serta dalam kunjungan tersebut tampak antusias berkeliling gedung rakyat tersebut. Bahkan, mereka semua tampak sibuk berfoto selfie menggunakan kamera handphone masing-masing, atau berfoto bersama.

Menurut pengurus IWAPI, kunjungan ini adalah bentuk kecintaan mereka kepada negara dan bangsa, sehingga diharapkan akan tercermin dalam setiap kegiatan kemasyarakatan IWAPI. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**Dr. Evita Nursanty, M.Sc.**, Anggota MPR Fraksi PDI Perjuangan

## Kita Harus Meningkatkan Kualitas Produk Dalam Negeri

**I**NDONESIA menjadi pangsa pasar potensial karena jumlah penduduknya yang besar. Tidak heran apabila Indonesia dibanjiri produk-produk, mulai dari bahan makanan, perlengkapan rumah tangga, hingga elektronik dan otomotif, dari luar negeri. Perdagangan bebas Asia Pasifik (AFTA) menjadi salah satu pemicu masuknya barang-barang dari luar negeri. Lalu, bagaimana dengan produk-produk sejenis buatan dalam negeri?

Di pasar, masyarakat cenderung untuk memilih produk dari luar. Hal ini membuat produk dalam negeri makin tersisih. Karena itu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan seruan untuk mencintai dan membeli produk dalam negeri. Seruan itu disampaikan saat memberi sambutan dalam pembukaan Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2021 pada Kamis, 4 Maret 2021. Joko Widodo mengajak semua pihak untuk menggaungkan benci produk asing.

Bagaimana tanggapan anggota parlemen terhadap kampanye dan slogan untuk mencintai produk dalam negeri? Untuk menjawab pertanyaan itu, Majelis mewawancarai anggota MPR dari Fraksi PDI

Perjuangan Dr. Evita Nursanty, M.Sc. Berikut wawancara dengan anggota Komisi VI DPR yang membidangi masalah perdagangan. Petikannya:

**Indonesia merupakan pasar potensial karena jumlah penduduknya yang besar. Karena itu, Indonesia dibanjiri produk-produk dari luar, mulai dari produk makanan hingga sandang (tekstil), elektronik, otomotif, dan lainnya. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap membanjirnya produk asing di negeri sendiri?**

Saya lebih suka untuk tidak menggeneralisir semua produk. Pertama, ada produk yang sudah ada di Indonesia lalu masuk produk yang entah masuknya legal atau illegal, dan dijual dengan harga lebih rendah. Kedua, ada produk yang memang belum ada di Indonesia. Ketiga, ada produk yang ada di Indonesia, tapi masuk produk luar yang memang lebih berkualitas dan juga tentu lebih mahal. Jadi, di sini saya tidak akan menyinggung soal produk yang memang tidak ada di Indonesia, tapi produk yang sudah ada tapi digempur dari luar negeri.

Kelihatannya para pedagang itu hanya melihat margin keuntungan dari impor. Bahkan, bila perlu dia dapat barang tidak sesuai standar nasional, yang penting murah. Ini menyedihkan. Saya juga makin prihatin karena sepertinya marketplace tidak berpihak kepada produk lokal Indonesia. Sedih kita. Bahkan tidak jarang kita melihat kampanye di berbagai media sosial yang mengajari anak-anak muda kita di Indonesia untuk melakukan impor dari negara tertentu dan diberikan fasilitas kemudahan impor, bahkan boleh utang dulu. Mereka diajari dari A sampai Z. Mungkin salah kita juga kenapa kita tidak melakukan hal yang sama untuk mendorong anak-anak muda kita melakukan ekspor.

Itu baru dari sisi perdagangan. Belum lagi dari sisi industri. Sisi industrinya, kita harus meningkatkan kualitas produk dalam negeri kita, entah proses produksinya, kemasan maupun sebaran lini produk turunannya.

**Bukankah membanjirnya produk dari luar ke Indonesia karena kita juga terikat dengan perjanjian perdagangan bebas seperti AFTA?**

Saya selalu katakan jangan salahkan



globalisasi atau perdagangan bebas. Tapi kritikalah kenapa kita tidak bisa memantulkannya dengan sebesar-besarnya. Presiden Joko Widodo juga kan tidak menyalahkan AFTA dan lain lain, sama sekali tidak. Ketika kita masih terus membenahi sisi perdangan dan industri kita maka keputusan akhir itu ada di tangan konsumen, yaitu masyarakat kita. Bagaimana mungkin kita menutup diri untuk produk luar? Kan, tidak bisa. Tidak ada negara yang hanya ekspor, tapi impor juga.

**Apakah alasan-alasan itu yang mendorong Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan berupa seruan untuk mencintai produk-produk dalam negeri, dan membenci produk asing. Apa tanggapan Ibu terhadap seruan presiden ini?**

Pernyataan Presiden Joko Widodo itu harus dilihat dari makna yang paling konkret, yaitu mencintai produk dalam negeri. Jadi, jangan langsung berpikir negatif dulu. Ada semangat untuk melindungi produk lokal Indonesia. Apalagi saat ini ketika pandemi Covid-19 kita membutuhkan dukungan kuat bagi pertumbuhan produk lokal.

Bayangkan sulitnya kondisi yang dialami produk lokal kita yang berhadapan dengan produk luar yang masuk, baik dengan cara legal maupun ilegal. Kita mendengar barang elektronik itu 60% barang impor dan 70% barang ilegal. Itu merusak banyak hal. Karena itu, dalam kondisi seperti ini memang diperlukan imbauan kepada masyarakat agar membeli produk-produk lokal, sebab keputusan untuk membeli ada di masyarakat sebagai konsumen.

Kita memang punya tugas besar untuk memperkuat daya saing produk kita. Namun, perlu diingat, kita memiliki banyak produk yang juga dikenal sebagai produk terbaik di dunia. Tapi, produk itu menghadapi tantangan karena masuknya produk yang sama yang murah dan kualitasnya justru buruk.

**Masyarakat cenderung memilih produk dari luar (asing). Ada anggapan produk dari luar lebih berkualitas dan murah. Ini membuat produk buatan Indonesia kalah bersaing dengan produk dari luar?**

Seruan Presiden semangatnya tegas, yaitu melindungi produk dalam negeri dari hantaman yang tidak adil dari produk luar.

Apakah karena produk dalam negeri kalah bersaing dengan produk luar negeri? Tidak juga. Sekali lagi produk dalam negeri kita banyak yang bagus, tapi kemudian dihadapkan dengan produk yang kurang lebih sama atau malah di bawahnya, dan akhirnya merusak pasar.

Kita memang terus membenahi sisi industri kita agar dapat membuat produk yang lebih efisien dan lebih berkualitas. Kita perlu strategi baru untuk bisa memperkuat produk lokal Indonesia yang memiliki daya tahan dan daya saing secara global. Saat bersamaan kita perlu kesadaran baru untuk makin mencintai produk dalam negeri. Ini perlu



komitmen bersama, dan semua harus mengambil bagiannya masing-masing.

**Tapi di sisi lain, kita melakukan banyak impor seperti impor beras, garam, obat-obatan dan lain-lain. Bukankah ini merupakan paradoks?**

Soal impor beras, garam, gula, obat-obatan memang agak berbeda. Kami sendiri di PDI Perjuangan telah dengan tegas menyampaikan ketidaksetujuan impor beras misalnya. Alasannya jelas karena stok beras kita masih memadai dan momentumnya pun kurang tepat, karena kita sedang panen dan Bulog harus dipastikan menyerap panen petani. Jadi, dalam konteks beras, garam, gula itu ada aspek lain yang harus diperhitungkan, karena memang menyangkut

hajat hidup orang banyak. Ini berbeda dengan produk-produk lain, seperti tekstil, elektronik, kosmetika, otomotif dan lainnya.

Kemudian untuk produk obat-obatan, ini memang masalah klasik karena sejak lama kita sangat tergantung dengan impor bahan baku. Ini harus kita selesaikan masalahnya agar kita bisa mandiri. Kita punya pengalaman pahit ketika pandemi Covid-19 ini kita tidak bisa berbuat saat membutuhkan APD, obat-obatan dan lainnya.

**Untuk mendorong produk lokal, pemerintah mengampanyekan cinta produk buatan Indonesia. Tetapi, sejauh ini, tampaknya kampanye itu kurang berhasil. Apa tanggapan Ibu?**

Jadi kampanye harus dilakukan berkelanjutan, jangan berhenti, karena ini memang perjuangan sepanjang waktu. Kemudian kampanye harus bersama-sama alias gotong-royong. Semua kementerian/ lembaga terlibat, dan semua daerah juga diikuti. Pada saat bersamaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, kemudian KADIN, atau asosiasi bisnis atau industri terlibat di dalamnya.

**Bagaimana menurut Ibu agar kita bisa mencintai produk lokal?**

Saya sepakat, mari kita mulai dengan penggunaan produk dalam negeri dalam berbagai proyek pemerintah yang diwujudkan melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) dengan mengutamakan barang dari dalam negeri.

Kedua, membina produk lokal Indonesia menjadi pemain global secara sistematis. Karena saya yakin, orang Indonesia itu mudah sekali jatuh cinta kepada produk yang namanya sudah berkibar atau diterima secara internasional. Ini sekaligus untuk mengampanyekan bahwa produk Indonesia itu produk terbaik dan ada kebanggaan untuk menggunakan produk Indonesia.

Ketiga, regulasi dan juga pengawasan yang ketat untuk menindak produk luar yang masuk secara ilegal ke Indonesia. Keempat, melakukan pengawasan marketplace yang tidak mendukung produk lokal Indonesia, atau yang sengaja melakukan tindakan yang tidak adil atau merugikan produk Indonesia. Kelima, kampanye cinta produk Indonesia secara terus-menerus. □

# Penjual Tahu

## *Nan Cantik*



**T**AHU goreng memang cemilan favorit keluarganya. Rasanya enak. Karena mengaku sebagai orang yang kepoan atau rasa ingin tahunya tinggi, **Amanda Nuraini** pun mulai mempelajari cara bikin tahu goreng. Akhirnya dia pun menemukan resep yang tepat untuk membuat tahu goreng yang rasanya enak.

Setelah menguasai resep tahu goreng yang enak, Amanda bersama suaminya lalu membuka outlet Tahu Krispi Fatmawati. Amanda yang memang berparas cantik ini turun tangan langsung, menggoreng sendiri tahu dagangannya. Peristiwa itu direkam dalam video secara diam-diam oleh pembeli dan di-share di media sosial. Dan, viral.

Amanda menceritakan itu ketika berbincang dalam program “Ngompol” bareng bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo, Kamis (18/3/2021). “Video saya sedang menggoreng tahu di media sosial itu asli, tidak dibuat-buat,” kata Amanda dalam acara “Ngompol” tersebut. “Saya gak nyangka akan viral,” katanya.

Dan, dia bersyukur, video itu ternyata mendatangkan rezeki buat Amanda dan keluarga. Pembelipun jadi ramai. Untuk itu, dia berpesan kepada generasi muda, jangan malu membuka usaha sendiri. “Temukan passion kalian, asahlah keterampilan dan lihat pangsa pasar, pasti lambat laun akan berhasil,” katanya memberi motivasi. □

DER



*Amanda Nuraini*



## Industri *Film Indonesia* Mati Suri

**R**EZA RAHADIAN, termasuk salah seorang artis film, sangat khawatir dengan perkembangan industri film nasional di masa pandemi ini. Pandemi yang telah berlangsung setahun lebih sangat memukul industri perfilman nasional. “Saya berharap pemerintah membantu dunia film kita agar tak hancur parah,” katanya.

Bantuan yang diharapkan dari pemerintah, menurut Reza, adalah pemerintah hendaknya membuat kebijakan dan penerapan aturan protokol kesehatan di gedung-gedung bioskop, sehingga penonton merasa aman. Soalnya, selama pandemi ini, penonton masih banyak yang khawatir untuk menonton film di bioskop.

Jadi, lanjut pemeran BJ. Habibie dalam film ‘Habibie dan Ainun’ ini, dunia film butuh dukungan dari pemerintah untuk mengampanyekan bahwa menonton film di bioskop aman, karena protokol kesehatannya sangat ketat. “Mari kampanyekan menonton film di bioskop itu aman,” pintanya. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

*Reza Rahardian*



*Astrid Sartiasari*

## Bertahan di Masa Pandemi

**P**ANDEMI Covid-19 tak tahu kapan akan berakhir ini telah membuat para seniman, terutama seniman musik, termasuk di dalamnya artis penyanyi, mengalami kesulitan. Kondisi itu dirasakan oleh artis penyanyi, **Astrid Sartiasari**. “Ya, mau gimana lagi, mau tak mau kita harus menyesuaikan diri. Kita harus bertahan,” ujarnya.

Salah satu kiat yang dilakukan artis untuk tetap bertahan adalah melakukan berbagai adaptasi. “Aku sendiri melakukan adaptasi, misalnya dalam hal rekaman, kalau biasanya di studio tapi dalam setahun ini lebih banyak rekaman di rumah, konser juga melalui aplikasi zoom,” katanya.

Pelantun lagu ‘Jadikan aku yang kedua’ ini mengaku, sangat tidak nyaman dengan adaptasi tersebut. “Gimana mau nyaman, konser menyanyi pakai zoom, tidak dapat feelnya, tidak berinteraksi dengan penonton dan fans. Haduh .., pokoknya berat bagi aku,” imbuhnya. Dia berharap kondisi ini segera normal kembali. □

DER



## Situ Gintung Merah Merona di Saat Sore Hari

**S**AAT sore menjelang, ketika mentari semakin condong ke barat, suasana di kawasan danau Situ Gintung, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, terasa makin tenang. Sisa panas sinar matahari—yang sejak pagi hari menyirami kawasan itu—perlahan berkurang. Keteduhan semakin sempurna karena saat bersamaan hembusan angin terasa semakin kencang, suasananya bak sedang berada di tepi pantai.

Suasana tersebut mengundang warga sekitar situ, khususnya kaum muda-mudi, untuk datang serta menikmati suasana yang kian teduh. Di sana tersedia track yang bisa pengunjung gunakan untuk kegiatan berolahraga mengelilingi situ. Juga bisa jogging dan berlari-lari kecil. Dan, ada pula yang berolahraga goes alias mengayuh sepeda.

Tak jauh dari sana terlihat sekelompok orang yang memanfaatkan suasana di Situ untuk memuaskan hobi adu main layang-layang. Itu wajar karena di tempat tersebut tiupan angin yang diperlukan untuk mengangkat layang-layang ke angkasa bertiup cukup kencang. Dan, itulah membuat

kawasan Situ Gintung ideal untuk tempat bermain layang-layang.

Apalagi, di kawasan itu sangat terbuka. Nyaris tidak ada kabel yang melintang, dan mengganggu permainan. Mereka membawa cukup banyak peralatan yang dibutuhkan untuk bermain layang-layang, seperti benang dan tentunya juga layangannya. Dan, itu membuat mereka tak perlu khawatir kehabisan layangan maupun benang.

Di saat matahari kian redup, dari kejauhan, tampak ada beberapa pemancing yang tekun menunggu joran mereka disambar ikan. Mereka terlihat begitu sabar menanti, tanpa rasa bosan maupun gusar. Yang jelas, memancing itu membuat mereka gembira.

Selain pemancingan, di sudut lain area Situ Gintung, juga tampak seseorang menebar jaring. Itu adalah kegiatan menangkap ikan menggunakan jaring atau jala. Berkali-kali ia melempar jaringnya, meski tidak setiap lemparan menghasilkan ikan. Namun, ia terus mencoba sembari berharap akan berhasil dan berhasil lagi.

Karena begitu banyak pengunjung yang datang ke kawasan Situ Gintung maka

mengundang sejumlah pedagang untuk mengadu untung di sana. Mereka menjajakan dagangannya di tempat itu. Berbagai jenis makanan dan minuman ada di sana. Mulai dari gorengan, bakso, somai, dan berbagai jenis makanan tradisional Betawi.

Tak hanya itu, beberapa warung tenda yang menjajakan kopi seduh menambahkan daya tarik untuk para pelanggannya dengan menyediakan rental karaoke. Dan, itu membuat hingar bingar suara musik dan nyanyian yang nyaris tak pernah berhenti.

Begitulah suasana yang ditemukan wartawan Majalah *Majelis* saat singgah di pintu air Situ Gintung, tepatnya persis di atas bendung penahan air dari danau seluas 21,4 Ha itu, menjelang Ramadan lalu. Sekilas kesan yang diperoleh *Majelis* saat berada di sana, kawasan tersebut sudah bukan hanya berfungsi sebagai bendungan, tapi Situ Gintung juga sudah menjadi kawasan tujuan wisata. Apalagi, kawasan itu sudah dikelola semakin apik, layaknya tempat wisata.

“Tempat ini sangat nyaman, apalagi saat sore begini. Udara segar, angin bertiup kencang, membuat kita betah berlama-lama





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

menikmati pemandangan alam di sini. Dulu sebelum pandemi suasananya bisa lebih ramai, tetapi selama berjangkitnya corona, pengelola Situ selalu membatasi keramaian,” kata Djafar Sidiq, pensiunan PNS yang mengaku kerap ke Situ Gintung untuk berolah raga.

Djafar mengaku senang melakukan olahraga di Situ Gintung, karena track joggingnya lurus dan rata. Kondisi itu sangat mendukung untuk kegiatan berolah raga, khususnya jalan-jalan santai bersama keluarga. Ditambah lagi pemandangannya cukup indah. Udaranya bersih dan teduh

karena banyak pepohon tumbuh menjulang.

Selain itu, hamparan air yang beriak-riak tak berkesudahan ditiup angin, menambah keindahan kawasan tersebut. Apalagi saat di mana siang berganti malam, ketika matahari memancarkan rona laiknya benang-benang sutera beraneka warna. Pemandangan itu menjadi pengalaman tersendiri, sulit dicari tandangnya.

### Tragedi 2009

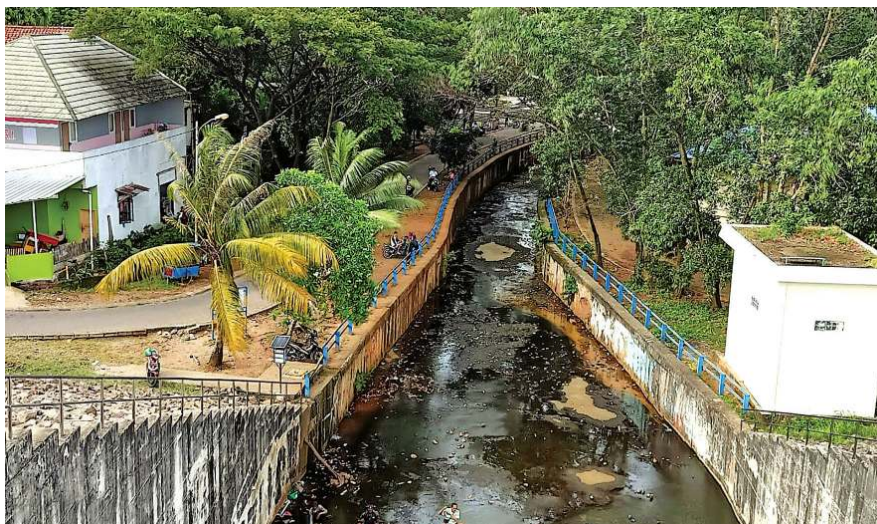
Melihat keramaian dan keindahan Situ Gintung di saat senja, tidak berlebihan bila tempat tersebut menjadi kawasan untuk

kegiatan wisata olahraga bagi masyarakat, atau untuk kegiatan wisata lainnya. Apalagi, tempat tersebut sangat strategis. Berada di tepi jalan antara Ciputat dan Lebak Bulus, dan dapat diakses dari berbagai pintu masuk. Tak mengherankan jika mereka yang kerap mengunjungi tempat ini, berasal dari berbagai wilayah di sekitar Situ.

Kenyataan tersebut bisa membuat orang terlupa bahwa di balik kecantikan Situ Gintung, danau buatan, itu juga pernah membuat petaka yang memakan korban jiwa hingga 99 orang. Peristiwa itu terjadi pada 27 Maret 2009 pukul 04.00 dini hari. Penyebabnya, di beberapa titik bendungan buatan itu jebol sepanjang 30 m dengan ketinggian 6 m. Akibatnya, air bendungan sebanyak 2,1 juta meter kubik menerobos ke luar bendungan laiknya air bah, dan menerjang pemukiman penduduk yang terletak di bawah tanggul.

Kini setelah dua belas tahun berlalu pasca bobolnya Situ Gintung, kondisi di sana sudah kembali normal. Bahkan lebih molek. Karena itu, amat disayangkan jika keberadaannya tidak dioptimalkan untuk kehidupan manusia. Situ Gintung menyimpan banyak manfaat bagi kehidupan. Bukan hanya untuk wisata, tetapi juga membantu menahan banjir yang jamak melanda kawasan Ibukota dan sekitarnya. □

MBO





H,M. Syukur, SH., MH.

# Tidak Seperti Kacang Lupa Kulit



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**T**IGA periode sudah, anggota MPR RI dari Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, M. Syukur, S.H., M.H., (40), menduduki jabatan sebagai anggota legislatif mewakili Provinsi Jambi. Itu berarti, sudah lebih dari seperempat usianya digunakan untuk membangun daerah melalui jalur DPD.

Nampaknya, Syukur masih istiqamah melanjutkan amanat dari konsituen yang memilihnya menjadi anggota DPD. Ia tetap konsisten tetap melanjutkan kiprahnya di DPD dan tidak ingin meloncat ke DPR, meski di DPD tugas wewenangnya terbatas. Salah satu alasannya, karena di DPD dia merasa lebih leluasa dibanding di parpol yang memiliki keharusan mengikuti kehendak partai dan pimpinannya.

Kesuksesan M. Syukur menjadi anggota DPD dalam tiga kali berturut-turut dalam pemilihan legislatif adalah keberhasilan tersendiri. Tidak banyak anggota DPD yang bisa terus terpilih hingga tiga kali pileg, seperti yang mampu diraih Syukur. Karena itu, wajar jika banyak yang bertanya, apa rahasianya sehingga bisa terus terpilih menjadi anggota DPD. Dia pertama kali ikut kontestasi pemilihan anggota DPD RI pada Pileg 2009, dan terpilih.

“Saya berusaha tetap menginjak bumi, tidak melupakan konsituen

yang telah memilih saya menjadi anggota DPD. Saya berkeliling menemui pemilih saya, sesaat setelah dinyatakan terpilih menjadi anggota DPD untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Saya juga selalu datang menemui masyarakat saat reses, berdialog dan makan bersama, tidak berjarak sama sekali,” kata pria kelahiran Sungai Manau, Merangin, Jambi, 15 Juli 1981, ini kepada majalah *Majelis*, di tengah kesibukannya bermain bulutangkis beberapa waktu lalu.

Menyaksikan cara Syukur berinteraksi dengan para pemain bulutangkis itulah *Majelis* merasakan betul, Syukur adalah pribadi sederhana dan apa adanya. Ia bisa bergaul dengan siapa saja, termasuk dengan pegawai di lingkungan Setjen MPR. Syukur tidak segan bercanda dengan semua orang, termasuk *office boy* lapangan bulutangkis, tempat dia biasa bermain bulu tepok.

Tak salah jika ia kerap dijuluki sosok yang bersahaja. Di kalangan orang yang mengenal, Magister Hukum lulusan Universitas Jayabaya ini dianggap sebagai pribadi yang seadanya. Biasa mendatangi dapil tanpa pengawalan, tak pakai protokoler. Bahkan saat berada di dapil, M. Syukur selalu membuka pintu bagi masyarakat yang ingin menemuinya. Rumahya senantiasa terbuka bagi masyarakat luas.





Apalagi, ia juga kerap mampir di warung-warung pinggir jalan, bukan restoran-restoran mahal yang hanya terjangkau bagi golongan mampu saja. Di tempat seperti ini, Syukur tak sungkan menerima masukan dan aspirasi dari daerah yang diwalikinya.

Selain sibuk menunaikan tugasnya sebagai anggota DPD, putera keempat dari lima bersaudara pasangan (alm) H. Usman dan Hj. Zainab ini selalu menyempatkan diri berolahraga, khususnya bulutangkis. Setidaknya, dua kali dalam seminggu, ia bermain bulu

tangkis. Olahraga ini dipilih karena tidak membutuhkan banyak orang untuk bisa memainkannya. Cukup dengan satu teman maka ia sudah bisa bermain bulu tepok.

Meski memiliki hobi bulutangkis, namun Syukur sebenarnya lebih dulu menyukai olahraga voli. Ia pernah mewakili Provinsi Jambi untuk kejuaraan di tingkat nasional. Tetapi kemampuannya di olahraga bola voli berangsur ditinggalkan. Salah satu sebabnya, karena untuk memainkan bola voli butuh 12 orang pemain, sehingga memerlukan



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

waktu lebih banyak unuk bisa bermain voli.

“Sekarang ini yang penting olahraga agar bisa membakar kalori dalam tubuh, bukan prestasi lagi. Karena memang yang dibutuhkan adalah kesehatan,” kata Syukur memberi alasan.

Selain menjadi pemain bola voli, Syukur juga sempat mencoba dunia peran. Ia pernah ikut bermain dalam film layar lebar dan sinetron. Tak cukup itu saja, ia juga pernah mencicipi dunia modeling dan bintang iklan.

### Pembalakan Liar

Tetapi, glamour yang ada di dalam dunia intertainment, tidak mampu menahan alumni SMA Negeri 5 Jambi ini bertahan lebih lama. Dia hanya sempat menekuni dunia ini hanya beberapa waktu saja, untuk kemudian ia meninggalkan dunia hiburan tersebut. Lepas dari dunia hiburan, ia banting stir untuk memulai kiprahnya di dunia politik.

Keputusannya menjejalkan kaki di politik dipicu oleh keprihatinannya terhadap kondisi hutan di Provinsi Jambi banyak yang rusak parah akibat pembalakan liar. Sejak itu, Syukur kerap menjumpai masyarakat untuk mengadvokasi, sekaligus memberi kesadaran akan pentingnya kelestarian hutan. Bersama kelompok masyarakat yang punya kesadaran terhadap pentingnya hutan, Syukur juga berusaha mempertahankan hutan agar tetap hijau. Dan, menghidupkan kembali hutan yang terlanjur rusak.

“Ini perjuangan yang melelahkan, banyak yang pro tapi tidak sedikit yang kontra. Alhamdulillah, banyak juga kasus yang akhirnya dapat kita selesaikan,” ujar Syukur.

Sadar bahwa tantangan yang dihadapinya tidak ringan, Syukur pun berfikir untuk mencari cara yang lebih efektif untuk mendukung perjuangannya. Karena itu ia memilih jalan politik. Dia meyakini, melalui jalur politik dia bisa memperjuangkan keprihatinannya terhadap kerusakan hutan di tingkat pusat.

Karena itulah pada Pileg 2009 Syukur mencalonkan diri menjadi anggota DPD dari Dapil Jambi. Saat itu usianya baru 28 tahun. Berkat usaha keras dan jaringan yang dimilikinya, Syukur berhasil melenggang ke Senayan. Dia termasuk salah satu dari empat anggota DPD mewakili Provinsi Jambi.

Di tengah jalan, Syukur melihat ada potensi yang memberi manfaat lebih besar kepada daerah. Ia pun ikut kontestasi pemilihan Bupati Merangin pada 2013. Tetapi asanya itu kandas, ia kalah dan gagal menjadi bupati. Pada 2018 Syukur mencoba untuk mengulang kembali keinginannya menjadi Bupati Merangin. Namun, upayanya yang kedua itu layu sebelum berkembang. Dan, Syukur pun urung ikut kontestasi pemilihan Bupati Merangin.

Meninggung soal pandemi Covid-19 di dapilnya, Syukur mengatakan, kasus corona di Jambi tidak sebesar di Jakarta atau Pulau Jawa. Di Jambi, jumlah penyintas Covid tidak terlalu banyak. Tidak sampai membuat rumah sakit penuh atau sampai menolak pasien, laiknya di Jakarta dan Pulau Jawa.

Minimnya penderita Covid-19 di Jambi bisa jadi karena udara di ‘Bumi Angso Duo’ lebih baik dibanding Ibukota Jakarta. Atau karena jumlah penduduknya tidak sebanyak Jakarta, sehingga penularannya juga terbatas. Apalagi, penduduk Jambi lebih banyak tinggal terpisah, tidak menumpuk di satu tempat seperti Jakarta.

“Tetapi harus diakui kesadaran masyarakat memeriksakan diri ke dokter sangat minim. Akses warga pada kesehatan juga tidak sebaik Jakarta. Sehingga kemungkinan terpapar Covid-19 tapi tidak diketahui menjadi sangat besar. Apalagi, jumlah penduduk yang melek teknologi dan bisa mengakses informasi juga sedikit,” katanya.







Tapi yang pasti, menurut sepengetahuan Syukur, jumlah penderita Covid-19 di Jambi relatif sedikit. Karena itu, sebagian masyarakat beranggapan bahwa Covid hanya ada di Jakarta, tidak sempat ke Jambi. Dan, itu membuat kerumunan masyarakat, seperti di pasar, tempat ibadah, dan tempat-tempat pendidikan, sudah berjalan normal sebagaimana biasa.

“Lagi pula kalau anak-anak harus belajar jarak jauh terlalu banyak kendalanya. Bukan hanya soal ketersediaan gawai, tapi juga kemampuan beli pulsa, dan posisi daerah yang tidak semuanya terjangkau internet,” ujar Syukur.

### Menjadi Yatim

Meski sukses menjadi anggota Legislatif, M. Syukur sesungguhnya tidak pernah bercita-cita menjadi politisi. Semasa kecil, dia bercita-cita ingin menjadi polisi atau tentara. Tetapi, keinginan itu menguap begitu saja, hingga akhirnya dia menjadi politisi seperti saat ini.

Keberhasilan yang dicapai Syukur ini merupakan buah perjuangan yang tidak gampang. Apalagi, saat ia berumur 5 tahun, ayahnya dipanggil menghadap ke haribaan Allah SWT. Praktis ia hanya mendapat kasih sayang dari ibunya, yang menjadi orangtua tunggal.

Hidup dengan ibu sebagai orangtua tunggal membuat Syukur



cepat dewasa. Ia mandiri di usia relatif dini. Melihat kerja keras sang ibu menghidupi anak-anaknya, menuntut Syukur untuk selalu siap membantu meringankan pekerjaan ibunya.

Beruntung. Sang ibu — yang hanya seorang ibu rumah tangga— memiliki sebidang kebun dan sawah peninggalan ayahnya. Sehingga kehidupan keluarga Syukur bisa terhindar dari kemiskinan dan kekurangan. Berkat hasil kebun dan sawah itulah Syukur bisa melanjutkan pendidikan hingga pascasarjana di Jakarta

“Untuk menopang kebutuhan keluarga, ibu membuka toko kecil-kecilan. Dari sanalah kami belajar hidup, termasuk berhemat, kesederhanaan, dan bijaksana menghadapi persoalan,” cerita Syukur. □

MBO

P rofil

**Nama** : **H.M. Syukur, S.H, M.H.**  
**Tempat/Tg. Lahir** : Sungai Manau, Merangin, Jambi, 15 Juli 1981

**PENDIDIKAN**

- SD Negeri I Sungai Manau
- SMP Negeri I Sungai Manau
- SMA Negeri 5 Jambi
- S1 Fakultas Hukum Jayabaya
- S2 MH Jayabaya

**JABATAN**

- 2009-2024 anggota DPD RI Dapil Jambi (3 periode)
- Anggota MPR RI
- Anggota Banggar MPR RI

## Menyoal Negara Kesejahteraan

**B**ERKEMBANGNYA ideologi liberalisme dan kapitalisme yang lebih mengutamakan aspek kebebasan ekonomi dan penguasaan modal menjadi faktor pemicu munculnya konsep negara kesejahteraan (welfare state). Konsep ini hadir sebagai otokritik terhadap kegagalan pasar (market failure) dan kegagalan negara (state failure) dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Ideologi pasar bebas yang berkembang secara luas di berbagai negara, tidak hanya negara-negara maju tapi juga negara-negara berkembang, justru berdampak pada terciptanya ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat; yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terbelakang.

Konsep negara kesejahteraan tidak hanya hadir sebagai otokritik terhadap liberalisme dan kapitalisme, tapi juga sebagai reminder kepada negara untuk hadir dan menjalankan tugasnya dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Negara diharapkan tidak diam dan berpangku tangan saja dengan hanya menjadi pengawas terhadap aktivitas dan persaingan di antara aktor-aktor ekonomi, tapi juga turut berperan serta secara proaktif melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Posisi negara sebagai pengawas dalam perspektif liberalisme dan kapitalisme yang mengedepankan persaingan bebas tidak cocok dengan prinsip keadilan, karena aktor-aktor ekonomi cenderung berupaya menguasai modal dan keuntungan sebanyak-banyaknya.

### Pancasila dan Konstitusi

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai sebuah entitas politik dan sosial budaya pada dasarnya sudah dirancang oleh para pendiri bangsa (founding fathers) sebagai negara kesejahteraan sejak awal diproklamkan.

Hal ini dapat dirunut secara jelas pada Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan

konstitusional. Sila kelima Pancasila sangat kental muatannya akan prinsip keadilan dalam ekonomi. Preambul UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat secara eksplisit menyebutkan tentang “kesejahteraan umum” sebagai tujuan nasional.

Jadi dengan kata lain, konsensus dasar kebangsaan Indonesia juga memberikan pijakan dan amanah dalam mewujudkan sebuah negara yang mampu memelihara kesejahteraan masyarakatnya.

Ada fenomena menarik ketika saya melakukan tinjauan komparatif berbasis konstitusi terhadap konsep negara kesejahteraan ini. Pasal-



pasal tentang kesejahteraan dalam konstitusi Indonesia (UUD NRI Tahun 1945 dan amendemennya) ternyata jumlahnya lebih banyak apabila dibandingkan dengan negara lain yang memang meletakkan pembentukan konstitusinya bagi terwujudnya negara kesejahteraan, seperti Norwegia, Amerika Serikat, Jepang, dan Malaysia.

Norwegia hanya mencantumkan tiga pasal saja dalam konstitusi, Jepang bahkan hanya satu pasal. Bandingkan dengan Indonesia



Oleh:  
**Dr. H. Jazilul Fawaid, SQ., MA.**  
Wakil Ketua MPR RI



yang memiliki empat belas pasal kesejahteraan. Akan tetapi yang membuat miris adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) negara-negara tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia.

### **Kebijakan Ekonomi dan Politik Hukum**

Realitas empirik tersebut sudah selayaknya menjadi bahan perenungan bagi kita semua, sekaligus bahan evaluasi untuk kebijakan-kebijakan ekonomi yang sudah ditempuh hingga saat ini. Belum mampunya kita menjadi negara kesejahteraan yang paripurna

masyarakat. Investasi masuk tapi hanya bersifat padat modal dan tidak padat karya, sehingga tidak membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Hal ini harus digarisbawahi dan dijadikan pedoman bagi para perumus kebijakan.

Selain melalui saluran kebijakan ekonomi, upaya yang tak kalah penting dan mendasar dalam mewujudkan negara kesejahteraan adalah melalui mekanisme politik hukum. Dalam perspektif Mac Iver, negara tidak hanya dipandang sebagai alat kekuasaan semata (the instrument of power), tapi lebih dari itu, negara juga memainkan peran sebagai alat pelayanan (an agency of services).

Dengan memiliki sudut pandang sedemikian, setidaknya ada enam aksi yang bisa dipedomani. *Pertama*, pengarusutamaan hak-hak asasi sosial ekonomi masyarakat. *Kedua*, pertimbangan efisiensi dan manajemen lebih dikedepankan ketimbang pertimbangan politis. *Ketiga*, hak milik tidak bersifat mutlak (ada hak orang lain di dalamnya).

*Keempat*, negara tidak hanya menjaga ketertiban, tapi juga mewujudkan kesejahteraan. *Kelima*, kaidah-kaidah administrasi akan semakin banyak mengatur aspek sosial ekonomi. *Keenam*, akan terwujud negara hukum material yang mengutamakan terwujudnya kesejahteraan material bagi masyarakat.

Persoalan kesejahteraan sudah menjadi *concern* banyak negara, termasuk Indonesia. Negara tidak hanya berdiri sebagai bangunan politis yang bertugas mewujudkan keamanan dan ketertiban saja, tapi juga bertanggung jawab dalam menopang terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Pancasila dan konstitusi telah memberikan panduan dan pijakan dalam mewujudkan cita-cita negara kesejahteraan tersebut. Untuk merealisasikannya, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab para pemangku kebijakan untuk mengejawantahkannya dalam kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik hukum yang selaras dengan pencapaian tujuan tersebut. Cita-cita akan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera adalah citacita dan tujuan nasional kita bersama. □



karena masih kerap dijumpai masyarakat yang miskin dan pengangguran, ketimpangan ekonomi antara penduduk kota dan penduduk pedesaan, menjadi sebuah otokritik untuk kembali melandaskan seluruh kebijakan ekonomi pada kerangka Pancasila dan konstitusi.

Jangan sampai kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil lebih mementingkan kepentingan pemodal ketimbang kepentingan

# Ketika Indonesia **Menjadi** Laboratorium Politik

Dinamika politik dan pemilu di Indonesia tertuang dalam buku yang berjudul: Literasi Politik dan Pelembagaan Pemilu. Buku ini mengupas berbagai masalah, serta ide dan gagasan untuk menciptakan sistem demokrasi yang diharapkan. Banyak pengetahuan baru di buku ini.

**K**UMPULAN tulisan dari para akademisi, peneliti, dan pengamat politik, yang termuat dalam satu buku dengan judul *Literasi Politik dan Pelembagaan Pemilu* ini sangat tepat bila dibaca oleh para politisi, dosen ilmu terkait, mahasiswa, dan masyarakat luas. Dalam buku ini ada 12 penulis dari berbagai latar perguruan tinggi dan lembaga penelitian (politik). Di antara Gun Gun Heryanto, Andi Faisal Bakti, dan Adi Prayitno, serta nama-nama pengamat politik yang populer di kalangan masyarakat.

Sesuai dengan judul, dalam buku ini, penulis baik sendiri maupun berdua mengungkapkan berbagai gagasan, ide, persoalan, dan masalah politik yang ada di Indonesia, juga pengaruh dari politik dunia. Tulisan yang disajikan tidak hanya mengupas situasi politik yang lagi hangatnya saat ini, namun juga sejarah politik yang pernah terjadi di negeri ini. Hal tersebut bisa kita lihat pada Bab I tulisan Andi Faisal Bakti dan Muhammad Yusufik. Dalam bab berjudul *Pergumulan Partai Nasionalis Sekularis dan Nasionalis Religius (Islam) Melalui Pemilu 1955 – 2009* dipaparkan dalam 8 sub bab. Dimulai dari *teori ideologi dan partai politik, partai-partai politik pra dan pasca kemerdekaan, hingga pemilihan presiden langsung*.

Selepas Pemilu 2004, dunia perpolitikan di Tanah Air arahnya juga ditentukan oleh adanya survei politik yang banyak dilakukan oleh lembaga survei. Nah, dalam Bab III dari buku yang memiliki ketebalan XVI + 250 halaman itu, Idring R. Hasan bersama Dirga Maulana mengupas masalah *Etika Survei Opini Publik*.

Terungkap ada cerita yang menarik mengapa survei pada masa Orde Baru tidak berkembang. Di tulisan itu disebut ada dua alasan mengapa survei pada masa pemerintahan Presiden Soeharto tidak berkembang. *Pertama*, survei dianggap rezim bagian dari insubordinasi bahkan subversi terhadap kekuasaan. Dicontohkan kasus penangkapan surveyor PT. Suburi pada tahun 1972 di Semarang, Jawa Tengah, karena menempatkan posisi Soeharto pada nomor tiga dari sepuluh nama pemimpin lainnya dalam kuisioner. Hal ini telah menyulut kemarahan intelijen. *Kedua*, Orde Baru yang

otoriter melakukan pemilihan umum secara non-demokratis sehingga asas partisipasi dilikuidasi dengan mobilisasi, parsialitas birokrasi, represi aparat, dan kemenangan Golkar sebagai *the ruling party* sudah bisa ditebak. Dari sinilah survei tidak bisa hidup karena adanya kungkungan otoritanisme Orde Baru.

Dalam penutup Bab III, dikemukakan didorong adanya kode etik atau rambu-rambu di kalangan lembaga survei sebab penulis mengakui adanya kecenderungan yang memprihatinkan dalam

dunia survei akhir-akhir ini. Tak hanya itu yang diinginkan oleh penulis, lembaga survei diharap berani transparan pada publik untuk membuka siapa yang memakai jasa survei mereka.

Sebagai kaum perempuan, Dian Sari Pertiwi, alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam Bab VIII menulis *Mendorong Demokratisasi Panggung Politik Perempuan*. Pada uraiannya, Dian memaparkan bahwa masalah kuota perempuan juga menjadi bahasan di banyak negara, baik di Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Sebagian besar kuota menggunakan angka 30%, bahkan ada yang 40% seperti di Norwegia. Angka 30% banyak yang menjadi ketetapan, sebab angka ini diyakini sebagai 'angka kritis' (*critical number*) yang harus dicapai untuk memungkinkan suatu perubahan.

Gun Gun Heryanto dalam pengantar menyebut buku yang diterbitkan oleh *Churia, The Policy Institute*, dan *Fikom UP Press* itu memiliki makna penting dalam memosisikan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Sejumlah kasus topik berbasis kajian akademik, studi literatur dan studi kasus atas sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dia menyatakan, menjadi pesan sangat jelas bahwa negeri ini adalah laboratorium politik yang besar dan menarik. Pergumulan partai, pencarian model substantif dalam pemilu, evaluasi sistem pilkada, etika lembaga survei, literasi politik pemilu, demokrasi kampanye, dan topik lain dalam buku ini menjalin benang merah perlunya pelembagaan pemilu. □

AWG

